

LKPK & LSKP

Tingkat Wilayah
Sumatera Selatan

2024
Audited



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024 (Audited). Sejak berkumandangnya genta reformasi di negeri ini, yang ditandai dengan ditetapkannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah secara terus-menerus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara. Dalam rangkaian proses reformasi tersebut, penerapan Akuntansi Berbasis Akrua dan penyelenggaraan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam Reformasi Manajemen Keuangan Publik di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik



Rahmadi Murwanto
Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Selatan

Keuangan Pemerintah yang berstandar global sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal dan perbandingannya antarnegara. Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) dalam rangka mewujudkan konsolidasi Pelaporan dan Statistik Keuangan Pemerintah secara Nasional.

Konsolidasi Pelaporan dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat

dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah secara nasional.

Statistik Keuangan Pemerintah menyajikan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti tanpa mengabaikan sistem statistik makroekonomi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, informasi Statistik Keuangan Pemerintah yang konsolidatif dapat digunakan oleh lembaga rating baik domestik maupun internasional dalam melakukan penilaian rating Indonesia sebagai penerbit obligasi Pemerintah. Penilaian rating tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan global business players terhadap Pemerintah Indonesia.

Berkat reformasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara, berangsur-angsur Indonesia menjadi negara yang disegani di kancah perekonomian internasional yang antara lain ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia sebagai tujuan investasi (Investment Grade), sehingga dapat sejajar dengan negara-negara maju.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) telah

menjadi salah satu pilar penting peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah. Sebagai bagian dari komponen penyelenggaraan Pelaporan Keuangan Dan Statistik Keuangan Pemerintah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah secara tepat waktu. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun Laporan Keuangan Konsolidasian (high level mapping) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah tingkat wilayah Sumatera Selatan yang berguna dalam perencanaan, analisis dan pengambilan kebijakan fiskal daerah di Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada Pemerintah Daerah yang telah menyediakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara memadai dan tepat waktu. Kami berharap Laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta dalam mewujudkan

pengelolaan Keuangan Negara yang lebih baik.

Palembang, ____ Agustus 2025

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan



Ditandatangani secara elektronik

Rahmadi Murwanto



DAFTAR ISI, TABEL, DAN GRAFIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI, TABEL, DAN GRAFIK	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	9
A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH	18
A.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024	19
A.2. NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024	20
A.3. LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024	21
B. LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH	22
B.1. LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024	23
B.2. NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024	24
B.3. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024	25
C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH	26
C.1. PENJELASAN UMUM	27
C.2. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH	47
C.3. CATATAN ATAS NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH	55
C.4. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH	66

<u>D. CATATAN ATAS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH</u>	<u>72</u>
D.1. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH	73
D.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH	75
D.3. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH	75
D.4. CATATAN ATAS NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH	82
D.5. CATATAN ATAS LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN TINGKAT WILAYAH	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024.....	48
Tabel 2 Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah.....	48
Tabel 3 Rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024	50
Tabel 4 Rincian Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024	51
Tabel 5 Rincian Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024.....	53
Tabel 6 Rincian Penerimaan Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024.....	53
Tabel 7 Rincian Aset Lancar Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024.....	57
Tabel 8 Aset Tetap Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	59
Tabel 9 Aset Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2023	61
Tabel 10 Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023.....	62
Tabel 11 Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023.....	63
Tabel 12 Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023.....	67
Tabel 13 Rincian Pendapatan Transfer Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023.....	67
Tabel 14 Rincian Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2024.....	69
Tabel 15 Rincian Belanja Operasional Pemerintah Pusat Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023.....	69
Tabel 16 Rincian Belanja Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023.....	70
Tabel 17 Rincian Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024 dan 2023.....	77
Tabel 18 Beban Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024.....	78
Tabel 19 Rincian Saldo Operasi Bruto/Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024	79
Tabel 20 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024	80
Tabel 21 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024	80
Tabel 22 Pinjaman Neto (Net Borrowing) Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah	83
Tabel 23 Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024	84
Tabel 24 Aset Tetap Tingkat Wilayah Tahun 2024.....	84
Tabel 25 Aset Non Produksi Tingkat Wilayah Tahun 2024	85
Tabel 26 Aset Keuangan Neto Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2024 dan Tahun 2023	85
Tabel 27 Arus Masuk dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2024	87
Tabel 28 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2024.....	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pempus dan Pemda TA 2024 (angka setelah eliminasi)	10
Grafik 2 Komposisi Belanja Pempus dan Pemda TA 2024 (angka setelah eliminasi)	11
Grafik 3 Aset Konsolidasian Tahun 2024	12
Grafik 4 Komposisi Kewajiban Tahun 2024	13
Grafik 5 Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Tahun 2024	14
Grafik 6 Perbandingan LO Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (angka setelah eliminasi)	15
Grafik 7 Kekayaan Bersih (Net Worth) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	16
Grafik 8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (CtC,%).....	44
Grafik 9 Proporsi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024.....	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (cross country studies) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Konsolidasi Fiskal dan statistik keuangan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor pemerintah umum (general government) dan sektor publik (public sector) sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal.

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Laporan Operasional Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah

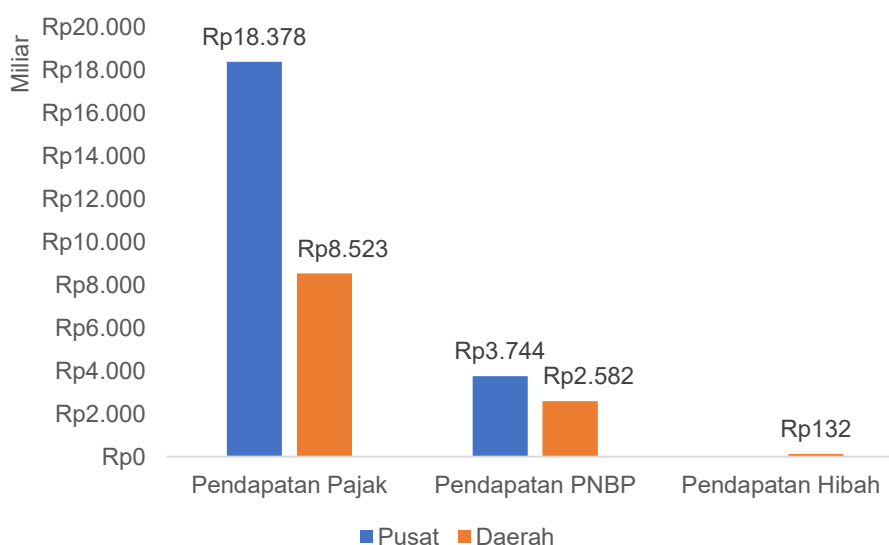
Daerah (LKPD), dan (3) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, proses konsolidasi dilakukan terhadap 18 LKPD yang keseluruhannya merupakan LKPD Audited.

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

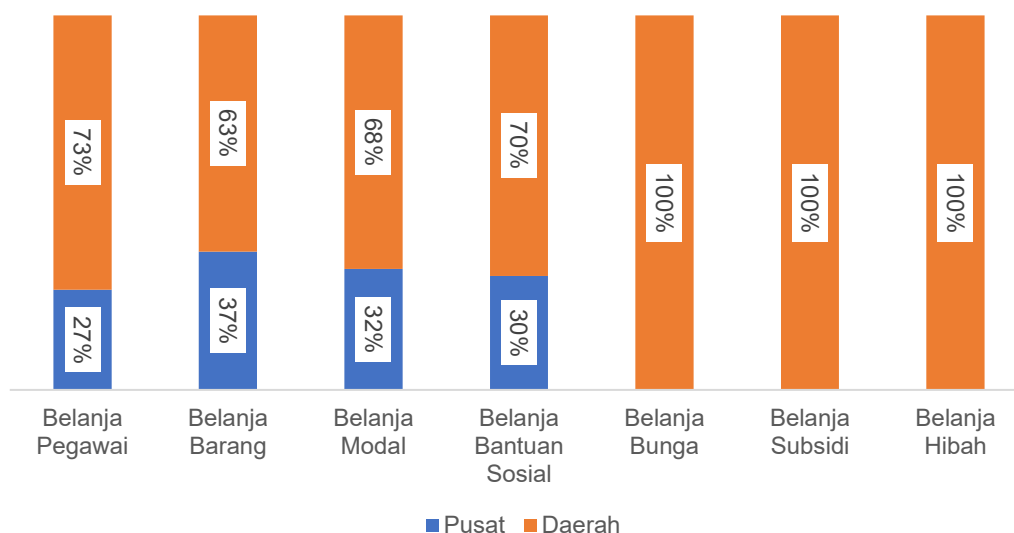
Pada tahun 2024, Pendapatan Konsolidasian mencapai Rp38.643.199.292.614, yang merupakan konsolidasian pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp22.121.938.293.422 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp49.495.422.269.094 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp32.974.161.269.902 Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp26.583.106.411.760, Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian sebesar Rp11.928.399.506.975 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp131.693.373.879.



Grafik 1 Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pempus dan Pemda TA 2024 (angka setelah eliminasi)

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2024 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan, yaitu sebesar 68,79 persen dari total seluruh pendapatan, dan mengalami peningkatan sebesar Rp8.867.496.313.055 atau 29,78 persen dibanding Pendapatan Perpajakan tahun 2023. Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp5.812.175.701.074 atau 95,03 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Hibah mengalami penurunan sebesar -Rp32.655.450.343 atau -19,87 persen.

Belanja Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp69.531.654.975.710, merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat Rp53.095.769.531.156 dan Belanja Pemerintah Daerah Rp49.410.046.714.456 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp32.974.161.269.902. Belanja Konsolidasian tahun 2024 meningkat sebesar Rp9.044.410.421.739 atau 14,95 persen jika dibandingkan dengan Belanja Konsolidasian tahun 2023.



Grafik 2 Komposisi Belanja Pempus dan Pemda TA 2024 (angka setelah eliminasi)

Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2024 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian Rp22.422.698.099.757, Belanja Barang Konsolidasian Rp20.834.853.420.829, Belanja Modal Konsolidasian Rp22.329.202.344.018, Belanja Hibah Konsolidasian Rp2.320.268.772.284, Belanja Subsidi Konsolidasian Rp31.729.691.575, Bantuan Sosial Konsolidasian Rp94.339.508.000, Pembayaran Kewajiban Utang Konsolidasian Rp34.225.157.897, Belanja Lain-Lain sebesar Rp12.542.184.560 dan Belanja Transfer sebesar Rp4.221.422.414.210.

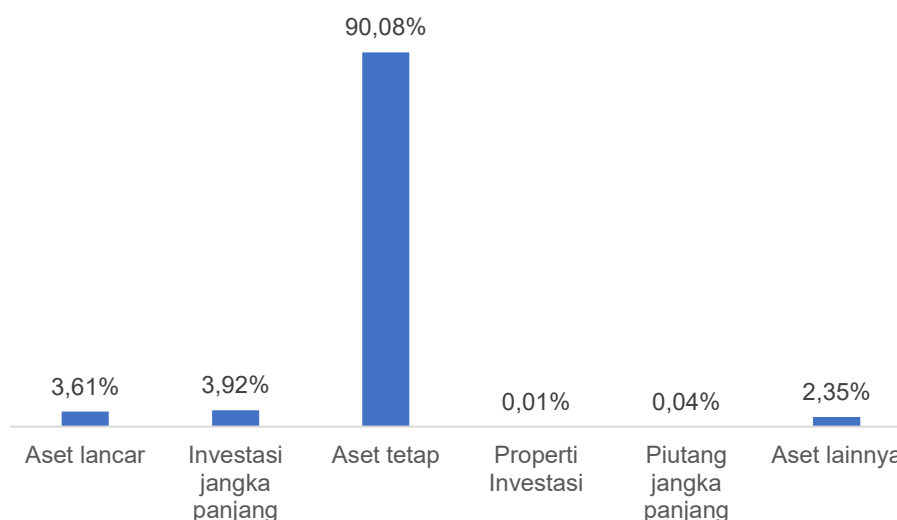
Pada tahun 2024, terdapat Defisit Konsolidasian sebesar -Rp30.888.455.683.096, naik 0,58 persen jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada tahun 2023 yang sebesar minus -Rp30.711.541.574.412. Sumber pembiayaan untuk menutup Defisit

berasal dari Pembiayaan Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp2.485.906.031.374 yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp2.858.365.629.905 setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp328.661.286.738 dan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp43.798.311.793. Terdapat SiKPA Konsolidasian tahun 2024 sebesar **-Rp28.402.549.651.721** yang terdiri dari SiKPA Pemerintah Pusat sebesar **-Rp30.973.831.237.734** dan SiLPA Pemerintah Daerah sebesar Rp2.571.281.586.013.

Konsolidasian Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dilakukan per kabupaten/kota dengan mengkonsolidasikan data belanja per wilayah Sistem Akuntansi Umum/Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAU/SAKUN) untuk Pemerintah Pusat tingkat kabupaten/kota dan data belanja pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemaparan belanja konsolidasian per wilayah dilengkapi dengan indikator sosial ekonomi tingkat wilayah.

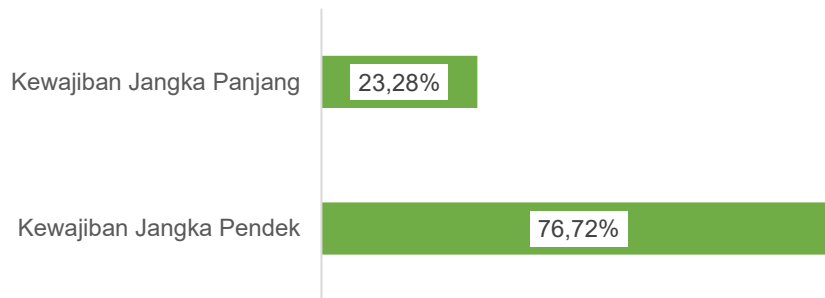
3. Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp330.265.508.966.846 terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp11.938.643.051.289, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp12.933.238.867.565, Aset tetap Konsolidasian sebesar Rp297.492.780.730.623, Properti Investasi sebesar Rp17.795.509.085, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp119.685.597.855 dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp7.763.365.210.429. Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap, yaitu sebesar 90,08 persen dari Total Aset. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat sebesar Rp210.640.145.945.878 dan Aset Pemerintah Daerah sebesar Rp121.377.761.232.019.



Grafik 3 Aset Konsolidasian Tahun 2024

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.536.432.054.215 terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp5.782.168.802.866 atau sebesar 76,72 persen dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.754.263.251.348 atau 23,28 persen. Sedangkan Ekuitas Konsolidasian tahun per 31 Desember 2024 sebesar Rp322.729.076.912.631.

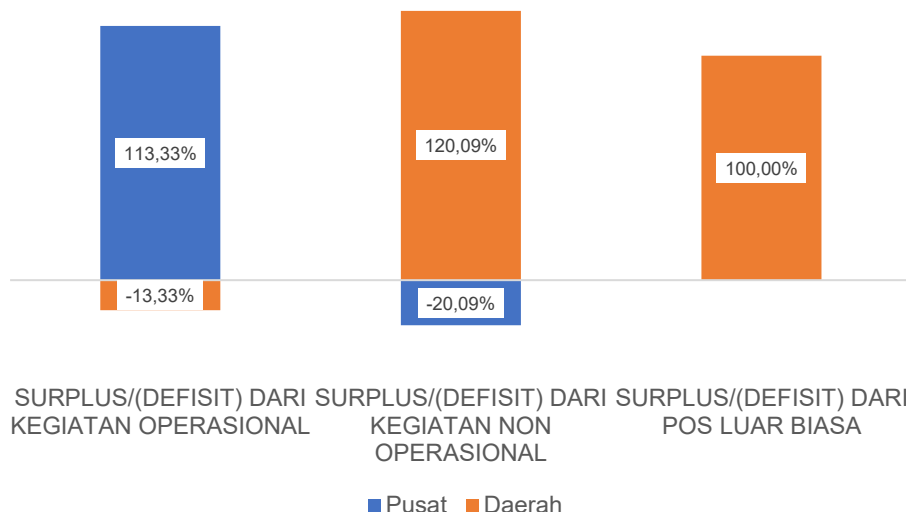


Grafik 4 Komposisi Kewajiban Tahun 2024

4. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024

Laporan Operasioonal merupakan salah satu komponen pada Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan. Laporan Operasional menyajikan Surplus/Defisit dari kegiatan operasi suatu entitas. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi pendapatan, beban, serta surplus/defisit dari kegiatan operasi, baik untuk Laporan Operasional Pemerintah Pusat maupun Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2024, terdapat Defisit-LO Konsolidasian sebesar **-Rp24.075.548.262.661**, yang merupakan konsolidasi dari Defisit-LO Pemerintah Pusat Sebesar **-Rp27.606.042.059.700** dan surplus-LO Pemerintah Daerah sebesar Rp3.530.493.797.039. Surplus/Defisit Konsolidasian tersebut terdiri dari Defisit pada Kegiatan Operasional **-Rp24.316.366.087.394**, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp243.189.147.031. Nilai Defisit Konsolidasian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **-Rp1.911.206.315.617** dibandingkan periode tahun 2023.



Grafik 5 Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Tahun 2024

Defisit dari Kegiatan Operasional Konsolidasian Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Operasional Konsolidasian sebesar Rp43.767.771.156.170 dikurangi Beban Operasional Konsolidasian sebesar Rp68.084.137.243.564. Pendapatan Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp9.255.800.899.301 atau 26,82 persen dibanding periode tahun 2023. Beban Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp11.387.270.296.711 atau sebesar 20,08 persen dibanding periode yang sama di tahun 2023.

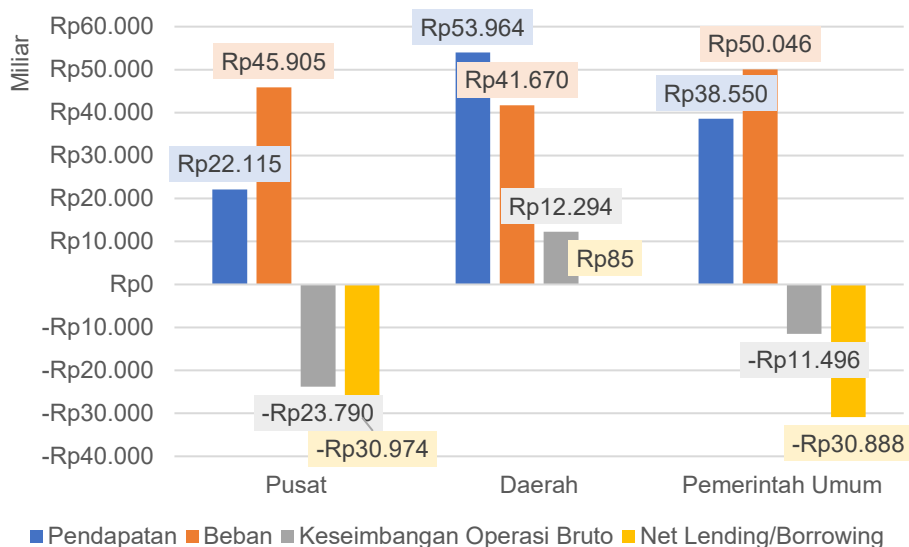
Pendapatan Operasional Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp24.365.296.997.148 dan Pendapatan Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp48.530.013.972.933 serta eliminasi sebesar Rp29.127.539.813.911. Beban Operasional Konsolidasian terdiri dari Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp51.922.472.830.013 dan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp45.289.204.227.462 serta eliminasi sebesar Rp29.127.539.813.911.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Konsolidasian sebesar Rp243.189.147.031 terdiri dari Surplus Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp244.041.534, Defisit Pempus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **-Rp63.301.294.016**, Surplus Pempus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp14.191.025.647, Surplus Pemda Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp64.524.040.338 dan Surplus Pemda dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp227.531.333.528. Selanjutnya, Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar **-Rp2.371.322.299**.

5. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Operasional yang di-mapping menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan high level mapping serta Laporan Sumber Dana Penggunaan Kas. Laporan Operasional Statistik keuangan pemerintah umum tingkat wilayah mencatat semua transaksi mulai dari 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 meliputi pendapatan, beban, perolehan aset non keuangan neto, perolehan aset keuangan neto, keterjadian kewajiban neto sehingga menghasilkan perubahan pada nilai kekayaan neto (Neraca). Sedangkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah menyajikan aliran kas masuk dan keluar pemerintah.

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) Konsolidasian, Keseimbangan Operasi Bruto/Neto sebesar -Rp11.496.308.312.960, meningkat Rp2.811.810.760.957 atau 19,65 persen dibanding tahun 2023.



Grafik 6 Perbandingan LO Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (angka setelah eliminasi)

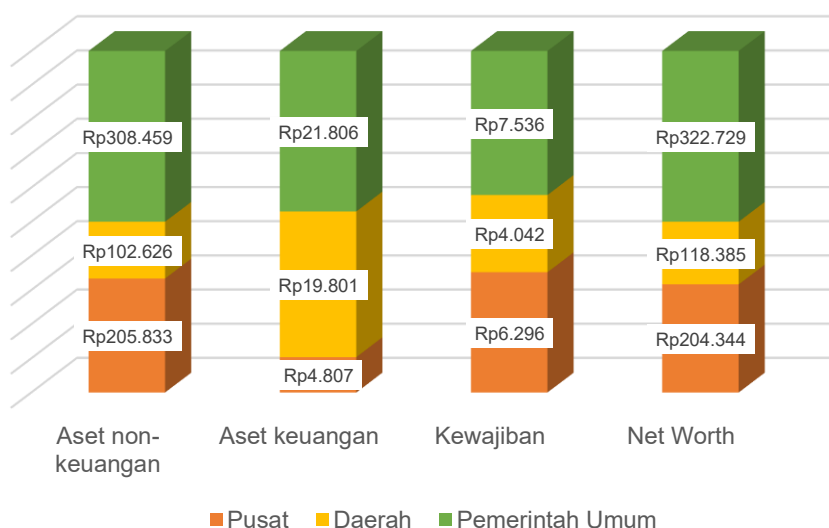
Keseimbangan Operasi Bruto/Neto Konsolidasian merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp38.550.059.988.363 dan beban operasional sebesar Rp50.046.368.301.323, yang pada akhirnya mempengaruhi kekayaan neto yang berasal dari transaksi. Indikator ini merupakan ukuran kesinambungan operasional (operational sustainability).

Kondisi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian menunjukkan defisit (Net Borrowing) sebesar -Rp30.888.455.683.096. Net Lending/Borrowing, yang umumnya disebut surplus/defisit, dihitung sebesar keseimbangan operasi neto -Rp11.496.308.312.960 dikurangi investasi neto

Rp19.392.147.370.136 dalam aset non keuangan. Semua transaksi akuisisi atau penghentian aset keuangan dan kewajiban diperlakukan sebagai transaksi pembiayaan.

Nilai defisit (Net Borrowing) turun **-Rp176.914.108.684** atau 0,58 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar **-Rp30.711.541.574.412**. Penurunan deficit tersebut disebabkan Pendapatan tahun 2024 meningkat sebesar R Rp8.867.554.867.425 atau 29,87 persen meskipun juga diikuti peningkatan beban sebesar Rp6.055.744.106.468 atau 13,77 persen dibanding tahun 2023.

Berdasarkan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Sumatera Selatan, Kekayaan Bersih (Net Worth) menunjukkan hasil yang positif, dimana jumlah aset jauh lebih besar dibanding jumlah kewajiban yang artinya posisi kewajiban atau utang masih dalam batas yang aman.



Grafik 7 Kekayaan Bersih (Net Worth) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Kekayaan Bersih pada (Net Worth) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp322.729.076.912.631, menurun sebesar **-Rp1.311.620.766.234** atau **-0,40** persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan adanya kenaikan Aset Nonkeuangan dan penurunan Aset Keuangan dan disisi lain juga terdapat kenaikan pada Kewajiban.

Pada tahun 2024, Aset Nonkeuangan naik sebesar Rp1.747.750.486.223 atau 0,57 persen dan Aset Keuangan turun sebesar **-Rp1.038.497.096.739** atau **-4,55** persen (YoY). Persentase kenaikan yang lebih besar terjadi pada pos Kewajiban, yaitu sebesar 36,64 persen (YoY) atau Rp2.020.874.155.717. Kenaikan tertinggi pada pos Kewajiban diakibatkan oleh peningkatan Utang Lainnya (Other Accounts Payable) sebesar Rp2.204.662.805.815 atau 44,51 persen (YoY).

Aset Pemerintah Umum didominasi oleh Aset Nonkeuangan yang terdiri dari aset tetap, persediaan, dan aset nonproduksi. Hal ini menunjukkan keselarasan program yang telah

dilakukan dengan fungsi Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik untuk pelayanan masyarakat dan penunjang kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024, secara umum Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencapai Rp32.284.349.887.445 yang diperoleh dari Arus Kas Masuk sebesar Rp75.307.933.231.327 dikurangi Arus Kas Keluar sebesar Rp43.023.583.343.882. Arus Kas Bersih dari Investasi Non Keuangan mencapai Rp17.896.248.648.555 yang diperoleh dari Pembelian Aset Non Keuangan sebesar Rp17.916.240.398.779 dan Penjualan Aset non Keuangan sebesar Rp19.991.750.224. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp372.356.398.531 yang berasal dari Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas sebesar Rp43.695.111.793 dan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar **-Rp328.661.286.738**. Penjumlahan seluruh aktivitas Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan Perubahan Bersih dalam Persediaan Uang Tunai sebesar Rp21.834.957.449.530.

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
(LKPK-TW)
SUMATERA SELATAN
AUDITED 2024**



**A.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024**

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Pendapatan	C.2.1	Rp38.643.199.292.614	Rp29.775.702.979.559	Rp8.867.496.313.055	29,78
Pendapatan Perpajakan konsolidasi	C.2.1.1	Rp26.583.106.411.760	Rp23.495.130.349.436	Rp3.087.976.062.324	13,14
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.2.1.2	Rp11.928.399.506.975	Rp6.116.223.805.901	Rp5.812.175.701.074	95,03
Pendapatan hibah	C.2.1.3	Rp131.693.373.879	Rp164.348.824.222	-Rp32.655.450.343	-19,87
Belanja	C.2.2	Rp69.531.654.975.710	Rp60.487.244.553.971	Rp9.044.410.421.739	14,95
Belanja pegawai	C.2.2.1	Rp22.422.698.099.757	Rp17.849.847.836.288	Rp4.572.850.263.469	25,62
Belanja barang dan jasa	C.2.2.2	Rp22.329.202.344.018	Rp18.507.412.366.916	Rp3.821.789.977.102	20,65
Belanja Modal	C.2.2.3	Rp18.065.226.803.409	Rp14.983.729.010.262	Rp3.081.497.793.147	20,57
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	C.2.2.4	Rp34.225.157.897	Rp54.788.194.668	-Rp20.563.036.771	-37,53
Belanja Subsidi	C.2.2.5	Rp31.729.691.575	Rp15.882.811.614	Rp15.846.879.961	99,77
Belanja Hibah	C.2.2.6	Rp2.320.268.772.284	Rp1.700.199.639.686	Rp620.069.132.598	36,47
Belanja Bantuan Sosial	C.2.2.7	Rp94.339.508.000	Rp62.104.337.000	Rp32.235.171.000	51,90
Belanja Lain-lain	C.2.2.8	Rp12.542.184.560	Rp6.565.622.538	Rp5.976.562.022	91,03
Belanja Transfer	C.2.2.9	Rp4.221.422.414.210	Rp7.306.714.735.000	-Rp3.085.292.320.790	-42,23
Surplus (Defisit) Anggaran	C.2.3	-Rp30.888.455.683.096	-Rp30.711.541.574.412	-Rp176.914.108.684	0,58
Pembiayaan	C.2.4	Rp2.485.906.031.374	Rp2.764.696.608.268	-Rp278.790.576.894	-10,08
Penerimaan Pembiayaan		Rp2.858.365.629.905	Rp3.639.370.289.714	-Rp781.004.659.809	-21,46
Pengeluaran Pembiayaan		Rp372.459.598.531	Rp874.673.681.446	-Rp502.214.082.915	-57,42
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	C.2.5	-Rp28.402.549.651.721	-Rp27.946.844.966.145	-Rp455.704.685.576	1,63

**A.2. NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024**

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Aset	B.2.1	Rp330.265.508.966.846	Rp327.838.239.333.581	Rp2.427.269.633.265	0,74
Aset lancar	B.2.1.1	Rp11.938.643.051.289	Rp11.043.323.721.666	Rp895.319.329.623	8,11
Investasi jangka panjang	B.2.1.2	Rp12.933.238.867.565	Rp11.167.713.985.059	Rp1.765.524.882.506	15,81
Aset tetap	B.2.1.3	Rp297.492.780.730.623	Rp295.577.688.451.749	Rp1.915.092.278.874	0,65
Properti Investasi	B.2.1.4	Rp17.795.509.085	Rp17.850.712.407	-Rp55.203.322	-0,31
Dana cadangan	B.2.1.5		Rp101.613.577.486	-Rp101.613.577.486	-100,00
Piutang jangka panjang	B.2.1.6	Rp119.685.597.855	Rp48.603.648.319	Rp71.081.949.536	146,25
Aset lainnya	B.2.1.7	Rp7.763.365.210.429	Rp9.881.445.236.895	-Rp2.118.080.026.466	-21,43
Kewajiban / Utang	B.2.2	Rp7.536.432.054.215	Rp5.515.557.898.498	Rp2.020.874.155.717	36,64
Kewajiban jangka pendek	B.2.2.1	Rp5.782.168.802.866	Rp3.729.306.852.107	Rp2.052.861.950.759	55,05
Kewajiban jangka panjang	B.2.2.2	Rp1.754.263.251.348	Rp1.786.251.046.391	-Rp31.987.795.043	-1,79
Kewajiban Konsesi Jasa	B.2.2.3	Rp1.466.227.147.170	Rp1.439.682.593.997	Rp26.544.553.173	1,84
Ekuitas	B.2.3	Rp322.729.076.912.631	Rp322.322.681.435.083	Rp406.395.477.548	0,13

A.3. LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Pendapatan Operasional-LO	B.3.1	Rp43.767.771.156.170	Rp34.511.970.256.869	Rp9.255.800.899.301	26,82
Pendapatan perpajakan-LO		Rp29.645.204.467.502	Rp25.661.802.280.849	Rp3.983.402.186.653	15,52
Pendapatan bukan pajak-LO		Rp2.142.398.958.956	Rp2.161.679.468.734	-Rp19.280.509.778	-0,89
Pendapatan Transfer - LO		Rp6.744.592.359.373	Rp2.464.814.436.240	Rp4.279.777.923.133	173,63
Pendapatan BLU-LO		Rp3.609.811.046.842	Rp3.173.200.880.503	Rp436.610.166.339	13,76
Pendapatan hibah-LO		Rp937.732.588.002	Rp949.640.208.052	-Rp11.907.620.050	-1,25
Pendapatan lainnya-LO		Rp688.031.735.495	Rp100.832.982.491	Rp587.198.753.004	582,35
Beban Operasional	B.3.2	Rp68.084.137.243.564	Rp56.696.866.946.853	Rp11.387.270.296.711	20,08
Beban pegawai		Rp23.119.063.451.807	Rp18.368.398.652.612	Rp4.750.664.799.195	25,86
Beban persediaan		Rp1.017.226.276.412	Rp982.669.162.794	Rp34.557.113.618	3,52
Beban barang dan jasa		Rp21.015.070.290.757	Rp17.345.356.608.853	Rp3.669.713.681.904	21,16
Beban bunga		Rp33.784.706.229	Rp49.571.980.544	-Rp15.787.274.315	-31,85
Beban subsidi		Rp28.504.026.949	Rp17.108.088.997	Rp11.395.937.952	66,61
Beban hibah		Rp2.825.674.739.961	Rp2.369.123.292.823	Rp456.551.447.138	19,27
Beban bantuan sosial		Rp123.806.229.946	Rp90.400.526.722	Rp33.405.703.224	36,95
Beban lain-lain/beban tidak terduga		Rp21.337.330.741	Rp72.628.931.258	-Rp51.291.600.517	-70,62
Beban akrual lainnya		Rp13.428.190.559.333	Rp12.632.868.652.242	Rp795.321.907.091	6,30
Beban Transfer		Rp6.471.479.631.428	Rp4.768.741.050.008	Rp1.702.738.581.420	35,71
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	B.3.3	-Rp24.316.366.087.394	-Rp22.184.896.689.984	-Rp2.131.469.397.410	9,61
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI		Rp244.041.534	Rp15.767.738	Rp228.273.796	1447,73
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR		-Rp63.301.294.016	-Rp61.663.973.215	-Rp1.637.320.801	2,66
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		Rp14.191.025.647	Rp55.897.700.495	-Rp41.706.674.848	-74,61
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR		Rp64.524.040.338	-Rp93.292.114.113	Rp157.816.154.451	-169,16
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			-Rp237.365.507	Rp237.365.507	-100,00
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		Rp227.531.333.528	Rp123.286.682.649	Rp104.244.650.879	84,55
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	B.3.4	Rp243.189.147.031	Rp24.006.698.047	Rp219.182.448.984	913,01
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		-Rp24.073.176.940.362	-Rp22.160.889.991.937	-Rp1.912.286.948.425	8,63
POS LUAR BIASA		-Rp2.371.322.299		-Rp2.371.322.299	-100,00
PENDAPATAN LUAR BIASA					
BEBA LUAR BIASA		-Rp2.371.322.299		-Rp2.371.322.299	-100,00
SURPLUS (DEFISIT) LO	B.3.5	-Rp24.075.548.262.661	-Rp22.164.341.947.044	-Rp1.911.206.315.617	8,62

**LAPORAN STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH
(LSKP-TW)
SUMATERA SELATAN
AUDITED 2024**



**B.1. LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024**

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
PENDAPATAN		Rp38.550.059.988.363	Rp29.682.505.120.938	Rp8.867.554.867.425	29,87
Pajak		Rp26.560.716.548.185	Rp23.493.239.926.316	Rp3.067.476.621.869	13,06
Kontribusi sosial					
Hibah		Rp5.340.274.739.054	Rp462.723.355.828	Rp4.877.551.383.226	1054,10
Pendapatan lainnya		Rp6.649.068.701.124	Rp5.726.541.838.794	Rp922.526.862.330	16,11
BEBAN		Rp50.046.368.301.323	Rp43.990.624.194.855	Rp6.055.744.106.468	13,77
Kompensasi pegawai		Rp21.909.322.354.807	Rp17.771.477.946.972	Rp4.137.844.407.835	23,28
Penggunaan barang dan jasa		Rp21.029.483.505.616	Rp16.687.132.766.985	Rp4.342.350.738.631	26,02
Konsumsi modal tetap					
Bunga		Rp34.225.157.897	Rp54.788.194.668	-Rp20.563.036.771	-37,53
Subsidi		Rp31.729.691.575	Rp15.882.811.614	Rp15.846.879.961	99,77
Hibah		Rp4.525.933.074.631	Rp7.470.082.608.669	-Rp2.944.149.534.038	-39,41
Manfaat sosial		Rp94.339.508.000	Rp62.104.337.000	Rp32.235.171.000	51,90
Biaya lainnya		Rp2.421.335.008.797	Rp1.929.155.528.948	Rp492.179.479.849	25,51
Saldo operasi bruto (1-2+23+NOBz)		-Rp11.496.308.312.960	-Rp14.308.119.073.917	Rp2.811.810.760.957	-19,65
Saldo operasi bersih (1-2+NOBz)		-Rp11.496.308.312.960	-Rp14.308.119.073.917	Rp2.811.810.760.957	-19,65
TRANSAKSI BERSIH DALAM ASET DAN LIABILITAS		-Rp11.496.308.312.960	-Rp14.308.119.073.917	Rp2.811.810.760.957	-19,65
Investasi bersih/kotor dalam aset nonkeuangan		Rp19.392.147.370.136	Rp16.403.422.500.495	Rp2.988.724.869.641	18,22
Aset Tetap		Rp17.975.079.568.202	Rp14.905.564.364.930	Rp3.069.515.203.272	20,59
Sistem senjata					
Persediaan		Rp1.346.912.316.951	Rp1.449.591.238.350	-Rp102.678.921.399	-7,08
Aset yang tidak diproduksi		Rp70.155.484.983	Rp48.266.897.215	Rp21.888.587.768	45,35
Pinjaman / pinjaman bersih (1-2+NOBz-31)		-Rp30.888.455.683.096	-Rp30.711.541.574.412	-Rp176.914.108.684	0,58
TRANSAKSI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (PEMBIAYAAN):					
Akuisisi bersih aset keuangan [321+322+323]		-Rp31.217.116.969.833	-Rp31.413.423.229.527	Rp196.306.259.694	-0,62
Debitur domestik		-Rp31.217.116.969.833	-Rp31.413.423.229.527	Rp196.306.259.694	-0,62
Debitur eksternal					
Timbulnya kewajiban bersih [331+332]		-Rp328.661.286.738	-Rp701.881.655.115	Rp373.220.368.377	-53,17
Kreditur domestik		-Rp328.661.286.738	-Rp701.881.655.115	Rp373.220.368.377	-53,17
Kreditur eksternal					

B.2. NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
KEKAYAAN BERSIH		Rp322.729.076.912.631	Rp324.040.697.678.865	-Rp1.311.620.766.234	-0,40
Aset non-keuangan		Rp308.459.107.373.207	Rp306.711.356.886.984	Rp1.747.750.486.223	0,57
Aset Tetap		Rp145.334.054.658.112	Rp144.570.665.092.837	Rp763.389.565.275	0,53
Bangunan dan struktur		Rp129.010.389.064.345	Rp126.440.402.826.805	Rp2.569.986.237.540	2,03
Mesin dan peralatan		Rp6.261.346.128.316	Rp7.461.146.238.500	-Rp1.199.800.110.184	-16,08
Aset tetap lainnya		Rp10.062.319.465.451	Rp10.669.116.027.532	-Rp606.796.562.081	-5,69
Sistem senjata					
Persediaan		Rp3.622.912.648.298	Rp3.265.306.115.081	Rp357.606.533.217	10,95
Saham strategis		Rp5.673.210	Rp69.766.180	-Rp64.092.970	-91,87
Persediaan lainnya		Rp3.622.906.975.088	Rp3.265.236.348.901	Rp357.670.626.187	10,95
Barang berharga					
Aset yang tidak diproduksi		Rp159.502.140.066.797	Rp158.875.385.679.065	Rp626.754.387.732	0,39
Tanah		Rp159.439.115.586.747	Rp158.875.385.679.065	Rp563.729.907.682	0,35
Sumber daya mineral dan energi					
Aset alami lainnya					
Aset tidak berwujud yang tidak diproduksi		Rp63.024.480.050		Rp63.024.480.050	100,00
Aset keuangan		Rp21.806.401.593.639	Rp22.844.898.690.378	-Rp1.038.497.096.739	-4,55
Emas moneter dan SDR					
Mata uang dan deposito		Rp5.274.998.852.290	Rp5.611.987.366.294	-Rp336.988.514.004	-6,00
Surat utang		Rp76.766.164.437	Rp388.603.437	Rp76.377.561.000	19654,37
Pinjaman		Rp7.270.375.295	Rp7.370.375.295	-Rp100.000.000	-1,36
Saham ekuitas dan dana investasi		Rp12.932.850.264.128	Rp11.167.325.381.622	Rp1.765.524.882.506	15,81
Piutang lainnya		Rp3.514.515.937.489	Rp6.057.826.963.730	-Rp2.543.311.026.241	-41,98
Debitur domestik		Rp21.806.401.593.639	Rp22.844.898.690.378	-Rp1.038.497.096.739	-4,55
Kreditur eksternal					
Kewajiban		Rp7.536.432.054.215	Rp5.515.557.898.498	Rp2.020.874.155.717	36,64
Hak Penarikan Khusus (SDR)					
Mata uang dan deposito					
Surat utang					
Pinjaman		Rp379.019.746.557	Rp562.808.396.655	-Rp183.788.650.098	-32,66
Saham ekuitas dan dana investasi					
Asuransi, pensiun, dan jaminan standar					
Derivatif keuangan dan opsi saham karyawan					
Hutang usaha lainnya		Rp7.157.412.307.658	Rp4.952.749.501.843	Rp2.204.662.805.815	44,51
Kreditur domestik		Rp7.536.432.054.215	Rp5.515.557.898.498	Rp2.020.874.155.717	36,64
Kreditur eksternal					

B.3. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE AUDITED 2024

URAIAN	CAT.	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI					
Penerimaan kas dari kegiatan operasi		Rp75.307.933.231.327	Rp66.931.072.143.541	Rp8.376.861.087.786	12,52
Pajak		Rp10.153.297.659.967	Rp10.113.842.253.318	Rp39.455.406.649	0,39
Kontribusi Sosial					
Hibah		Rp5.340.274.739.054	Rp462.723.355.828	Rp4.877.551.383.226	1054,10
Penerimaan Lainnya		Rp59.814.360.832.307	Rp56.354.506.534.395	Rp3.459.854.297.912	6,14
Pembayaran tunai untuk kegiatan operasi		Rp43.023.583.343.882	Rp37.593.544.583.291	Rp5.430.038.760.591	14,44
Kompensasi Karyawan		Rp23.077.816.402.149	Rp18.389.727.914.273	Rp4.688.088.487.876	25,49
Pembelian Barang dan Jasa		Rp20.887.390.661.219	Rp16.970.516.624.300	Rp3.916.874.036.919	23,08
Minat		Rp34.225.157.897	Rp54.788.194.668	-Rp20.563.036.771	-37,53
Subsidi		Rp31.729.691.575	Rp15.882.811.614	Rp15.846.879.961	99,77
Hibah		-Rp3.625.791.346.070	-Rp584.370.081.663	-Rp3.041.421.264.407	520,46
Manfaat Sosial		Rp94.339.508.000	Rp62.104.337.000	Rp32.235.171.000	51,90
Pembayaran Lainnya		Rp2.523.873.269.112	Rp2.684.894.783.100	-Rp161.021.513.988	-6,00
ARUS KAS MASUK BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI		Rp32.284.349.887.445	Rp29.337.527.560.250	Rp2.946.822.327.195	10,04
ARUS KAS DARI TRANSAKSI DALAM ASET NON KEUANGAN					
Pembelian aset non-keuangan		Rp17.916.240.398.779	Rp14.898.434.612.730	Rp3.017.805.786.049	20,26
Aktiva		Rp17.846.084.913.796	Rp14.850.093.965.515	Rp2.995.990.948.281	20,17
Saham Strategis					
Barang berharga					
Aset Tidak Diproduksi		Rp70.155.484.983	Rp48.340.647.215	Rp21.814.837.768	45,13
Penjualan aset non-keuangan		Rp19.991.750.224	Rp29.897.748.117	-Rp9.905.997.893	-33,13
Aktiva		Rp19.991.750.224	Rp29.897.748.117	-Rp9.905.997.893	-33,13
Saham Strategis					
Barang berharga					
Aset Tidak Diproduksi					
ARUS KAS KELUAR BERSIH DARI INVESTASI ASET NONKEUANGAN		Rp17.896.248.648.555	Rp14.868.536.864.613	Rp3.027.711.783.942	20,36
SURPLUS KAS/DEFISIT		Rp14.388.101.238.890	Rp14.468.990.695.636	-Rp80.889.456.746	-0,56
ARUS KAS DARI TRANSAKSI ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (PEMBIAYAAN)					
AKUISISI BERSIH ASET KEUANGAN SELAIN KAS		Rp43.695.111.793	Rp108.864.276.331	-Rp65.169.164.538	-59,86
Debitur domestik		Rp43.695.111.793	Rp108.864.276.331	-Rp65.169.164.538	-59,86
Kreditur eksternal					
KEWAJIBAN BERSIH		-Rp328.661.286.738	-Rp701.881.655.115	Rp373.220.368.377	-53,17
Kreditur domestik		-Rp328.661.286.738	-Rp701.881.655.115	Rp373.220.368.377	-53,17
Kreditur eksternal					
ARUS KAS MASUK BERSIH DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN		Rp372.356.398.531	Rp810.745.931.446	-Rp438.389.532.915	-54,07
PERUBAHAN BERSIH STOK UANG TUNAI		Rp21.834.957.449.530	Rp19.043.382.510.239	Rp2.791.574.939.291	14,66
Cek vertikal: Selisih antara surplus/defisit kas dan total arus kas masuk bersih dari kegiatan		-Rp7.074.499.812.109	-Rp3.763.645.883.156	-Rp3.310.853.928.953	87,97
..... Pemerintah pusat					
..... Pemerintah pusat anggaran					

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
(LKPK-TW)
SUMATERA SELATAN
AUDITED 2024**



C.1. PENJELASAN UMUM

C.1.1 Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Daerah yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Lampiran I dan II)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C.1.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (Lampiran I PP 71 tahun 2010) menyatakan laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan bahwa sejak pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual maka laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian mengingat ada beberapa pilihan kebijakan akuntansi dimana entitas akuntansi terpisah BUN/BUD dengan KL/SKPD maka konsolidasi hanya diterapkan pada beberapa laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Laporan Operasional Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian disusun melalui konsolidasi tiga tahap, yaitu:

- a. *Konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) dan Laporan Keuangan Unit*

Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil)

LKPP tingkat wilayah tahun 2024 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat di wilayah, yang terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP tingkat wilayah tidak mencakup entitas Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). LKPP tingkat wilayah mencakup transaksi-transaksi keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan maupun dana Urusan Bersama.

LKPP tingkat wilayah disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah, serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah tidak disusun untuk tujuan pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa

sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi Belanja Lain-lain (SA-BL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP, namun saat ini belum mengakomodasikan LKPP Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah disusun melalui konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Tingkat Kanwil dengan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

LKPP Tingkat Wilayah terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPPA-W dan Laporan Arus Kas Kuasa BUN tingkat wilayah. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah terdiri dari:

- 1) Angka realisasi Pendapatan dan Hibah tingkat wilayah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Kuasa BUN di wilayah sebagai pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara di wilayah (data SAKUN). Sedangkan data realisasi Pendapatan dan Hibah yang dilaporkan UAPPA-W berfungsi sebagai penguji (kontrol) data Kuasa BUN.
- 2) Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan kompilasi realisasi belanja yang dilaporkan oleh UAPPA-W, di mana kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Apabila,

proses rekonsiliasi antara KPPN dan satker, serta rekonsiliasi antara UAPPA-W dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan dengan baik, angka yang dilaporkan oleh UAPPA-W akan sama dengan angka yang dilaporkan oleh Kanwil sebagai kuasa BUN. Apabila masih terdapat angka suspen, yaitu selisih antara angka UAPPA-W dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka angka realisasi Belanja Wilayah dapat menggunakan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh Kuasa BUN (data SAU/SAKUN). Angka tersebut berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja UAPPA-W. Hal ini dimungkinkan karena LKPP wilayah disusun dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah, bukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan penggunaan data SAU/SAKUN untuk belanja dilakukan dengan pertimbangan angka suspen yang terkecil.

- 3) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah tidak menyajikan angka realisasi Pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN pusat.

b. Neraca Pemerintah Pusat tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca tingkat UAPPA-W dan Neraca tingkat Kuasa BUN. Perlakuan konsolidasi atas Neraca tingkat UAPPA-W dan Neraca Tingkat Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dan Setara meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU.
- 2) Angka Kas di KPPN diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN. Angka Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU diambil dari Neraca Tingkat UAPPA-W. Rekening Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Kas Lainnya yang telah disahkan ke KPPN dan Kas pada BLU yang telah disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA.
- 3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN, disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA.

- 4) Utang kepada Pihak Ketiga, diambil dari Neraca UAPPA-W, disajikan dengan akun pasangan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
 - 5) Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan.
 - 6) Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung berbentuk kas yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan.
 - 7) Kas pada BLU yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Dana Lancar BLU.
 - 8) Piutang, Investasi Jangka Pendek, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta akun pasangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam jurnal standar, didasarkan pada Neraca UAPPA-W.
- c. Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
- Laporan Operasional (LO) kertas kerja LKPP-TW disusun berdasarkan konsolidasi LO UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil. Kebijakan penyusunan LO LKPP-TW adalah sebagai berikut:
- 1) LO Kertas Kerja LKPP-TW hanya disusun dari data LK UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil karena LK UAKKBUN Kanwil tidak memiliki LO.
 - 2) Penyusunan LO Kertas Kerja LKPP-TW dilakukan dengan mengkonsolidasi seluruh Pendapatan-LO dan Beban, dan menambahkan hasil reklasifikasi Utang Pajak yang Belum Disetor Bendahara Pengeluaran ke Pendapatan Perpajakan-LO.
 - 3) Walaupun pembayaran Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dilakukan secara terpusat, namun dataset yang diambil dari OMSPAN dan/atau erekon&LK untuk keperluan penyusunan LO-LKPP-TW juga berisi realisasi Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dalam wilayah kerja Kanwil. Atas realisasi transfer tersebut diakui belanja transfer maupun pendapatannya sehingga tidak mengakibatkan defisit.
- d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) kertas kerja LKPP-TW disusun dengan mengonsolidasikan LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil dengan penyesuaian dari beberapa akun Neraca UAKKBUN Kanwil. Kebijakan penyusunan LPE LKPP-TW adalah sebagai berikut:

- 1) Angka Ekuitas Awal pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Ekuitas akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW pada periode pelaporan sebelumnya.
 - 2) Surplus/Defisit LO pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Surplus/Defisit LO kertas kerja LKPP-TW.
 - 3) Koreksi yang Menambah/Mengurangi merupakan pos untuk menampung selisih catatan kas antara UAKPA Konsolidasian dengan UAKBUN Daerah Tingkat Kanwil, Koreksi Kas Dalam Transito, serta koreksi lainnya.
 - 4) Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas merupakan pos untuk menampung reklasifikasi akun Uang Muka dari KPPN pada Neraca UAKPA Konsolidasian.
 - 5) Transaksi Antar Entitas, seperti Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL), Transfer Masuk, Transfer Keluar, dan Pengesahan Hibah menggunakan angka dari LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil.
 - 6) Ekuitas Akhir pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Ekuitas Akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

b. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

LKPD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasi dan Catatan atas LKPD Konsolidasian. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, proses konsolidasi dilakukan terhadap 18 LKPD audited.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana tunai yang masuk ke sektor pemerintahan baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana tunai yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Sumber data dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Proses konsolidasi dilakukan sebagai berikut : Berdasarkan data yang dihimpun, LKPD telah disajikan dalam format sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021. Proses konsolidasian disajikan dengan menjumlahkan LKPD dari 18 Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum dilakukan konsolidasi dengan LKPP, diidentifikasi akun timbal-balik antar Pemerintah Daerah pada LKPD Konsolidasian, misalnya akun Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik tersebut

Proses konsolidasi tingkat nasional dilakukan dengan menjumlahkan transaksi-transaksi yang dianggap sama dan melakukan eliminasi untuk transaksi yang dianggap bersifat resiprokal antar Pemerintah Daerah. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan angka yang dianggap lebih valid dalam pencatatannya, sebagai contoh untuk transaksi utang piutang antar Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan angka Pemerintah Daerah pemberi utang. Setelah tersusun LKPD Konsolidasian yang telah dapat teridentifikasi transaksi resiprokal antar Pemerintah Daerah, langkah berikutnya adalah menyusun LKPD Konsolidasian dengan menggunakan angka Pemerintah Pusat sebagai penyesuaian angka konsolidasian pos-pos transaksi yang memiliki sifat resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, angka penerimaan dana perimbangan pada LKPD Konsolidasian disesuaikan dengan menggunakan angka penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

c. *Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*

Penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan negara. Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui Laporan Keuangan Konsolidasian ini dapat dilihat peran pemerintah pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan. Guna mencapai tujuan tersebut, pendekatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas per wilayah yang merupakan komponen utama yang mencerminkan kondisi fiskal daerah dari sektor pemerintahan.

Kebutuhan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (cross country studies) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir 1.5 (Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang juga ditegaskan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah juga dilakukan dalam rangka menjawab laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010, yang mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah dan ketersediaan informasi bagi publik. Menurut hasil reviu tersebut, secara umum, pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun demikian, pemerintah belum

sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (integrasi LKPP dengan LKPD) sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Kondisi independen tersebut berlaku dalam hubungan antara LKPP dan LKPD, walaupun dalam hubungan keuangan melalui mekanisme desentralisasi fiskal, peran Pemerintah Pusat masih sangat dominan atas pendapatan daerah dalam bentuk transfer. Kondisi independen dalam pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menyatakan “Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah”.

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2024 mencakup:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Angka yang dikonsolidasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini adalah angka realisasi anggaran baik untuk LRA Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi ini, realisasi per jenis belanja Pemerintah Pusat disajikan berdasarkan data BUN (SAU/SAKUN) sehingga tidak disajikan angka suspen belanja.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

1) Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan Pendapatan dan belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun pendapatan Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun pendapatan pemerintah daerah, dan akun belanja Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun belanja pemerintah daerah. Walaupun masih terdapat perbedaan dalam klasifikasi antara pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, namun perbedaan tersebut dapat diatasi melalui konversi dan mapping antara akun di Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Tidak dilakukan konsolidasi atas akun pembiayaan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah karena tidak ada transaksi pembiayaan Pemerintah Pusat di daerah.

2) Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi
Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

b. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Konsolidasi Neraca Pemerintah dilakukan dengan menggabungkan neraca pemerintah pusat dengan neraca pada 18 pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Neraca Konsolidasian adalah sebagai berikut:

1) Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan

Secara umum, aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun aset Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun aset pemerintah daerah, dan akun kewajiban Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban pemerintah daerah kecuali untuk akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang harus dieliminasi.

2) Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca Konsolidasian, yang berupa akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yaitu akun utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

c. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Operasional konsolidasian disusun antara Laporan Operasional pemerintah pusat dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Operasional dilakukan dengan:

1) Melakukan identifikasi transaksi dan akun sejenis untuk dijumlahkan Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan akun sejenis dapat dijumlahkan. Walaupun masih terdapat perbedaan BAS Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perbedaan tersebut diatasi melalui konversi dan mapping.

2) Melakukan identifikasi Akun resiprokal untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Secara umum pos-pos yang disajikan pada LPE Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sejenis sehingga proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan akun pada laporan tersebut yaitu Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi yang menambah/mengurangi, Transaksi antar entitas, Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi, Koreksi karena double pencatatan, reklasifikasi Kewajiban ke ekuitas dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Analisis dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan dengan pendekatan:

- Analisis per jenis belanja per kabupaten dilengkapi dengan indikator ekonomi makro per wilayah.

- Analisis belanja per fungsi yang dilakukan dengan:
 - Merinci belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per fungsi. Data belanja per fungsi Pemerintah Pusat diambil dari sistem akuntansi pemerintah pusat.
 - Realisasi belanja per fungsi untuk pemerintah daerah dapat diambil dari LKPD.
 - Analisis dilakukan terhadap komposisi belanja per fungsi.
- Analisis per jenis pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas serta akun Laporan Arus Kas per tahun dan antar tahun.

Informasi Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Konsolidasian Tahun 2024

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	A. Pendapatan Asli Daerah	Dijumlahkan
I. Pendapatan Perpajakan		
1. Pajak Dalam Negeri	1. Pendapatan Pajak Daerah	
2. Pajak Perdagangan Internasional		
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak		
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Dieliminasi dan dijumlahkan
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3. Pendapatan Retribusi Daerah	
	4. Lain-lain PAD yang Sah	
III. Pendapatan Hibah	B. Lain-lain Pendapatan yang Sah	
	1. Pendapatan Hibah	Dieliminasi
	C. Pendapatan Transfer	
	1. Dana Perimbangan	
	a. Dana Bagi Hasil	
	b. Dana Alokasi Umum	
	c. Dana Alokasi Khusus	
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	
	a. Dana Otonomi Khusus	
	b. Dana Insentif Daerah	
	c. Dana Keistimewaan DIY	
	3. Dana Desa	
B. Belanja Negara		
I. Belanja Pemerintah Pusat	Belanja Pemerintah Daerah	

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Pegawai	Dijumlahkan
2. Belanja Barang	2. Belanja Barang	
3. Belanja Modal	3. Belanja Modal	
4. Pembayaran Bunga Utang	4. Pembayaran Bunga Utang	Dijumlahkan dan Dieliminasi
5. Subsidi	5. Subsidi	Dijumlahkan
6. Bantuan Sosial	6. Bantuan Sosial	
7. Belanja Lain-lain	7. Belanja Lain-lain	
8. Hibah	8. Hibah	Dijumlahkan dan Dieliminasi
II. Transfer ke Daerah		Dieliminasi
1. Dana Perimbangan		
a. Dana Bagi Hasil		
b. Dana Alokasi Umum		
c. Dana Alokasi Khusus		
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		
a. Dana Otonomi Khusus		
b. Dana Insentif Daerah		
c. Dana Keistimewaan DIY		
3. Dana Desa		
Pembiayaan Dalam Negeri		Dijumlahkan
1. Rekening Pemerintah	1. SILPA TA Sebelumnya	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Dieliminasi dan Dijumlahkan
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	3. Hasil Penjualan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	Dijumlahkan
4. Surat Berharga Negara (Neto)		
5. Pinjaman Dalam Negeri	4. Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Dieliminasi dan dijumlahkan
6. Penyertaan Modal Negara dan Daerah/Dana Investasi Pemerintah	5. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Dijumlahkan
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	6. Dana Cadangan	
	7. Pembayaran pokok Utang	Dieliminasi dan dijumlahkan
	8. Pemberian Pinjaman	Dijumlahkan
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)		
a. Penarikan Pinjaman Program		
b. Penarikan Pinjaman Proyek		
2. Penerusan Pinjaman		Dieliminasi dan dijumlahkan
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		

C.1.3 Kebijakan Akuntansi dan Eliminasi Akun Timbal Balik

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tingkat Wilayah Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I). Penyusunan dan penyajian LKPD Konsolidasian Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I) melalui Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

- Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

- Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN/D yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN/D. Khusus pengeluaran melalui

bendahara pengeluaran pada pemerintah pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada tampilan muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut fungsi.

- **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN/D atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

- **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

- **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban

Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

- Bagan Akun Standar

Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Tahun 2022 adalah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 dan peraturan perubahannya. Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2022 adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya.

Kebijakan eliminasi akun timbal balik yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah:

- a. Eliminasi akun timbal balik

Akun timbal balik adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Eliminasi akun timbal balik dilakukan dengan jumlah yang sama pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian.

- b. Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya

Akun timbal balik dengan jumlah yang tidak sama dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia, eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya dilakukan dengan mengeliminasi akun timbal balik berdasarkan jumlah masing-masing. Contoh eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya adalah akun Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Daerah dengan Belanja Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

- c. Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya

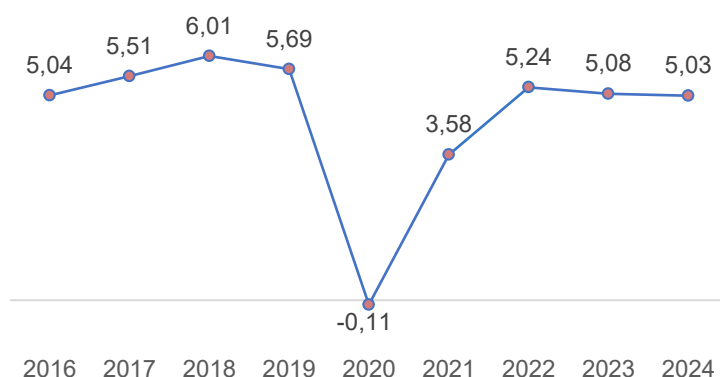
Pada konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaaan angka akun timbal balik, tidak ada laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan, dan tidak ditemukan akun timbal balik dari akun yang seharusnya dieliminasi. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan

verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia dan mempertimbangkan manfaat penyajian akun tersebut pada laporan keuangan konsolidasi, maka eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya dilakukan dengan mengeliminasi akun tersebut sebesar jumlahnya. Contoh akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya yaitu Bagian Lancar Utang ke Pemda Lainnya dan Utang Dalam Negeri-Pemda Lainnya pada Neraca Konsolidasian pemerintah daerah.

C.1.4 Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro Tingkat Wilayah Tahun 2024

1. *Pertumbuhan Ekonomi*

Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2024. Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% (ctc), lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,08% (ctc). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan tersebut sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera bersama Sumatera Utara.



Grafik 8 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan (CtC,%)

Dari sisi pengeluaran, semua komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan andil positif terhadap pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga sebagai sumber pertumbuhan tertinggi memberikan andil sebesar 2,76% dari total pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua dengan andil sebesar 1,35%. Ekspor luar negeri memberikan andil sebesar 0,95%, Konsumsi Pemerintah 0,28%, dan Konsumsi LNPRT 0,12%.

Dari sisi lapangan usaha, semua sektor memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Tiga sektor yang

menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 0,85%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 0,80%, dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,76%

2. *PDRB*

Dari sisi pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Konsumsi Pemerintah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang sama-sama tumbuh positif, baik untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal maupun belanja bantuan sosial. Belanja-belanja tersebut digunakan untuk operasional pemerintah, penyelenggaraan Pemilu, dukungan proyek strategis nasional, dan bantuan sosial. Konsumsi rumah tangga meningkat dibandingkan tahun 2023 dipengaruhi oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, meningkatnya mobilitas penduduk yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang kereta api dan angkutan udara, dan tumbuhnya sektor pariwisata yang terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan ke Sumatera Selatan.

Kegiatan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh positif dan berada dalam tren yang meningkat. Pertumbuhan PMTB tersebut didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah, khususnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan Tol Betung-Tempino, Bendungan Tiga Dihaji, dan Irigasi Lematang. Peningkatan kegiatan investasi di Provinsi Sumatera Selatan juga terlihat dari aktivitas impor barang modal yang tumbuh tinggi di 2024.

Pada tahun 2024, struktur PDRB Sumsel menurut Lapangan Usaha ditopang oleh 5 (lima) sektor utama, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Kelima sektor tersebut menunjukkan kinerja yang positif dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan 12 sektor lainnya juga mencatatkan pertumbuhan yang positif.

3. *Inflasi*

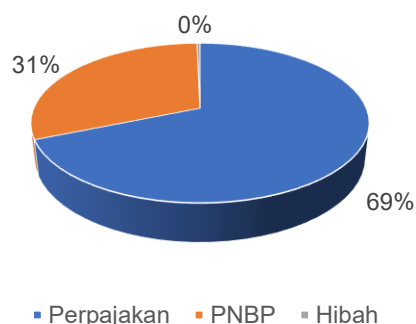
Laju inflasi Sumsel pada terkendali namun berada di bawah target. Inflasi Sumsel tahun 2024 berada di angka 1,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,17% (yoy) dan lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,57% (yoy). Beberapa faktor yang mempengaruhi laju inflasi Sumsel di tahun 2024 adalah penyesuaian harga BBM, kenaikan harga emas, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan tarif

angkutan udara, cuaca ekstrem, dan upaya konsisten pengendalian inflasi oleh pemerintah.

C.2. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

C.2.1. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mencapai Rp38.643.199.292.614, yang merupakan konsolidasian pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp22.121.938.293.422 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp49.495.422.269.094 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp32.974.161.269.902. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Perpajakan, konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak, dan konsolidasi Pendapatan Hibah. Proporsi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 9 Proporsi Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.867.496.313.055 atau 29,78 persen jika dibanding dengan tahun 2023. Peningkatan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian dikontibusi dari Peningkatan Pendapatan Perpajakan sebesar 13,14 persen, Peningkatan Pendapatan PNBPN sebesar 95,03 persen. Di sisi lain, Pendapatan Hibah mengalami penurunan sebesar **-Rp32.655.450.343** atau **-19,87** persen.

C.2.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp26.583.106.411.760 terdiri atas Pajak Dalam Negeri konsolidasian sebesar Rp26.240.240.634.895 dan Pajak Perdagangan Internasional konsolidasian sebesar Rp342.865.776.865. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun Anggaran 2024 meningkat Rp3.087.976.062.324 atau 13,14 persen dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun Anggaran 2023.

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Rp26.240.240.634.895	Rp23.198.134.873.104	Rp3.042.105.761.791	13,11
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	Rp342.865.776.865	Rp296.995.476.332	Rp45.870.300.533	15,44
Total	Rp26.583.106.411.760	Rp23.495.130.349.436	Rp3.087.976.062.324	13,14

Tabel 1 Rincian Pendapatan Perpajakan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2024 dikontribusi oleh kenaikan Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri dan Perpajakan Perdagangan Internasional sebesar masing masing 13,11 persen dan 15,44 persen. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp26.240.240.634.895 tersebut terdiri atas Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp18.034.718.713.786 dan Perpajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp8.205.521.921.109.

C.2.1.2. Pendapatan PNPB

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp11.928.399.506.975, meningkat Rp5.812.175.701.074 atau naik 7,00 persen dibandingkan Tahun 2023. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 terdiri atas Pendapatan Bagian Pemerintah atas laba BUMN/D sebesar Rp431.349.919.200, Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2.755.682.713.560, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp4.634.422.846.348 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp57.070.093.230, dan Pendapatan BLU sebesar Rp3.527.029.767.161. Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 disajikan apda tabel berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	Rp431.349.919.200	Rp478.316.706.426	-Rp46.966.787.226	-9,82
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp2.755.682.713.560	Rp2.387.555.713.010	Rp368.127.000.550	15,42
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	Rp4.634.422.846.348		Rp4.634.422.846.348	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	Rp57.070.093.230	Rp123.071.698.000	-Rp66.001.604.770	-53,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	Rp464.535.582.727		Rp464.535.582.727	100,00
Bantuan Keuangan - LRA	Rp58.308.584.749	Rp181.922.729.300	-Rp123.614.144.551	-67,95
Pendapatan Badan Layanan Umum	Rp3.527.029.767.161	Rp2.945.356.959.165	Rp581.672.807.996	19,75
Total	Rp11.928.399.506.975	Rp6.116.223.805.901	Rp5.812.175.701.074	7,00

Tabel 2 Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Konsolidasian merupakan Bagian Pemerintah atas Laba BUMD yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurun sebesar - **Rp46.966.787.226** atau turun **-9,82** persen jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp4.634.422.846.348 merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada pemerintah daerah merupakan akun resiprokal yang dalam tingkat konsolidasian dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat. Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp4.634.422.846.348 merupakan nilai yang masih tercatat setelah dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp57.070.093.230 merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada pemerintah daerah merupakan akun resiprokal yang dalam tingkat konsolidasian dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat. Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp57.070.093.230 merupakan nilai yang masih tercatat setelah dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan BLU Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp3.527.029.767.161 merupakan Pendapatan Jasa Layanan Umum Pemerintah yang terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.096.565.822.362 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.430.463.944.799. Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp581.672.807.996 atau 19,75 persen dibanding dengan tahun 2023.

Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.755.682.713.560 mengalami kenaikan sebesar Rp368.127.000.550 atau 15,42 persen dibandingkan dengan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun Anggaran 2023.

C.2.1.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp131.693.373.879 mengalami penurunan sebesar - **Rp32.655.450.343** atau **-19,87** persen dibandingkan Tahun 2023 yang

Rp164.348.824.222. Nilai Pendapatan Hibah Konsolidasian tersebut merupakan Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah.

C.2.2. Belanja dan Transfer Konsolidasian

C.2.2.1. Belanja Pemerintah Konsolidasian

Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp69.531.654.975.710, meningkat Rp9.044.410.421.739 atau 14,95 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp60.487.244.553.971. Belanja Pemerintah Konsolidasian terdiri atas Belanja Pegawai Konsolidasian, Belanja Barang dan Jasa Konsolidasian, Belanja Modal Konsolidasian, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian, Belanja Subsidi Konsolidasian, Belanja Hibah Konsolidasian, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian, dan Belanja Lain-lain Konsolidasian. Rincian belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Belanja pegawai	Rp22.422.698.099.757	Rp17.849.847.836.288	Rp4.572.850.263.469	25,62
Belanja barang dan jasa	Rp22.329.202.344.018	Rp18.507.412.366.916	Rp3.821.789.977.102	20,65
Belanja Modal	Rp18.065.226.803.409	Rp14.983.729.010.262	Rp3.081.497.793.147	20,57
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	Rp34.225.157.897	Rp54.788.194.668	-Rp20.563.036.771	-37,53
Belanja Subsidi	Rp31.729.691.575	Rp15.882.811.614	Rp15.846.879.961	99,77
Belanja Hibah	Rp2.320.268.772.284	Rp1.700.199.639.686	Rp620.069.132.598	36,47
Belanja Bantuan Sosial	Rp94.339.508.000	Rp62.104.337.000	Rp32.235.171.000	51,9
Belanja Lain-lain	Rp12.542.184.560	Rp6.565.622.538	Rp5.976.562.022	91,03
Belanja Transfer	Rp4.221.422.414.210	Rp7.306.714.735.000	-Rp3.085.292.320.790	-42,23
Total	Rp69.531.654.975.710	Rp60.487.244.553.972	Rp9.044.410.421.738	14,95

Tabel 3 Rincian Belanja Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024

Belanja Pegawai memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan belanja di tahun 2024 yakni meningkat sebesar Rp4.572.850.263.469 atau 25,62 persen diikuti Peningkatan Barang/Jasa yang memberikan kontribusi peningkatan sebesar Rp3.821.789.977.102 atau 20,65 persen dan Peningkatan belanja modal sebesar Rp3.081.497.793.147 atau 20,57 persen. Di sisi lain, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian tahun 2024 turun senilai **-Rp20.563.036.771** atau **-37,53** persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp54.788.194.668.

APBN sebagai piranti kebijakan Pemerintah yakni memiliki fungsi stabilisasi antara lain digunakan untuk penyediaan berbagai jenis subsidi baik berupa subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (price subsidies), maupun subsidi ke objek sasaran (targeted subsidies).

Belanja Subsidi Konsolidasian tahun 2024 mencapai Rp31.729.691.575 mengalami kenaikan sebesar Rp15.846.879.961 atau 99,77 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp15.882.811.614. Belanja Hibah Konsolidasian pada tahun 2024 sebesar Rp2.320.268.772.284 meningkat sebesar Rp620.069.132.598 atau 36,47 persen jika dibandingkan dengan Belanja Hibah Konsolidasian pada tahun 2023 sebesar Rp1.700.199.639.686. Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian di tahun 2024 sebesar Rp94.339.508.000 meningkat sebesar Rp32.235.171.000 atau 51,90 persen jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian pada tahun 2023 sebesar Rp62.382.800.683. Belanja Lain-Lain Konsolidasian pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp12.542.184.560, meningkat sebesar Rp5.976.562.022 atau 91,03 persen dibanding dengan 2023.

C.2.2.2. *Transfer Konsolidasian*

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip desentralisasi fiskal yang dianut oleh Pemerintah adalah mengurangi vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi gap pelayanan publik antar daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional, penegakan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan alokasi transfer ke daerah, dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi secara makro.

Transfer Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp4.221.422.414.210, turun sebesar **-Rp3.085.292.320.790** atau **-42,23** persen dibanding tahun 2023. Rincian transfer konsolidasian per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa		Rp3.110.122.599.705	-Rp3.110.122.599.705	-100,00
Transfer antar Pemerintah Daerah	Rp4.221.422.414.210	Rp4.196.592.135.295	Rp24.830.278.915	0,59
Total	Rp4.221.422.414.210	Rp7.306.714.735.000	-Rp3.085.292.320.790	-42,23

Tabel 4 Rincian Transfer Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024

Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar Rp0, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar **-Rp3.110.122.599.705** atau **-100,00** persen.

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut terdiri dari Dana Perimbangan yang telah habis tereliminasi oleh pendapatan transfer pada Pemerintah Daerah. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian, Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dieliminasi dengan Pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah. Metode eliminasian yang digunakan mengacu kepada angka Belanja Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan adanya perbedaan dengan angka Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Terhadap selisih yang muncul, maka dieliminasi kepada akun dalam skala resiprokal.

C.2.3. Surplus/Defisit Anggaran

Pada tahun 2024, Pemerintah Konsolidasian mengalami defisit sebesar **-Rp30.888.455.683.096** yang merupakan implikasi dari lebih tingginya Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian dibandingkan dengan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Defisit Konsolidasian pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **-Rp176.914.108.684** atau 0,58 persen jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada tahun 2023 yang sebesar **-Rp30.711.541.574.412**.

C.2.4. Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan pada tahun berkenaan. Keseluruhan nilai pembiayaan konsolidasian tingkat wilayah berasal dari nilai penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan konsolidasi provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pembiayaan Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp2.485.906.031.374, menurun **-Rp278.790.576.894** atau turun **-10,08** dari Pembiayaan Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp2.764.696.608.268. Pembiayaan Konsolidasian tahun 2024 tersebut merupakan Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah Daerah. Rincian Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Penerimaan Pembiayaan	Rp2.858.365.629.905	Rp3.639.370.289.714	-Rp781.004.659.809	-21,46
Pengeluaran Pembiayaan	Rp372.459.598.531	Rp874.673.681.446	-Rp502.214.082.915	-57,42
Total	Rp2.485.906.031.374	Rp2.764.696.608.268	-Rp278.790.576.894	-10,08

Tabel 5 Rincian Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024

Penerimaan Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp2.858.365.629.905 mengalami penurunan sebesar **-Rp781.004.659.809** atau turun **-21,46** persen dibandingkan penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp3.639.370.289.714. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	SELISIH	%
Penggunaan SiLPA	Rp2.758.262.429.905	Rp3.605.442.539.714	-Rp847.180.109.809	-23,50
Pencairan Dana Cadangan	Rp100.000.000.000	Rp0	Rp100.000.000.000	100,00
Penerimaan Kembali Piutang	Rp103.200.000	Rp0	Rp103.200.000	100,00
Pinjaman Dalam Negeri	Rp0	Rp33.927.750.000	-Rp33.927.750.000	-100,00
Total	Rp2.858.365.629.905	Rp3.639.370.289.714	-Rp781.004.659.809	-21,46

Tabel 6 Rincian Penerimaan Pembiayaan Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024

Penurunan Penerimaan Pembiayaan dikontribusi oleh penurunan Pinjaman Dalam Negeri dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar **-Rp33.927.750.000**, dan penurunan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar **-Rp847.180.109.809** atau turun **-23,50** persen.

Pengeluaran Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2024 sebesar Rp372.459.598.531, menurun **-Rp502.214.082.915** atau **-57,42** persen dibandingkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp874.673.681.446. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp328.661.286.738 dan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp43.798.311.793.

C.2.5. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang setelah pembiayaan atau selisih seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran. Secara umum, SiLPA menimbulkan saldo lebih bagi Pemerintah yang dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya sedangkan SiKPA yakni selisih kurang menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai kekurangan anggaran. Pada tahun 2024, pembiayaan konsolidasian neto lebih rendah dibandingkan dengan defisit konsolidasian, sehingga menghasilkan SiKPA konsolidasian sebesar **-Rp28.402.549.651.721**.

Pada tahun 2024 SiKPA realisasi APBN sebesar **-Rp30.973.831.237.734** sedangkan terdapat SiLPA pada realisasi APBD yaitu sebesar

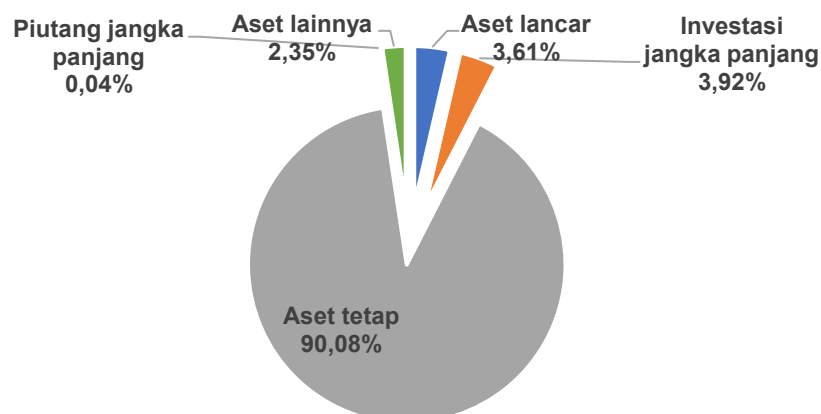
Rp2.571.281.586.013. SiKPA konsolidasian pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar -Rp455.704.685.576 atau naik sebesar 1,63 persen dibandingkan dengan SiKPA konsolidasian tahun 2023 yang sebesar -Rp27.946.844.966.145.

C.3. CATATAN ATAS NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

Neraca pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2024 meliputi Aset Konsolidasian sebesar Rp330.265.508.966.846, Kewajiban Konsolidasian sebesar Rp7.536.432.054.215, dan Ekuitas Konsolidasian sebesar Rp322.729.076.912.631. Pada tahun 2024, Aset Konsolidasian mengalami kenaikan sebesar Rp2.427.269.633.265 atau 0,74 persen dibandingkan tahun 2023. Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.020.874.155.717 atau 36,64 persen dibandingkan tahun 2023. Sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp406.395.477.548 atau 0,13 persen terhadap tahun sebelumnya.

C.3.1. Aset Konsolidasian

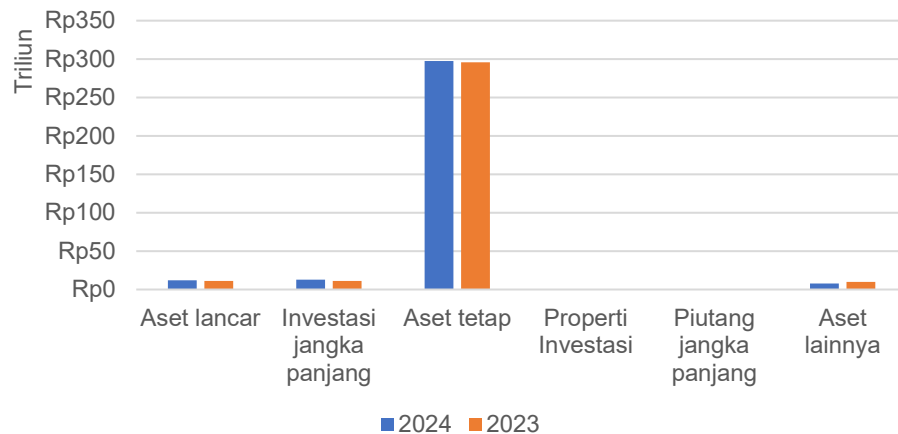
Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp330.265.508.966.846, terdiri atas Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp11.938.643.051.289, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp12.933.238.867.565, Aset Tetap Konsolidasian sebesar Rp297.492.780.730.623. Properti Investasi Konsolidasian sebesar Rp17.795.509.085, Piutang Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp119.685.597.855 dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp7.763.365.210.429. Proporsi Aset Konsolidasian dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 10 Proporsi Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024

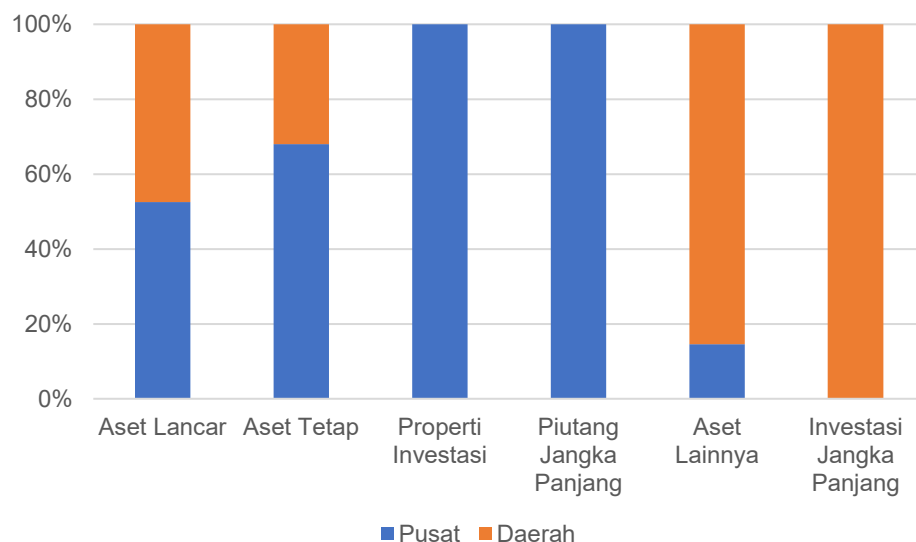
Komposisi Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap Konsolidasian, yaitu 90,08 persen dari Jumlah Aset Konsolidasian. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat sebesar Rp210.640.145.945.878 dan Aset Pemerintah Daerah sebesar Rp121.377.761.232.019. Sedangkan, perbandingan perubahan struktur Aset

Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 11 Aset Konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 2023

Dilihat dari sisi neraca Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagian besar komponen aset konsolidasian dimiliki oleh Pemerintah Pusat daripada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, Aset Pemerintah Pusat yaitu Rp210.640.145.945.878 atau 63,44 persen dari Jumlah Aset Pemerintah Konsolidasian, sedangkan Aset Pemerintah Daerah yaitu Rp121.377.761.232.019 atau 36,56 persen dari Jumlah Aset Pemerintah Konsolidasian.

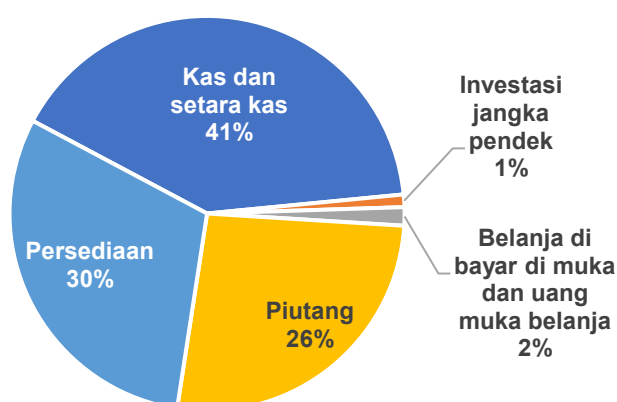


Grafik 12 Proporsi Aset Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024

C.3.1.1. Aset Lancar Konsolidasian

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari antara

lain Kas di Kas Negara dan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, Kas pada BLU, Uang Muka dari Rekening BUN, Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Pemberian Pinjaman, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Piutang Lancar Kredit Pemerintah & Piutang Jangka Pendek Lainnya, Penyisihan PiutangTak Tertagih, Investasi Jangka Pendek, dan Persediaan.



Grafik 13 Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024

Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp895.319.329.623 atau 8,11 persen dibandingkan Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Kas dan setara kas	Rp4.856.609.524.210	Rp4.002.484.291.800	Rp854.125.232.410	21,34
Investasi jangka pendek	Rp122.377.561.000	Rp1.051.506.605.000	-Rp929.129.044.000	-88,36
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	Rp179.789.443.748	Rp63.136.441.773	Rp116.653.001.975	184,76
Piutang	Rp3.156.953.874.033	Rp2.660.890.268.011	Rp496.063.606.022	18,64
Persediaan	Rp3.622.912.648.298	Rp3.265.306.115.081	Rp357.606.533.217	10,95
Total	Rp11.938.643.051.289	Rp11.043.323.721.665	Rp895.319.329.624	8,11

Tabel 7 Rincian Aset Lancar Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kas dan Setara Kas Pemerintah Konsolidasian sebesar Rp4.856.609.524.210 mengalami kenaikan sebesar Rp854.125.232.410 atau 21,34 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4.002.484.291.800. Kas dan Setara Kas Pemerintah Konsolidasian merupakan gabungan Kas dan Setara Kas Pemerintah

Pusat tingkat wilayah sebesar Rp2.283.154.353.905 dan Pemerintah daerah sebesar Rp2.573.455.170.305.

Investasi jangka Pendek Konsolidasian Per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp122.377.561.000 yaitu merupakan Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum pada Pemerintah Pusat sebesar Rp46.000.000.000 dan Investasi dalam Surat Berharga Negara dan Sertifikat Bank Indonesia Pemerintah Daerah sebesar Rp76.377.561.000, terdapat penurunan Investasi Jangka Pendek Konsolidasian sebesar **-Rp929.129.044.000** atau **-88,36** persen dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.051.506.605.000.

Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp179.789.443.748 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp111.502.541.257 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp41.209.448.092. Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp116.653.001.975 atau 184,76 persen dari Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp63.136.441.773.

Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp3.156.953.874.033 meningkat sebesar Rp496.063.606.022 atau sebesar 18,64 persen dibandingkan dengan Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.660.890.268.011.

C.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.933.238.867.565 yang seluruhnya merupakan Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Investasi Non Permanen Rp388.603.437 dan Investasi Permanen Rp12.932.850.264.128. Investasi Jangka Panjang tahun 2024

mengalami kenaikan sebesar Rp1.765.524.882.506 atau 15,81 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp11.167.713.985.059.

C.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp297.492.780.730.623 terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp202.275.437.668.014 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp95.217.343.062.609. Nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.813.629.960.312 atau meningkat 2,31 persen dibanding periode 31 Desember 2023.

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian Aset Tetap Konsolidasian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Tanah	Rp159.437.995.586.747	Rp158.875.385.679.065	Rp562.609.907.682	0,35
Peralatan dan mesin	Rp34.634.788.105.732	Rp31.968.908.386.269	Rp2.665.879.719.463	8,34
Gedung dan bangunan	Rp44.571.822.749.016	Rp41.493.699.941.289	Rp3.078.122.807.727	7,42
Jalan, irigasi, dan jaringan	Rp163.511.660.810.572	Rp154.651.488.539.999	Rp8.860.172.270.573	5,73
Aset tetap lainnya	Rp3.246.376.588.575	Rp3.236.391.960.635	Rp9.984.627.940	0,31
Konstruksi dalam pengerjaan	Rp7.216.269.296.161	Rp6.946.191.680.422	Rp270.077.615.739	3,89
Konsesi Jasa	Rp7.487.195.754.518	Rp4.426.089.970.939	Rp3.061.105.783.579	69,16
Akumulasi penyusutan	-Rp122.613.328.160.698	-Rp106.020.467.706.869	-Rp16.592.860.453.829	15,65
Total	Rp297.492.780.730.623	Rp295.577.688.451.749	Rp1.915.092.278.874	0,65

Tabel 8 Aset Tetap Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp159.437.995.586.747 merupakan penggabungan Tanah pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp133.928.538.524.598 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp25.509.457.062.149. Jumlah ini meningkat sebesar Rp562.609.907.682 atau sebesar 0,35 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.649.466.737.248 merupakan penggabungan Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp16.035.925.767.007 dan Peralatan dan Mesin pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp18.598.862.338.725. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp2.665.879.719.463 atau 8,34 persen dibanding dengan Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2023.

Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.571.822.749.016 merupakan penggabungan Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp14.372.958.090.909 dan Gedung dan Bangunan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp30.198.864.658.107. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp3.078.122.807.727 atau 7,42 persen dibanding dengan Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2023.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.511.660.810.572 merupakan penggabungan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp71.203.852.687.362 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp92.307.808.123.210. Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2024 meningkat sebesar Rp8.860.172.270.573 atau 5,73 persen dibanding dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan konsolidasian per 31 Desember 2023.

Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.246.376.588.575 merupakan penggabungan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp553.538.523.635 dan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp2.692.838.064.940. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 naik sebesar Rp9.984.627.940 atau 0,31 persen dibanding dengan Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.216.269.296.161 merupakan penggabungan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp5.322.988.261.344 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp1.893.281.034.817. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp270.077.615.739 atau 3,89 persen dibanding dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan konsolidasian per 31 Desember 2023.

Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.487.195.754.518. Konsesi Jasa hanya terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat dengan kenaikan sebesar Rp3.061.105.783.579 atau 69,16 persen dibanding tahun 2023.

Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar **-Rp122.613.328.160.698** meningkat sebesar **-Rp16.592.860.453.829** atau 15,65 persen.

C.3.1.4. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi Konsolidasian tahun 2024 hanya terdapat pada Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp17.795.509.085 menurun **-Rp55.203.322** atau **-0,31** persen disbanding tahun 2023

C.3.1.5. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah Piutang Jangka Panjang Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp119.685.597.855 Nilai tersebut berasal dari Piutang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp7.262.364.039 dan Piutang Jangka Panjang pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp112.423.233.816. meningkat Rp71.081.949.536 atau 146,25 persen dibanding tahun 2023.

C.3.1.6. Aset Lainnya

Aset Lainnya Konsolidasian terdiri dari antara lain Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian, Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian, Aset Tak Berwujud Konsolidasian, Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, Dana yang Dibatasi Penggunaannya Konsolidasian, Aset Lain-lain Konsolidasian, dan Akumulasi Amortisasi – Aset Lainnya (ATB) Konsolidasian.

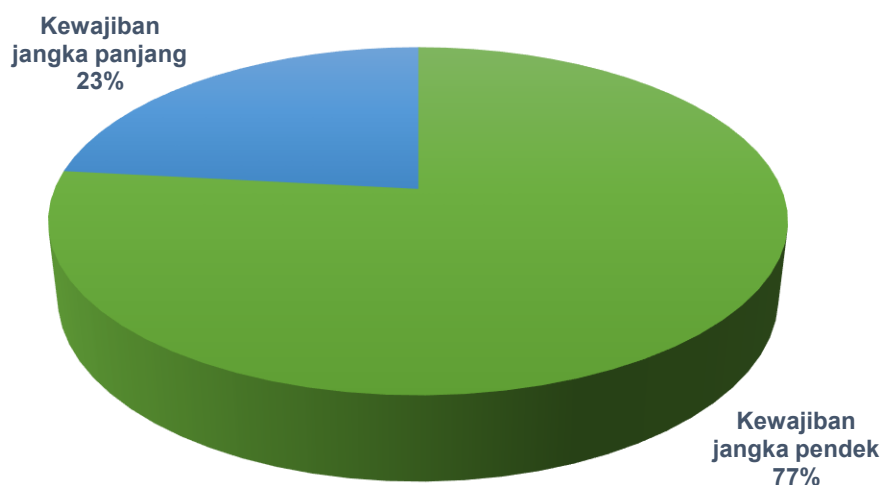
Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.763.365.210.429 dan Rp9.881.445.236.895. Nilai tersebut menunjukkan adanya penurunan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar **-Rp2.118.080.026.466** atau **-21,43** persen. Rincian Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp65.357.397.148	Rp1.574.550.737.140	-Rp1.509.193.339.992	-95,85
Aset tidak berwujud	Rp1.053.879.433.559	Rp777.433.893.318	Rp276.445.540.241	35,56
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Rp372.389.328.080	Rp456.382.892.008	-Rp83.993.563.928	-18,40
Aset lain-lain	Rp7.123.269.504.906	Rp7.978.829.054.426	-Rp855.559.549.520	-10,72
Total	Rp8.614.895.663.693	Rp10.787.196.576.892	-Rp2.172.300.913.199	-20,14

Tabel 9 Aset Lainnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2023

C.3.2. Kewajiban Konsolidasian

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.



Grafik 14 Kewajiban Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.536.432.054.215 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp5.782.168.802.866 dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.754.263.251.348. Kewajiban jangka pendek merupakan komponen terbesar dari kewajiban konsolidasian yakni mencapai 82,55 persen dari Jumlah Kewajiban Konsolidasian. Rincian Kewajiban Konsolidasian disajikan pada table berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Kewajiban jangka pendek	Rp5.782.168.802.866	Rp3.729.306.852.107	Rp2.052.861.950.759	55,05
Kewajiban jangka panjang	Rp1.754.263.251.348	Rp1.786.251.046.391	-Rp31.987.795.043	-1,79
Total	Rp7.536.432.054.214	Rp5.515.557.898.498	Rp2.020.874.155.716	36,64

Tabel 10 Kewajiban Pemerintah Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023

C.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya, Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian, Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian, dan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.782.168.802.866 dan Rp3.729.306.852.107 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Utang perhitungan pihak ketiga	Rp6.156.023.442	Rp9.199.938.898	-Rp3.043.915.456	-33,1
Utang kepada pihak ketiga	Rp2.948.547.114.083	Rp2.360.194.614.047	Rp588.352.500.036	24,9
Utang bunga	Rp1.778.651.079	Rp2.096.014.473	-Rp317.363.394	-15,1
Utang Transfer	Rp2.283.708.589.811	Rp1.242.737.152	Rp2.282.465.852.659	183664,4
Bagian lancar utang jangka panjang	Rp90.985.397.604	Rp216.241.699.487	-Rp125.256.301.883	-57,9
Utang Yang Belum Ditagihkan	Rp1.396.859.486		Rp1.396.859.486	100,0
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	Rp198.451.429.597	Rp315.749.800.727	-Rp117.298.371.130	-37,1
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp61.970.091.651	Rp42.576.451.991	Rp19.393.639.660	45,6
Uang Muka	Rp656.462.268	Rp525.975.970	Rp130.486.298	24,8
Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp188.518.183.845	Rp781.479.619.362	-Rp592.961.435.517	-75,9
Total	Rp5.782.168.802.866	Rp3.729.306.852.107	Rp2.052.861.950.759	55,0

Tabel 11 Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Konsolidasian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.156.023.442 seluruhnya merupakan Utang PFK pada Pemerintah Daerah. Utang PFK Konsolidasian per 31 Desember 2024 turun sebesar **-Rp3.043.915.456** atau **-33,1** persen dibanding tahun sebelumnya.

Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.948.547.114.083. Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2024 naik Rp588.352.500.036 atau 24,9 persen dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya.

Utang Bunga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.778.651.079 dan Rp2.096.014.473s. Nilai Utang Bunga Per 31 Desember 2024 tersebut terdapat pada Pemerintah Daerah dan mengalami penurunan yaitu sebesar **-Rp317.363.394** atau **-15,1** persen dibanding dengan Utang Bunga Tahun 2023.

Utang Transfer per 31 Desember 2024 adalah sebesar R Rp2.283.708.589.811 yang seluruhnya terdapat pada Pemerintah Pusat. Utang Transfer per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan

sebesar Rp2.282.465.852.659 atau 183664,4 persen dibandingkan tahun 2023

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.985.397.604, seluruhnya terdapat pada Pemerintah Daerah. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2024 menurun sebesar - **Rp125.256.301.883** atau **-57,9** persen dibanding dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang konsolidasian per 31 Desember 2023.

Utang Yang Belum Ditagihkan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.396.859.486 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Utang Yang Belum Ditagihkan baru muncul di tahun 2024.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp198.451.429.597 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan menurun sebesar **-Rp117.298.371.130** atau **-37,1** persen dibandingkan Tahun 2023

Pendapatan diterima di Muka Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.970.091.651 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Pendapatan diterima di Muka Pemerintah Konsolidasian meningkat sebesar Rp19.393.639.660 atau 45,6 persen dibandingkan Tahun 2023

Uang Muka Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp656.462.268 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Nilai Uang Muka tersebut meningkat sebesar Rp130.486.298 atau 24,8 persen jika dibanding dengan tahun 2023

Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.518.183.845 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp124.908.686 dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdapat pada Pemerintah Daerah sebesar Rp158.957.112.384. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut mengalami penurunan sebesar **-Rp592.961.435.517** atau **-75,88** persen jika dibanding dengan tahun 2023.

C.3.2.2. *Kewajiban Jangka Panjang*

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember

2024 sebesar Rp1.754.263.251.348 yang merupakan Konsolidasian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Pusat sebesar Rp1.466.228.902.396 dan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah sebesar Rp288.034.348.952.

Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian tersebut terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp288.036.104.178 dan Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp1.466.227.147.170. Terdapat penurunan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar - **Rp31.987.795.043** atau **-1,79** persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2023.

C.3.3. Ekuitas Konsolidasian

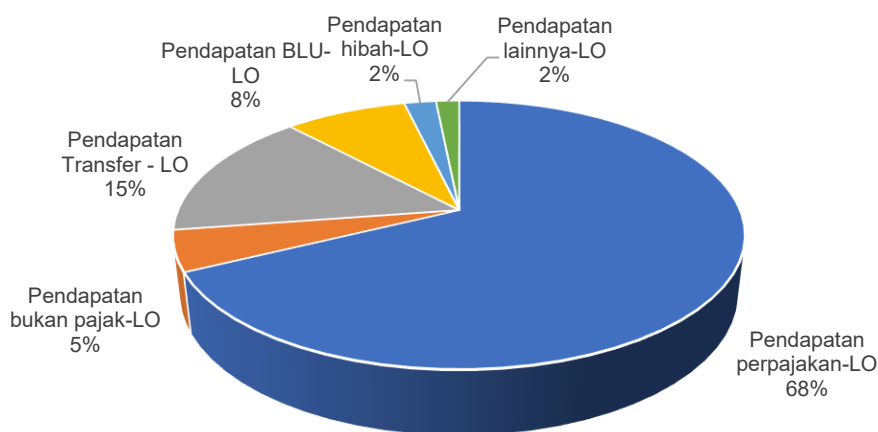
Sejak berlakunya basis akuntansi akrual sejak tahun anggaran 2015, maka Ekuitas tidak lagi dibagi ke dalam tiga jenis (Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan) seperti tahun-tahun sebelumnya. Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp322.729.076.912.631, terdiri atas Ekuitas Pemerintah Pusat Rp204.344.219.172.679 dan Ekuitas Pemerintah Daerah Konsolidasian R Rp118.384.857.739.952. Ekuitas Per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp406.395.477.548 atau 0,13 persen dibanding tahun 2023.

Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah. Selain akun resiprokal, eliminasi dengan jumlah yang sama juga dilakukan terhadap akun pasangan dari akun yang dieliminasi karena sistem akuntansi yang diterapkan menganut sistem akun berpasangan. Untuk Neraca Pemerintah Konsolidasi Tingkat Wilayah tidak dilakukan eliminasi akun resiprokal karena hampir tidak ada transaksi resiprokal antara instansi Pemerintah Pusat di daerah (Kementerian Negara/Lembaga) dengan pemerintah daerah.

C.4. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

C.4.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.767.771.156.170 meningkat sebesar Rp9.255.800.899.301 atau 26,82 persen dibandingkan tahun 2023. Pendapatan Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Perpajakan sebesar Rp29.645.204.467.502, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp2.142.398.958.956, Pendapatan Transfer sebesar Rp6.744.592.359.373, Pendapatan BLU sebesar Rp3.609.811.046.842, Pendapatan Hibah sebesar Rp937.732.588.002 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp688.031.735.495. Proporsi Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2024 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Grafik 15 Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2024

C.4.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pada tahun 2024, Pendapatan Perpajakan Konsolidasian mencapai Rp29.645.204.467.502 yang merupakan konsolidasi dari Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp21.315.879.466.030 dan Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp8.329.325.001.472. Pendapatan Perpajakan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.983.402.186.653 atau 15,52 persen dibandingkan tahun 2023.

Peningkatan Pendapatan Perpajakan terbesar secara nilai terdapat pada Pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp3.956.432.311.024 atau 15,60 persen dibandingkan tahun 2023.

C.4.1.2. Pendapatan Bukan Pajak

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.142.398.958.956 turun **-Rp19.280.509.778** atau **-0,89** persen dibanding tahun 2023. Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian merupakan konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp3.050.814.390.604 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp654.574.535.978. Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp325.684.500.721 dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.816.714.458.235. Angka Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian merupakan angka setelah eliminasi akun sekala resiprokal sebesar minus Rp1.562.989.967.626. Rincian Pendaptan Bukan Pajak Konsolidasian dapat disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	Rp325.684.500.721	Rp621.785.177.040	-Rp296.100.676.319	-47,62
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	Rp1.816.714.458.235	Rp1.539.894.291.694	Rp276.820.166.541	17,98
Total	Rp2.142.398.958.956	Rp2.161.679.468.734	-Rp19.280.509.778	-0,89

Tabel 12 Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023

Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan mengalami penurunan sebesar **-Rp296.100.676.319** atau **-47,62** persen dibanding dengan tahun 2023. Selanjutnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp276.820.166.541 atau 17,98 persen dibanding tahun 2023.

C.4.1.3. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.744.592.359.372, merupakan Pendapatan Transfer yang terdapat pada Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.279.777.923.133 atau 173,63 persen dibandingkan tahun 2023. Rincian Pendapatan Transfer Konsolidasian disajikan pada table berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	Rp4.460.310.218.394	Rp2.298.395.711.808	Rp2.161.914.506.586	94,06
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	Rp491.269.495.829	Rp119.740.728.625	Rp371.528.767.204	310,28
Bantuan Keuangan - LO	Rp1.793.012.645.149	Rp46.677.995.806	Rp1.746.334.649.343	3741,24
Total	Rp6.744.592.359.372	Rp2.464.814.436.239	Rp4.279.777.923.133	173,63

Tabel 13 Rincian Pendapatan Transfer Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023

Pendapatan Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2024 berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp4.460.310.218.394, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp491.269.495.829, dan Bantuan Keuangan sebesar Rp1.793.012.645.149. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan pada Pemerintah Daerah merupakan akun resiprokal yang dieliminasi dengan akun resiprokal Belanja Transfer pada Pemerintah Pusat. Angka acuan yang dijadikan dasar proses eliminasi adalah angka Belanja Transfer Pemerintah Pusat.

C.4.1.4. Pendapatan BLU

Pendapatan BLU Konsolidasian per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.609.811.046.842 merupakan Pendapatan BLU pada Pemerintah Pusat yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp3.465.536.352.762, Pendapatan Hibah BLU sebesar Rp3.490.344.723 dan Pendapatan Lainnya BLU sebesar Rp140.784.349.357.

Terdapat kenaikan Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2024 sebesar Rp436.610.166.339 atau 13,76 persen jika dibanding dengan Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2023.

C.4.1.5. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Konsolidasian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp937.732.588.002. Terdapat penurunan Pendapatan Hibah Konsolidasian pada tahun 2024 yaitu sebesar minus - **Rp11.907.620.050** atau **-1,25** persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

C.4.1.6. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp688.031.735.495. Nilai Pendapatan Lainnya Konsolidasian tersebut naik sebesar Rp587.198.753.004 atau 582,35 persen dibanding tahun 2023.

C.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp68.084.137.243.564. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp11.387.270.296.711 atau 20,08 persen dibandingkan tahun 2023. Beban Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp51.922.472.830.013 dan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp45.289.204.227.462.

Kenaikan Beban Operasional Konsolidasian didominasi peningkatan Belanja Operasional Pemerintah Daerah yang mencapai 34,03 persen dibandingkan tahun 2023. Adapun Rincian porsi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Beban pegawai	Rp23.119.063.451.807	Rp18.368.398.652.612	Rp4.750.664.799.195	25,86
Beban persediaan	Rp1.017.226.276.412	Rp982.669.162.794	Rp34.557.113.618	3,52
Beban barang dan jasa	Rp21.015.070.290.757	Rp17.345.356.608.853	Rp3.669.713.681.904	21,16
Beban bunga	Rp33.784.706.229	Rp49.571.980.544	-Rp15.787.274.315	-31,85
Beban subsidi	Rp28.504.026.949	Rp17.108.088.997	Rp11.395.937.952	66,61
Beban hibah	Rp2.825.674.739.961	Rp2.369.123.292.823	Rp456.551.447.138	19,27
Beban bantuan sosial	Rp123.806.229.946	Rp90.400.526.722	Rp33.405.703.224	36,95
Beban lain-lain/beban tidak te	Rp21.337.330.741	Rp72.628.931.258	-Rp51.291.600.517	-70,62
Beban akrual lainnya	Rp13.428.190.559.333	Rp12.632.868.652.242	Rp795.321.907.091	6,30
Beban Transfer	Rp6.471.479.631.428	Rp4.768.741.050.008	Rp1.702.738.581.420	35,71
Total	Rp68.084.137.243.563	Rp56.696.866.946.853	Rp11.387.270.296.710	20,08

Tabel 14 Rincian Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2024

C.4.2.1. Belanja Operasional Pemerintah Pusat

Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp51.922.472.830.013 mengalami kenaikan sebesar Rp3.232.483.974.041 atau naik 6,64 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp48.689.988.855.972. Rincian Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada table berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Beban Pegawai	Rp6.710.381.647.381	Rp5.776.488.429.991	Rp933.893.217.390	16,17
Beban Persediaan	Rp1.017.226.276.412	Rp982.663.142.794	Rp34.563.133.618	3,52
Beban Barang dan Jasa	Rp4.315.494.806.427	Rp3.211.767.382.805	Rp1.103.727.423.622	34,37
Beban Pemeliharaan	Rp1.028.236.943.414	Rp653.386.196.810	Rp374.850.746.604	57,37
Beban Perjalanan Dinas	Rp739.174.887.609	Rp589.007.068.411	Rp150.167.819.198	25,50
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp1.165.821.803.565	Rp1.005.892.479.371	Rp159.929.324.194	15,90
Beban Bantuan Sosial	Rp31.456.763.356	Rp25.830.846.000	Rp5.625.917.356	21,78
Beban Transfer	Rp31.718.462.135.460	Rp31.310.092.375.958	Rp408.369.759.502	1,30
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp5.058.404.651.473	Rp4.888.543.581.584	Rp169.861.069.889	3,47
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp137.812.914.916	Rp246.317.352.248	-Rp108.504.437.332	-44,05
Total	Rp51.922.472.830.013	Rp48.689.988.855.972	Rp3.232.483.974.041	6,64

Tabel 15 Rincian Belanja Operasional Pemerintah Pusat Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023

Kenaikan Beban Operasional Pemerintah Pusat tertinggi dikontribusi oleh Beban Barang dan Jasa yang meningkat Rp1.103.727.423.622 atau 34,37 persen dibandingkan tahun 2023. Kenaikan juga terjadi pada Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset dan Amortisasi Aset Lainnya, serta Beban Transfer. Sementara itu, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

C.4.2.2. Belanja Operasional Pemerintah Daerah

Beban Operasional Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.169.761.537.341 mengalami kenaikan sebesar Rp10.741.179.018.672 atau naik 27,95 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp38.428.582.518.669. Rincian Beban Operasional Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 disajikan pada table berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Beban Pegawai - LO	Rp16.408.681.804.426	Rp12.591.910.222.621	Rp3.816.771.581.805	30,31
Beban Barang dan Jasa	Rp13.766.341.849.742	Rp11.885.309.501.456	Rp1.881.032.348.286	15,83
Beban Bunga	Rp33.784.706.229	Rp49.571.980.544	-Rp15.787.274.315	-31,85
Beban Subsidi	Rp28.504.026.949	Rp17.108.088.997	Rp11.395.937.952	66,61
Beban Hibah	Rp2.825.674.739.961	Rp2.369.123.292.823	Rp456.551.447.138	19,27
Beban Bantuan Sosial	Rp92.349.466.590	Rp64.569.680.722	Rp27.779.785.868	43,02
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp8.104.218.709.434	Rp7.393.857.544.063	Rp710.361.165.371	9,61
Beban Penyisihan Piutang	Rp127.754.283.510	Rp104.150.174.347	Rp23.604.109.163	22,66
Beban Lain-lain	Rp21.337.330.741	Rp72.628.931.258	-Rp51.291.600.517	-70,62
BEBAN TRANSFER	Rp3.880.557.309.879	Rp1.940.176.550.919	Rp1.940.380.758.960	100,01
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp290.196.879.539	Rp199.897.085.554	Rp90.299.793.985	45,17
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp1.665.272.064.310	Rp1.740.279.465.365	-Rp75.007.401.055	-4,31
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp1.925.088.366.031	Rp0	Rp1.925.088.366.031	100,00
Total	Rp49.169.761.537.341	Rp38.428.582.518.669	Rp10.741.179.018.672	27,95

Tabel 16 Rincian Belanja Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian Tahun 2024 dan 2023

Kenaikan Beban Operasional Pemerintah Daerah tertinggi dikontribusi oleh kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp3.816.771.581.805 atau sekitar 30,31 persen dibandingkan tahun 2023. Kenaikan komponen Beban Operasional juga terjadi pada Beban barang, Beban Subsidi, Beban Transfer, Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya dan Beban Bansos.

C.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus (defisit) dari kegiatan operasional adalah selisih lebih atau kurang antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional selama satu periode pelaporan. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 yakni sebesar defisit - **Rp24.316.366.087.394** mengalami kenaikan sebesar **-Rp2.131.469.397.410** atau 9,61 persen dari defisit Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 dengan defisit **-Rp22.184.896.689.984**. Meningkatnya nilai defisit dari Kegiatan Operasional tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Operasional sebesar Rp11.387.270.296.711 atau 20,08 persen meskipun diikuti Peningkatan Pendapatan Operasional sebesar Rp9.255.800.899.301 atau turun 26,82 persen.

C.4.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 yakni sebesar Surplus

Rp243.189.147.031 mengalami peningkatan Surplus sebesar Rp219.182.448.984 dari posisi per 31 Desember 2023 yakni Surplus Rp24.006.698.047.

Kenaikan nilai Surplus dari kegiatan non operasional tersebut didominasi oleh Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Pemerintah Daerah sebesar Rp227.531.333.528 dan Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Pemerintah Daerah sebesar Rp64.524.040.338. Di sisi lain, terdapat defisit kegiatan non operasional pada Pemerintah Pusat sebesar defisit - **Rp63.301.294.016**.

C.4.5. Surplus/Defisit Laporan Operasional

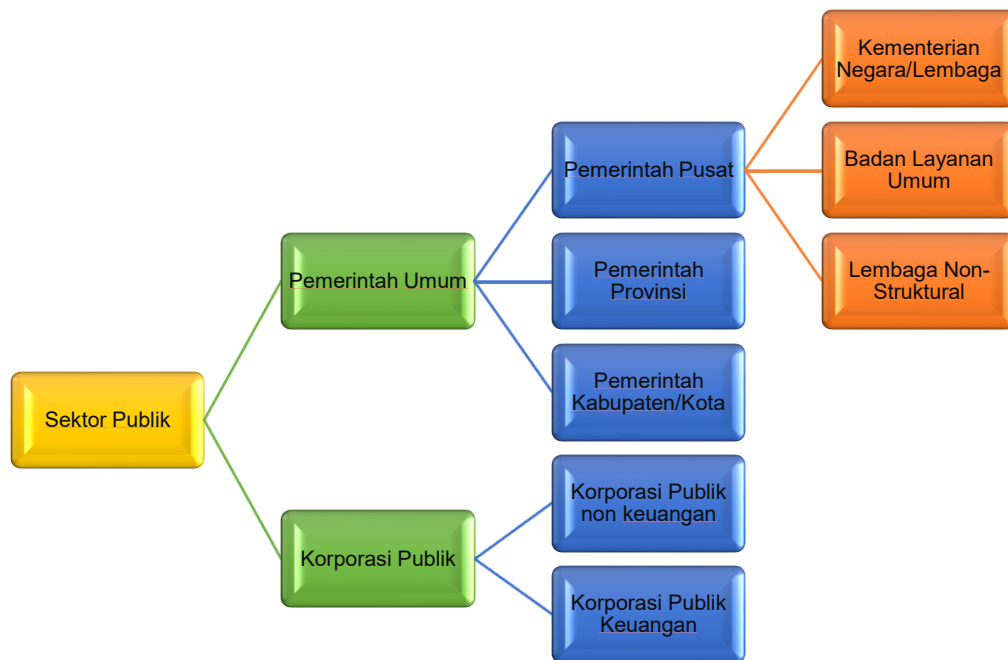
Surplus/(defisit) Laporan Operasional selisih antara Pendapatan Operasional dan Beban Operasional selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Per 31 Desember 2024, Surplus/Defisit Laporan Operasional Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar defisit **-Rp24.075.548.262.661** atau mengalami peningkatan defisit sebesar **-Rp1.911.206.315.617** atau 8,62 persen dibandingkan defisit tahun 2023 sebesar -Rp22.164.341.947.044 yang berarti Jumlah beban selama tahun 2024 lebih besar daripada Jumlah pendapatan.

**CATATAN ATAS
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH
(LSKP-TW)
SUMATERA SELATAN
AUDITED 2024**



D.1. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Data statistik keuangan pemerintah dikompilasi untuk sektor publik dan sektor pemerintahan umum.



Sektor publik mengkonsolidasi transaksi dari semua sektor, yaitu:

1. Sektor Pemerintah Umum

Sektor pemerintah umum mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sektor pemerintah umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan. Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, sektor pemerintah umum dibedakan menjadi: a) Pemerintah Pusat, b) Pemerintah Provinsi, dan c) Pemerintah Kabupaten/Kota. Subsektor Pemerintah Pusat terdiri dari kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun berada dalam kendali Pemerintah Pusat.

2. Sektor Korporasi Publik

Sektor korporasi publik mencakup sektor korporasi publik non keuangan dan sektor korporasi publik keuangan. Sektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian

besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan. Mereka dapat memunculkan kewajiban keuangan atas tanggung jawabnya sendiri.

Konsolidasi sektor publik dilakukan dengan identifikasi dan eliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Dalam mengkompilasi statistik untuk sektor publik ini, transaksi dan hubungan debitur dan kreditur antara sub sektor dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda sebagai bagian dari proses konsolidasi. Total pelaporan sektor publik juga dikenal dengan pelaporan pemerintah secara keseluruhan (*whole of government reporting*).

Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi, yang berasal dari sistem akuntansi yang menghasilkan data akuntansi (merupakan sumber terbaik karena tepat waktu) dan laporan keuangan. Data transaksi dicatat dan dilaporkan secara berjenjang melalui sistem akuntansi yang ada pada sektor pemerintah umum dan korporasi publik. Dalam rangka memenuhi ketentuan metodologi pedoman Statistik Keuangan Pemerintah, data akuntansi tersebut akan diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan re-klasifikasi kedalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik keuangan Pemerintah.

Data yang akan di-mapping ke Statistik Keuangan Pemerintah adalah data Pemerintah Pusat, data konsolidasi pemerintah daerah, data perusahaan negara, dan data Bank Indonesia. Data hasil mapping Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor pemerintah umum. Data hasil mapping perusahaan negara dan Bank Indonesia dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor korporasi publik. Data statistik keuangan konsolidasian sektor pemerintah umum akan dikonsolidasi dengan data statistik keuangan konsolidasian sektor korporasi publik menjadi data statistik keuangan konsolidasian sektor publik. Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan tiga laporan utama yaitu: Laporan Operasional, termasuk arus ekonomi lain, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

D.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Kementerian Keuangan telah melakukan mapping BAS sistem akuntansi pemerintah ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah yang disampaikan ke International Monetary Fund (IMF). Namun mapping dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah tersebut masih terbatas pada sub sektor Pemerintah Pusat dan hanya untuk Laporan Arus Kas mengingat pemerintah menerapkan sistem akuntansi berbasis Kas Menuju Akrua.

Dalam rangka penyusunan Manual dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual, Pemerintah telah melakukan exercise mapping dan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2022. Cakupan exercise penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ini adalah Sektor Pemerintah Umum, yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendekatan mappingBagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah dilakukan dengan high levelmapping terhadap laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikonsolidasikan secara akuntansi, kemudian dilakukan mapping terhadap akun konsolidasian yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hal ini dilakukan karena belum tersedianya data detail BAS pemerintah daerah.

Oleh karena itu, data yang tertuang dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 ini belum menggambarkan data yang sebenarnya dalam pengertian Statistik Keuangan Pemerintah, karena:

- a. Pendekatan high level mapping hanya memberikan gambaran secara umum mengenai laporan statistik keuangan pemerintah dan tidak memungkinkan penyajian BAS Statistik Keuangan Pemerintah secara detail.
- b. Keterbatasan data terkait akun resiprokal antar sektor.

D.3. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Laporan operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (net cost) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (full cost) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), laporan operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

- a. Saldo Operasi Neto (net operating balance), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban.
- b. Pinjaman Neto (net lending/borrowing, yang juga dikenal dengan saldo fiskal/fiscal balance) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.

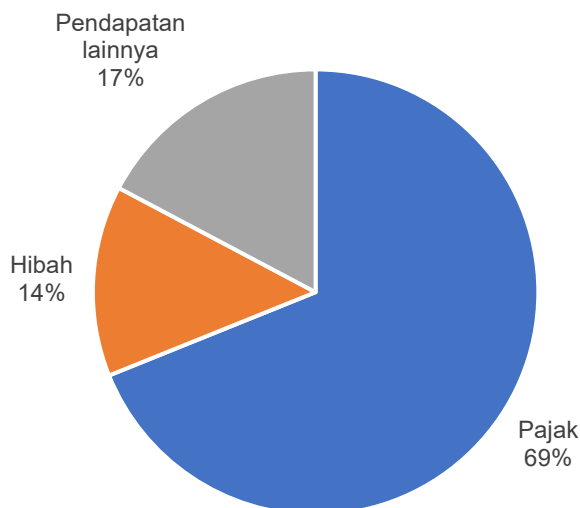
Penyusunan Laporan Operasional tahun 2024 dilakukan berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) menjadi BAS Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas.

Pendekatan high level mapping dilakukan dengan mapping data lembar muka laporan keuangan konsolidasian ke dalam laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Mapping Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya dilakukan pada level BAS yang terendah untuk memastikan keakuratan mapping tersebut. Pendekatan high level mapping ini dilakukan karena keterbatasan data BAS detail pemerintah daerah. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan keakuratan high level mapping yaitu antara lain perbandingan dengan pola mapping BAS sistem akuntansi pemerintah pusat.

Secara umum, akun Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian telah sejalan dengan akun Statistik Keuangan Pemerintah terutama untuk klasifikasi pendapatan dan belanja. Pengecualian hanya dilakukan untuk belanja modal yang dimapping menjadi net acquisition of nonfinancial assets. Pembiayaan Konsolidasian (neto) di-mapping menjadi transaksi dalam aset keuangan dan kewajiban.

D.3.1. Pendapatan Operasional

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2024 Unaudited, Pendapatan Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp38.550.059.988.363, meningkat Rp8.867.554.867.425 atau 29,87 persen dibandingkan Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2023 sebesar Rp29.682.505.120.938. Proporsi Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 16 Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Operasional Statistik yakni sebesar 68,90 persen dari total Pendapatan Operasional Statistik yakni sebesar Rp26.560.716.548.185, diikuti Pendapatan Lainnya sebesar Rp6.649.068.701.124 atau 17,25 persen dan Hibah Konsolidasian sebesar Rp5.340.274.739.054 atau 13,85 persen. Rincian Pendapatan Operasional Statistik disajikan pada tabel berikut:

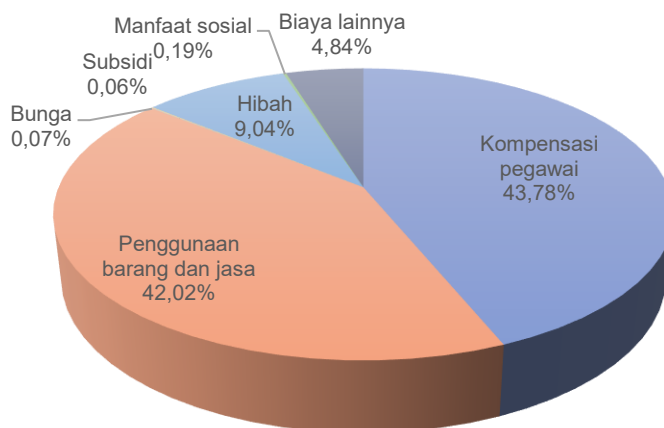
Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Pajak	Rp26.560.716.548.185	Rp23.493.239.926.316	Rp3.067.476.621.869	13,06
Hibah	Rp5.340.274.739.054	Rp462.723.355.828	Rp4.877.551.383.226	1054,10
Pendapatan lainnya	Rp6.649.068.701.124	Rp5.726.541.838.794	Rp922.526.862.330	16,11
Total	Rp38.550.059.988.363	Rp29.682.505.120.938	Rp8.867.554.867.425	29,87

Tabel 17 Rincian Pendapatan Operasional Tingkat Wilayah Tahun 2024 dan 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat kenaikan pada setiap jenis Pendapatan Operasional Statistik Tahun 2024. Pendapatan Hibah memberikan kontribusi terbesar pada kenaikan Pendapatan Operasional Statistik yakni sebesar Rp4.877.551.383.226 atau 1054,10 persen. Pendapatan Pajak sebesar Rp3.067.476.621.869 atau 13,06 persen dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp922.526.862.330 atau 16,11 persen dibandingkan tahun 2023.

D.3.2. Beban Operasional

Beban Operasional Statistik mencapai Rp50.046.368.301.323, meningkat Rp6.055.744.106.468 atau 13,77 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp43.990.624.194.855. Proporsi komponen Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Grafik berikut:



Grafik 17 Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kompensasi Pegawai memberikan kontribusi terbesar pada Beban Operasional Statistik yakni mencapai 43,78 persen, diikuti Penggunaan Barang dan Jasa yang memberikan kontribusi 42,02 persen, Beban Hibah sebesar 9,04 persen, Beban Lainnya 4,84 persen, Manfaat Sosial 0,19 persen, Beban Bunga 0,07 persen, dan beban subsidi 0,06 persen. Rincian komponen Beban Operasional Statistik per 31 Desember Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Kompensasi pegawai	Rp21.909.322.354.807	Rp17.771.477.946.972	Rp4.137.844.407.835	23,28
Penggunaan barang dan jasa	Rp21.029.483.505.616	Rp16.687.132.766.985	Rp4.342.350.738.631	26,02
Bunga	Rp34.225.157.897	Rp54.788.194.668	-Rp20.563.036.771	-37,53
Subsidi	Rp31.729.691.575	Rp15.882.811.614	Rp15.846.879.961	99,77
Hibah	Rp4.525.933.074.631	Rp7.470.082.608.669	-Rp2.944.149.534.038	-39,41
Manfaat sosial	Rp94.339.508.000	Rp62.104.337.000	Rp32.235.171.000	51,90
Biaya lainnya	Rp2.421.335.008.797	Rp1.929.155.528.948	Rp492.179.479.849	25,51
Total	Rp50.046.368.301.323	Rp43.990.624.194.856	Rp6.055.744.106.467	13,77

Tabel 18 Beban Operasional Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2024

Beban Operasional Statistik per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.046.368.301.323, meningkat Rp6.055.744.106.467 atau 13,77 persen dibandingkan tahun 2023. Kenaikan Beban Operasional Statistik terdapat pada Beban Komposisi Pegawai sebesar 23,28 persen, Penggunaan Barang dan Jasa sebesar 26,02 persen, Beban Subsidi sebesar 99,77 persen, Beban Manfaat Sosial sebesar 51,90 persen dan Beban Lainnya sebesar 25,51 persen. Sementara Beban Bunga dan Beban Hibah mengalami penurunan masing masing sebesar minus -37,53 persen dan minus -39,41 persen dibandingkan tahun 2023.

D.3.3. Saldo Operasi Bruto/Neto

Saldo Operasi Bruto (Gross Operating Balance) Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar - **Rp11.496.308.312.960** mengalami kenaikan sebesar Rp2.811.810.760.957 atau - **19,65** persen dari posisi per 31 Desember 2022 yakni sebesar - **Rp14.308.119.073.917**.

Saldo Operasi Neto (Net Operating Balance) yang tercatat di Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2023 sebesar -**Rp11.496.308.312.960** yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp38.550.059.988.363 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp50.046.368.301.323. Perhitungan Saldo Operasi Bruto (Gross Operating Balance) sama dengan perhitungan Saldo Operasi Neto (Net Operating Balance) dengan mengecualikan Konsumsi Aset Tetap dari Beban Operasional. Akan tetapi, dikarenakan tidak adanya Saldo Konsumsi Aset Tetap, GOB dan NOB memiliki saldo yang sama.

Selanjutnya informasi rincian terkait komponen Saldo Operasi Bruto/Neto (Gross/Net Operating Balance) Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Pendapatan	Rp38.550.059.988.363	Rp29.682.505.120.938	Rp8.867.554.867.425	29,87
Beban	Rp50.046.368.301.323	Rp43.990.624.194.855	Rp6.055.744.106.468	13,77
Saldo Operasi Bruto/Neto	-Rp11.496.308.312.960	-Rp14.308.119.073.917	Rp2.811.810.760.957	-19,65

Tabel 19 Rincian Saldo Operasi Bruto/Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan Saldo operasi bruto/neto (gross/net operating balance) per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.811.810.760.957 disebabkan peningkatan pada Pendapatan Operasional Statistik sebesar Rp8.867.554.867.425 atau 29,87 persen.

D.3.4. Akuisisi Aset Non Keuangan

Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (Net Acquisition of Nonfinancial Assets) per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp19.392.147.370.136 mengalami kenaikan sebesar Rp2.988.724.869.641 atau 18,22 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp16.403.422.500.495. Rincian komponen Akuisisi Aset Non Keuangan Neto (Net Acquisition of Nonfinancial Assets) Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Aset Tetap	Rp17.975.079.568.202	Rp14.905.564.364.930	Rp3.069.515.203.272	20,59
Persediaan	Rp1.346.912.316.951	Rp1.449.591.238.350	-Rp102.678.921.399	-7,08
Aset yang tidak dipro	Rp70.155.484.983	Rp48.266.897.215	Rp21.888.587.768	45,35
Total	Rp19.392.147.370.136	Rp16.403.422.500.495	Rp2.988.724.869.641	18,22

Tabel 20 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan nilai Akuisisi Aset Tetap sebesar Rp2.988.724.869.641 atau 18,22 persen didistribusi kenaikan pada Aset Tetap sebesar Rp3.069.515.203.272 atau 20,59 persen dan kenaikan pada Aset Non Produksi sebesar Rp21.888.587.768 atau 45,35 persen dibandingkan Tahun 2023.

D.3.5. Pinjaman Neto

Pinjaman Neto (Net Borrowing) tahun 2024 adalah sebesar -Rp30.888.455.683.096 mengalami penurunan Pinjaman Neto (Net Borrowing) sebesar **-Rp176.914.108.684** atau 0,58 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar **-Rp30.711.541.574.412**. Rincian Pinjaman Neto disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Saldo operasi bruto	-Rp11.496.308.312.960	-Rp14.308.119.073.917	Rp2.811.810.760.957	-19,65
Dikurangi: Investasi bersih/kotor dalam aset nonkeuangan	Rp19.392.147.370.136	Rp16.403.422.500.495	Rp2.988.724.869.641	18,22
Total	-Rp30.888.455.683.096	-Rp30.711.541.574.412	-Rp176.914.108.684	0,58

Tabel 21 Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024

D.3.6. Akuisisi Aset Keuangan Neto

Akuisisi Aset Keuangan Neto (Net Acquisition of Financial Assets) per 31 Desember Tahun 2024 sebesar **-Rp31.217.116.969.833** mengalami kenaikan sebesar Rp196.306.259.694 atau **-0,62** persen dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar **-Rp31.413.423.229.527**. Nilai Akuisisi Aset Keuangan Neto (Net Acquisition of Financial Assets) per 31 Desember Tahun 2024 sebesar **-Rp31.217.116.969.833** tersebut keseluruhannya berasal dari dalam negeri yang terdiri dari akuisisi neto aset keuangan (net acquisition of financial assets) Pemerintah Pusat sebesar **-Rp30.973.831.237.734**, akuisisi neto aset keuangan (net acquisition of financial assets) Pemerintah Provinsi sebesar **-Rp46.313.977.704** dan akuisisi neto aset keuangan (net acquisition of financial assets) gabungan Kabupaten/Kota sebesar **-Rp196.971.754.396**.

D.3.7. Keterjadian Kewajiban Neto

Keterjadian kewajiban neto (net incurrence of liabilities) tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 sebesar **-Rp328.661.286.738** mengalami penurunan Rp373.220.368.377 atau turun **-53,17** persen dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar **-Rp701.881.655.115**. Keterjadian kewajiban

neto (net incurrence of liabilities) yang tercatat di Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 ini keseluruhannya berasal dari kewajiban neto (net incurrence of liabilities) gabungan Kabupaten/Kota. Adapun jika dirinci, keseluruhannya berasal dari Penerimaan Pembiayaan LRA - Pinjaman Dalam Negeri (Domestic Loans).

D.4. CATATAN ATAS NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta kewajiban yang dimiliki pemerintah, pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam Aset Non-keuangan, Aset Keuangan dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, pengubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur. Struktur klasifikasi aset keuangan/kewajiban baik aset keuangan/kewajiban dalam negeri (domestik) maupun aset keuangan/kewajiban luar negeri adalah sebagai berikut:

1) Uang dan deposito

Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran. Deposito adalah aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya.

2) Surat berharga selain saham

Surat berharga selain saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti bahwa suatu unit mempunyai kewajiban untuk melunasi dengan kas, instrumen keuangan atau hal lain yang bernilai ekonomis.

3) Pinjaman

Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset tersebut.

4) Saham dan ekuitas lain

Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan.

5) Cadangan teknis asuransi

Cadangan teknis asuransi terdiri dari ekuitas bersih rumah tangga dalam cadangan dana pensiun dan asuransi jiwa, premi yang dibayar di muka, dan cadangan klaim yang belum dibayar.

6) Derivatif keuangan

Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang dihubungkan dengan instrumen keuangan, indikator atau komoditas tertentu dan dapat diperjualkan dalam pasar keuangan dengan resiko keuangan tertentu.

7) Piutang/utang lain

Piutang/utang lain terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar.

Aset dan kewajiban Pemerintah Umum terdiri dari konsolidasi aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Mapping data kewajiban Pemerintah Umum ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah (Dalam Negeri/Domestik dan Luar Negeri) dilakukan berdasarkan jenis mata uang kewajiban tersebut (Rupiah atau mata uang asing) dan belum dilakukan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur. Kewajiban dengan mata uang Rupiah diklasifikasikan sebagai kewajiban dalam negeri (domestik) dan kewajiban dengan mata uang asing diklasifikasikan sebagai kewajiban luar negeri. Laporan statistik keuangan pemerintah ini juga belum dapat menggambarkan keterkaitan antara arus (flow) dan posisi (stock) secara sempurna.

D.4.1. Kekayaan Bersih

Kekayaan Bersih merupakan total kekayaan pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban. Kekayaan Bersih Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp322.729.076.912.631 mengalami penurunan - Rp1.311.620.766.234 atau sebesar -0,40 persen dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp 324.040.697.678.865. Rincian Kekayaan Bersih disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Aset non-keuangan	Rp308.459.107.373.207	Rp306.711.356.886.984	Rp1.747.750.486.223	0,57
Aset keuangan	Rp21.806.401.593.639	Rp22.844.898.690.378	-Rp1.038.497.096.739	-4,55
Dikurangi: Kewajiban	Rp7.536.432.054.215	Rp5.515.557.898.498	Rp2.020.874.155.717	36,64
Total	Rp322.729.076.912.631	Rp324.040.697.678.864	-Rp1.311.620.766.233	-0,40

Tabel 22 Pinjaman Neto (Net Borrowing) Akuisisi Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah

Nilai Kekayaan Bersih pada per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari Aset Non Keuangan sebesar Rp308.459.107.373.207 dan Aset Keuangan sebesar Rp21.806.401.593.639 setelah dikurangi Kewajiban yang keseluruhannya merupakan Kewajiban Dalam Negeri sebesar Rp7.536.432.054.215.

D.4.2. Aset Non-Kuangan

Aset Non Keuangan Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar Rp308.459.107.373.207 mengalami kenaikan Rp1.747.750.486.224 atau naik 0,57 persen dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp306.711.356.886.983. Aset Non Keuangan pada per 31 Desember 2023 tersebut berasal dari Aset Tetap sebesar Rp145.334.054.658.112 Persediaan sebesar Rp3.622.912.648.298 dan Aset Non Produksi sebesar Rp159.502.140.066.797. Rincian Aset Non Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Aset Tetap	Rp145.334.054.658.112	Rp144.570.665.092.837	Rp763.389.565.275	0,53
Persediaan	Rp3.622.912.648.298	Rp3.265.306.115.081	Rp357.606.533.217	10,95
Aset yang tidak diproduksi	Rp159.502.140.066.797	Rp158.875.385.679.065	Rp626.754.387.732	0,39
Total	Rp308.459.107.373.207	Rp306.711.356.886.983	Rp1.747.750.486.224	0,57

Tabel 23 Aset Non Keuangan Neto Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan Aset Non Keuangan sebesar Rp1.747.750.486.224 atau 0,57 persen didistribusi dari kenaikan nilai Aset Tetap sebesar Rp763.389.565.275 atau 0,53 persen diikuti kenaikan nilai persediaan sebesar Rp357.606.533.217 atau 10,95 persen dan Aset Non Produksi sebesar Rp626.754.387.732 atau 0,39 persen.

D.4.2.1. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp145.334.054.658.112 mengalami kenaikan Rp763.389.565.275 atau naik 0,53 persen dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.570.665.092.837. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Bangunan dan struktur	Rp129.010.389.064.345	Rp126.440.402.826.805	Rp2.569.986.237.540	2,03
Mesin dan peralatan	Rp6.261.346.128.316	Rp7.461.146.238.500	-Rp1.199.800.110.184	-16,08
Aset tetap lainnya	Rp10.062.319.465.451	Rp10.669.116.027.532	-Rp606.796.562.081	-5,69
Total	Rp145.334.054.658.112	Rp144.570.665.092.837	Rp763.389.565.275	0,53

Tabel 24 Aset Tetap Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dikontribusi oleh kenaikan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.569.986.237.540 atau 2,03 persen. Sementara itu Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar -Rp1.199.800.110.184 dan -Rp606.796.562.081.

D.4.2.2. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.622.912.648.298 mengalami kenaikan Rp357.606.533.217 atau naik 10,95 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3.265.306.115.081.

D.4.2.3. Aset Non Produksi

Aset Non Produksi per 31 Desember 2024 sebesar Rp159.502.140.066.797 mengalami kenaikan Rp626.754.387.732 atau naik 0,39 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp158.875.385.679.065. Rincian Aset Non Produksi disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Tanah	Rp159.439.115.586.747	Rp158.875.385.679.065	Rp563.729.907.682	0,35
Aset tidak berwujud yang tidak diproduksi	Rp63.024.480.050	Rp0	Rp63.024.480.050	100,00
Total	Rp159.502.140.066.797	Rp158.875.385.679.065	Rp626.754.387.732	0,39

Tabel 25 Aset Non Produksi Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan Aset Non Produksi per 31 Desember 2024 dikontribusi oleh kenaikan nilai Tanah sebesar Rp596.914.938.491 atau 0,38 persen dibandingkan Tahun 2023. Kenaikan juga terdapat pada Aset Non Produksi Tidak Berwujud sebesar Rp63.024.480.050 di tahun 2024 yang tidak terdapat sebelumnya di tahun 2023.

D.4.3. Aset Keuangan

Aset keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.806.401.593.639 mengalami penurunan **-Rp1.038.497.096.739** atau **-4,55** persen dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp22.844.898.690.378. Rincian Aset Keuangan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Mata uang dan deposito	Rp5.274.998.852.290	Rp5.611.987.366.294	-Rp336.988.514.004	-6,00
Surat utang	Rp76.766.164.437	Rp388.603.437	Rp76.377.561.000	19654,37
Pinjaman	Rp7.270.375.295	Rp7.370.375.295	-Rp100.000.000	-1,36
Saham ekuitas dan dana	Rp12.932.850.264.128	Rp11.167.325.381.622	Rp1.765.524.882.506	15,81
Piutang lainnya	Rp3.514.515.937.489	Rp6.057.826.963.730	-Rp2.543.311.026.241	-41,98
Total	Rp21.806.401.593.639	Rp22.844.898.690.378	-Rp1.038.497.096.739	-0,45

Tabel 26 Aset Keuangan Neto Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Penurunan Aset Keuangan per 31 Desember 2024 sebesar **-Rp1.038.497.096.739** atau **-0,45** persen dikontribusi oleh penurunan piutang lainnya sebesar Rp200.009.356.818 atau 3,30 persen, kenaikan Saham dan Ekuitas Lainnya sebesar **-Rp2.543.311.026.241** atau **-41,98** persen yang berpengaruh cukup signifikan meskipun terdapat kenaikan Saham ekuitas dan dana investasi sebesar Rp1.765.524.882.506 atau sekitar 15,81 persen.

D.4.4. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.536.432.054.215 meningkat Rp2.020.874.155.717 atau 36,64 persen dibandingkan Tahun 2023. Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.515.557.898.498 Keseluruhan nilai Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Domestik yang terdiri atas Pinjaman sebesar Rp379.019.746.557 dan Utang lainnya sebesar Rp7.157.412.307.658.

Kenaikan nilai Kewajiban didistribusi peningkatan pada nilai Utang Lainnya sebesar Rp2.204.662.805.815 atau 44,51 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp4.952.749.501.843 meskipun di sisi lain Pinjaman sebesar Rp379.019.746.557 yang mengalami penurunan sebesar **-Rp183.788.650.098** atau **-32,66** persen dibandingkan per 31 Desember 2023.

D.5. CATATAN ATAS LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN TINGKAT WILAYAH

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menyajikan informasi atas aliran kas masuk dan keluar pada suatu entitas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidas. Secara umum Laporan Sumber dan Penggunaan Kas dijelaskan sebagai berikut:

D.5.1. Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi merupakan Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi. Arus Kas Neto Dari Aktivitas operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.284.349.887.445 mengalami kenaikan Rp2.946.822.327.195 atau naik 10,04 persen dari posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.337.527.560.250.

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp75.307.933.231.327 mengalami kenaikan Rp8.376.861.087.786 atau naik 12,52 persen dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp66.931.072.143.541. Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Pajak	Rp10.153.297.659.967	Rp10.113.842.253.318	Rp39.455.406.649	0,39
Hibah	Rp5.340.274.739.054	Rp462.723.355.828	Rp4.877.551.383.226	1054,10
Penerimaan Lainnya	Rp59.814.360.832.307	Rp56.354.506.534.395	Rp3.459.854.297.912	6,14
Total	Rp75.307.933.231.328	Rp66.931.072.143.541	Rp8.376.861.087.787	12,52

Tabel 27 Arus Masuk dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp8.376.861.087.787 atau 12,52 persen didistribusi dari kenaikan Kas Masuk Hibah sebesar Rp4.877.551.383.226 atau mencapai 1054,10 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp462.723.355.828. Kenaikan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi juga terdapat pada Kas Masuk Pajak sebesar Rp39.455.406.649 atau 0,39 persen dan kenaikan Kas Masuk Penerimaan Lainnya sebesar Rp3.459.854.297.912 atau sebesar 6,14 persen dibandingkan tahun 2023.

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.023.583.343.882 mengalami kenaikan Rp5.430.038.760.591 atau 14,44 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp37.593.544.583.291 Rincian Arus

Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Kompensasi Karyawan	Rp23.077.816.402.149	Rp18.389.727.914.273	Rp4.688.088.487.876	25,49
Pembelian Barang dan Jasa	Rp20.887.390.661.219	Rp16.970.516.624.300	Rp3.916.874.036.919	23,08
Minat	Rp34.225.157.897	Rp54.788.194.668	-Rp20.563.036.771	-37,53
Subsidi	Rp31.729.691.575	Rp15.882.811.614	Rp15.846.879.961	99,77
Hibah	-Rp3.625.791.346.070	-Rp584.370.081.663	-Rp3.041.421.264.407	520,46
Manfaat Sosial	Rp94.339.508.000	Rp62.104.337.000	Rp32.235.171.000	51,90
Pembayaran Lainnya	Rp2.523.873.269.112	Rp2.684.894.783.100	-Rp161.021.513.988	-6,00
Total	Rp43.023.583.343.882	Rp37.593.544.583.292	Rp5.430.038.760.590	14,44

Tabel 28 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tingkat Wilayah Tahun 2024

Kenaikan Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp5.430.038.760.590 dikontribusi oleh kenaikan pada Kompensasi Pegawai sebesar Rp4.688.088.487.876 atau 25,49 persen, Kenaikan Pembelian Barang dan Jasa sebesar Rp3.916.874.036.919, kenaikan subsidi sebesar Rp15.846.879.961 dan Manfaat Sosial sebesar Rp32.235.171.000 dibandingkan Tahun 2023.

D.5.2. Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi merupakan Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi. Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.896.248.648.555 mengalami kenaikan Rp3.027.711.783.942 atau 20,36 persen dari posisi per 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp14.868.536.864.613. Rincian Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi disajikan pada tabel berikut:

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Pembelian aset non-keuangan	Rp17.916.240.398.779	Rp14.898.434.612.730	Rp3.017.805.786.049	20,26
Penjualan aset non-keuangan	Rp19.991.750.224	Rp29.897.748.117	-Rp9.905.997.893	-33,13
Total	Rp17.896.248.648.555	Rp14.868.536.864.613	Rp3.027.711.783.942	20,36

Kenaikan Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 dikontribusi oleh seluruh komponen perhitungan Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi berupa kenaikan pada Pembelian Aset Non Keuangan-Aset Non Produksi sebesar 20,26 persen, kenaikan pada Pembelian Aset Non Keuangan-Aset Tetap sebesar 20,17 persen dan penurunan Penjualan Aset Non Keuangan – Aset Tetap yang turun sebesar -33,13 persen.

D.5.3. Surplus/Defisit Kas

Surplus/(Defisit) kas merupakan Arus Kas Neto Dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (Pembelian Aset Non

Keuangan). Surplus/(Defisit) Kas per 31 Desember 2024 nilai Surplus(Defisit) Kas pada Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp14.388.101.238.890 mengalami penurunan sebesar **-Rp80.889.456.746** atau **-0,56** persen jika dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) per 31 Desember 2023 yakni Surplus sebesar Rp14.468.990.695.636.

D.5.4. Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pembiayaan merupakan selisih antara Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas dengan Keterjadian Kewajiban Neto. Per tanggal 31 Desember 2024 Akuisisi Aset Keuangan Neto Selain Kas Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp43.695.111.793 dan Keterjadian Kewajiban Neto Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 sebesar minus **-Rp328.661.286.738** sehingga Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp372.356.398.531.

Nilai Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp372.356.398.531 tersebut mengalami penurunan sebesar **-Rp438.389.532.915** atau turun **-54,07** persen dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp810.745.931.446. Keterjadian Kewajiban Neto (Net Incurrence Of Liabilities) yang tercatat di Laporan Sumber Dan Penggunaan Kas Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2024 sebesar **-Rp328.661.286.738** seluruhnya berasal dari dalam negeri (domestik)

D.5.5. Perubahan Kas

Perubahan Kas merupakan surplus/defisit kas dikurangi dengan Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pembiayaan. Perubahan Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.834.957.449.530 mengalami kenaikan sebesar Rp2.791.574.939.291 atau 14,66 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19.043.382.510.239.

LAMPIRAN





METADATA

Metadata Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Audited

A. Informasi Data

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Data | : | LKPK & LSKP Tingkat Wilayah Tahun 2024 Audited |
| 2. Penyelenggara Statistik | : | Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia |
| 3. Alamat | : | Gedung Keuangan Negara Lantai 2
Jalan Kapten A.Rivai No. 2-4 |
| 4. Nomor Telepon | : | 0711- 351476, 356534 |
| 5. Nomor Faksimili | : | 0711– 310891 |
| 6. Email | : | kanwilpalembang@gmail.com |

B. Definisi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan Laporan Statistik Keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts-SNA), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (The Monetary and Financial Statistics Manual)

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah-Tingkat Wilayah (LSKP-TW) ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah-Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat tingkat wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah. LSKP-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah
4. Metadata.



C. Cakupan Data

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan akun skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

D. Periode Publikasi

Triwulanan, Semesteran, Tahunan

E. Waktu Publikasi

1. Data triwulanan dan semester diterbitkan satu bulan setelah berakhirnya periode data
2. Data tahunan Audited diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya
3. Data tahunan final (*audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

F. Status Data

Status Data LKPP dan LKPD saat ini berstatus Audited

G. Sumber Data

1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW yang di download dari Aplikasi SIKRI MP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyusunan LO LSKP dan Laporan Sumber Penggunaan Kas menggunakan data Table GFS 1 (Revenue), Table GFS 2 (Expense), dan Tabel GFS 3 (Transactions in Assets in Liabilities)
 - b. Penyusunan Neraca LSKP menggunakan Table GFS 6 (Balance Sheet)



2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW yang di download dari Aplikasi SIKRI MP dengan melakukan penyesuaian pada Table 3 GFS dilakukan eliminasi secara otomatis oleh sistem SIKRI MP pada pos Net Transaction in Assets and Liabilities – Currency and Deposits (3212) sebesar nilai eliminasi atas transaksi resiprokal antara pempus dengan pemda dan transaksi resiprokal antara pemrov dengan pemkab/pemkot. Seharusnya, eliminasi tersebut dilakukan pada pos pendapatan dan beban. Oleh karena itu, dilakukan jurnal penyesuaian GFS untuk menghilangkan eliminasi tersebut.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi (gabungan data dari GLSPAN dan Aplikasi MONSAKTI) dan dilakukan split data ke Kanwil melalui Aplikasi SIKRI MP.
4. Data keuangan/LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 merupakan data keuangan/LKPD periode tahun 2024 Audited yang didapat dari 18 Pemerintah Prov/Kab/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan

H. Metodologi

LSKP-TW disusun dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW. LSKPPTW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan mapping BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW menggunakan Aplikasi SIKRI MP dimana Data keuangan pemerintah pusat dilakukan split oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sehingga secara otomatis akan tersedia pada SIKRI MP dan Data keuangan pemerintah daerah diproses melalui unggah WebADI ke dalam SIKRI Modul Pelaporan (sebelum penerapan otomatisasi penuh). Eliminasi atas transaksi resiprokal melalui jurnal manual yang diunggah melalui WebADI pada SIKRI MP. Aplikasi SIKRI MP akan secara otomatis melakukan penyusunan LSKP-TW dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW kedalam GFS Table sesuai dengan kerangka mapping masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW melalui mapping BAS detail data LKPP-TW, (2) Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui mapping BAS detail data LKPDK-TW, (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi LSKP-TW.



I. Integritas Data

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Tahun 2024 *Audited* diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi (gabungan data dari GLSPAN dan Aplikasi E-rekon&LK) dan dilakukan split data ke Kanwil melalui Aplikasi SIKRI Modul Pelaporan yang diunduh tanggal 13 Agustus 2025.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 *Audited* dilakukan proses konsolidasi terhadap 18 LKPD Prov/Kab/Kota lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Atas data-data tersebut dilakukan proses konsolidasi dan diunggah ke SIKRI.
3. Data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Tahun 2023 *Audited* diperoleh dari Aplikasi SIKRI Modul Pelaporan yang diunduh tanggal 13 Agustus 2025.
4. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

J. Akses Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Kapten A Rivai Nomor 2-4 Palembang atau melalui tautan <https://sites.google.com/view/dapur-aklap/publikasi/lkpk-lskp?authuser=0> atau bit.ly/RAGITDOBEL03.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.





LAPORAN KONSOLIDASIAN (FACE)



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH

dan

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited)

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2024

FACE

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian		(Dalam Rupiah)
		31 DESEMBER 2024
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI		38.643.199.292.614
Pendapatan Perpajakan konsolidasi		26.583.106.411.760
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		26.240.240.634.895
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		342.865.776.865
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		11.928.399.506.975
Pendapatan Sumber Daya Alam		
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan		431.349.919.200
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		2.755.682.713.560
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA		4.634.422.846.348
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		57.070.093.230
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		464.535.582.727
Bantuan Keuangan - LRA		58.308.584.749
Pendapatan Badan Layanan Umum		3.527.029.767.161
Pendapatan hibah		131.693.373.879
Pendapatan hibah dalam negeri		131.693.373.879
Pendapatan hibah luar negeri		
B. Belanja		69.531.654.975.710
Belanja pegawai		22.422.698.099.757
Belanja gaji dan tunjangan		20.856.677.594.835
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito		1.154.011.209.997
Belanja kontribusi sosial		412.009.294.925
Belanja barang dan jasa		22.329.202.344.018
Belanja barang		6.789.822.007.799
Belanja Jasa		5.496.884.785.711
Belanja Pemeliharaan		2.045.397.749.727
Belanja Perjalanan Dinas		2.688.303.107.571
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)		1.815.956.953.603
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda		2.312.862.735.045
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS		1.179.975.004.562
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden		
Belanja Modal		18.065.226.803.409
Belanja Modal Tanah		64.679.234.983
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.152.209.229.117
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.923.560.836.361
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		12.282.465.066.354
Belanja Modal Lainnya		306.728.996.538
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)		335.583.440.055
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		34.225.157.897
Belanja Pembayaran Bunga Utang		34.225.157.897
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara		
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption		
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara		
Belanja Denda		
Belanja Subsidi		31.729.691.575
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		31.729.691.575
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Hibah		2.320.268.772.284
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri		
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional		
Belanja Hibah Kepada Pemerintah		304.510.660.421
Belanja Hibah Lainnya		2.015.758.111.863
Belanja Bantuan Sosial		94.339.508.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		4.672.564.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial		24.057.000.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana		65.609.944.000
Belanja Lain-lain		12.542.184.560

Belanja Lain-lain	12.542.184.560
C. BELANJA TRANSFER	4.221.422.414.210
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	4.221.422.414.210
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.221.422.414.210
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.221.422.414.210
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	
Dana Desa	
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	(30.888.455.683.096)
E. Pembiayaan	2.485.906.031.374
Penerimaan Pembiayaan	2.858.365.629.905
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	2.858.365.629.905
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan	372.459.598.531
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	328.661.286.738
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
Penyertaan Modal Negara	43.798.311.793
RDI/RPD	
Dukungan Infrastruktur	
Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Suspense Pembiayaan	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	(28.402.549.651.721)

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

		(Dalam Rupiah)
Uraian		31 DESEMBER 2024
Aset		330.265.508.966.846
Aset lancar		11.938.643.051.289
Kas dan setara kas		4.856.609.524.210
Uang muka rekening BUN-khusus pusat		
Investasi jangka pendek		122.377.561.000
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja		179.789.443.748
Piutang		3.156.953.874.033
Piutang Perpajakan		2.297.901.669.181
Piutang Bukan Pajak		2.611.958.491.727
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		33.026.019.091
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		94.403.456
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman		
Piutang lain-lain		190.850.309.243
Penyisihan piutang tak tertagih		(1.976.877.018.665)
Persediaan		3.622.912.648.298
Piutang PFK		
Investasi jangka panjang		12.933.238.867.565
Investasi jangka panjang non permanen		388.603.437
Investasi jangka panjang permanen		12.932.850.264.128
Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
Aset tetap		297.492.780.730.623
Tanah		159.437.995.586.747
Peralatan dan mesin		34.634.788.105.732
Gedung dan bangunan		44.571.822.749.016
Jalan, irigasi, dan jaringan		163.511.660.810.572
Aset tetap lainnya		3.246.376.588.575
Konstruksi dalam pengerjaan		7.216.269.296.161
Konsesi Jasa		7.487.195.754.518
Akumulasi penyusutan		(122.613.328.160.698)
Aset Tetap Yang Belum Diregister		
Properti Investasi		17.795.509.085
Dana cadangan		
Dana cadangan		
Piutang jangka panjang		119.685.597.855
Tagihan piutang penjualan angsuran		526.438.015
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi		112.055.771.801
Piutang jangka panjang kredit pemerintah		
Piutang jangka panjang lainnya		7.270.375.295
Penyisihan piutang jangka panjang		(166.987.256)
Aset lainnya		7.763.365.210.429
Kemitraan dengan pihak ketiga		65.357.397.148
Aset tidak berwujud		1.053.879.433.559
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		372.389.328.080
Dana Penjaminan		
Dana Kelolaan BLU		
Aset lain-lain		7.123.269.504.906
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya		
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(851.530.453.264)
Kewajiban / Utang		7.536.432.054.215
Kewajiban jangka pendek		5.782.168.802.866
Utang perhitungan pihak ketiga		6.156.023.442
Utang kepada pihak ketiga		2.948.547.114.083
Utang bunga		1.778.651.079
Utang subsidi		
Utang Transfer		2.283.708.589.811
Bagian lancar utang jangka panjang		90.985.397.604
Utang surat perbendaharaan negara		
Utang Yang Belum Ditagihkan		1.396.859.486
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan		198.451.429.597
Pendapatan Diterima Dimuka		61.970.091.651
Uang Muka		656.462.268
Utang Jangka Pendek Lainnya		188.518.183.845
Kewajiban jangka panjang		1.754.263.251.348

Utang jangka panjang dalam negeri	288.036.104.178
Utang jangka panjang luar negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	1.466.227.147.170
Ekuitas	322.729.076.912.631

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
EKUITAS AWAL	340.812.709.306.664
Ekuitas Awal pemerintah Pusat	205.235.986.767.361
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	135.576.722.539.303
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	340.812.709.306.664
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(24.075.548.262.661)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	6.318.532.781
Selisih Revaluasi Aset	(947.777.905)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	593.692.776.182
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	3.528.102.325
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	(5.209.201.065.160)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	(4.606.609.431.777)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	31.087.987.006.015
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2.405.829.311.576
EKUITAS AKHIR	343.218.538.618.241

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
KEGIATAN OPERASIONAL	(30.787.845.718.822)
Pendapatan Operasional-LO	43.767.771.156.170
Pendapatan perpajakan-LO	29.645.204.467.502
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	29.312.110.007.043
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	333.094.460.459
Pendapatan bukan pajak-LO	2.142.398.958.956
Pendapatan sumber daya alam-LO	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	325.684.500.721
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	1.816.714.458.235
Pendapatan Transfer - LO	6.744.592.359.373
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	4.460.310.218.394
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	491.269.495.829
Bantuan Keuangan - LO	1.793.012.645.149
Pendapatan BLU-LO	3.609.811.046.842
Pendapatan Jasa BLU - LO	3.465.536.352.762
Pendapatan Hibah BLU - LO	3.490.344.723
Pendapatan Lainnya BLU - LO	140.784.349.357
Pendapatan hibah-LO	937.732.588.002
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	937.732.588.002
Pendapatan lainnya-LO	688.031.735.495
Pendapatan lainnya Pemda	664.231.780.729
Pendapatan Penyesuaian Akrua	23.799.954.766
Beban Operasional	68.084.137.243.564
Beban pegawai	23.119.063.451.807
Beban gaji dan tunjangan	21.950.073.945.170
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transit	1.168.989.506.637
Beban kontribusi sosial	
Beban persediaan	1.017.226.276.412
Beban barang dan jasa	21.015.070.290.757
Beban barang	8.420.713.763.124
Beban jasa	5.863.027.974.688
Beban pemeliharaan	2.173.555.044.677
Beban perjalanan dinas	2.738.322.530.417
Beban BLU/BLUD	546.281.656.845
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	1.273.169.321.007
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil	
Presiden	
Beban bunga	33.784.706.229
Beban Pembayaran Bunga Utang	33.784.706.229
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Beban Denda	
Beban subsidi	28.504.026.949
Beban subsidi kepada perusahaan publik	28.504.026.949
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	
Beban Subsidi - Estimasi	
Beban hibah	2.825.674.739.961
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	
Beban hibah kepada organisasi internasional	
Beban hibah kepada pemerintah daerah	340.437.120.302
Beban Hibah Lainnya	2.485.237.619.659
Beban bantuan sosial	123.806.229.946
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	7.399.763.356
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	24.057.000.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	92.349.466.590
Beban lain-lain/beban tidak terduga	21.337.330.741
Beban Lain-lain	21.337.330.741
Beban akrual lainnya	13.428.190.559.333
Beban Penyusutan Aset Tetap	13.084.856.450.256
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	77.766.910.652

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	265.567.198.426
BEBAN TRANSFER	6.471.479.631.428
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	2.590.922.321.549
Dana Bagi Hasil	
Dana Bagi Hasil Pajak	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Umum	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	2.590.922.321.549
Dana Desa	2.590.922.321.549
Beban Transfer Lain-lain	
Beban Suspense Transfer	
BEBAN TRANSFER PEMDA	3.880.557.309.879
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	290.196.879.539
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	1.925.088.366.031
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.665.272.064.310
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(24.316.366.087.394)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	244.041.534
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	(63.301.294.016)
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	14.191.025.647
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	64.524.040.338
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	227.531.333.528
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	243.189.147.031
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(24.073.176.940.362)
POS LUAR BIASA	(2.371.322.299)
PENDAPATAN LUAR BIASA	
BEBAN LUAR BIASA	(2.371.322.299)
SURPLUS (DEFISIT) LO	(24.075.548.262.661)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023**

		(Dalam Rupiah)
Uraian		2024
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL		
A. Saldo Anggaran Lebih Awal		1.203.655.835.274
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih		
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian		1.203.655.835.274
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL		1.203.655.835.274
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		(34.974.491.302.070)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)		(33.770.835.466.796)
D. Penyesuaian SAL		
1. Penyesuaian Pembukuan		
2. Penyesuaian Lain-lain		33.770.835.466.796
Total Penyesuaian SAL (A.II)		33.770.835.466.796
Rincian Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SILPA		
Selisih Kurs (Unrealized)		
Koreksi Kas BUN		
Koreksi Kas KPPN		
Koreksi Kas BLU		416.369.923
Koreksi Kas Hibah		1.120.000.000
Koreksi Utang PFK		
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)		
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)		
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:		
Penyesuaian Transaksi RPL		
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris		
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Pembulatan		33.770.835.466.796
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)		
2. PERHITUNGAN FISIK SAL		
SALDO AKHIR KAS BUN		
SALDO AKHIR KAS KPPN		
SALDO AKHIR KAS BLU		691.608.000.926
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH		422.254.555.811
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		150.724.720
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice		
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL		
Selisih Kiriman Uang		
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan		
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan		
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)		
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan		
Pengembalian Escrow PNPB		
Transito BLU		
Dana Optimalisasi Kas		
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		

FACE

**LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT
WILAYAH**

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
REVENUE	38.550.059.988.363
Taxes	26.560.716.548.185
Social contributions	
Grants	5.340.274.739.054
Other revenue	6.649.068.701.124
EXPENSE	50.046.368.301.323
Compensation of employees	21.909.322.354.807
Use of goods and services	21.029.483.505.616
Consumption of fixed capital	
Interests	34.225.157.897
Subsidies	31.729.691.575
Grants	4.525.933.074.631
Social benefits	94.339.508.000
Other expense	2.421.335.008.797
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	(11.496.308.312.960)
Net operating balance (1-2+NOBz)	(11.496.308.312.960)
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	(11.496.308.312.960)
Net/gross investment in nonfinancial assets	19.392.147.370.136
Fixed Assets	17.975.079.568.202
Weapon systems	
Inventories	1.346.912.316.951
Nonproduced assets	70.155.484.983
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	(30.888.455.683.096)
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	(31.217.116.969.833)
Domestic debtors	(31.217.116.969.833)
External debtors	
Net incurrence of liabilities [331+332]	(328.661.286.738)
Domestic creditors	(328.661.286.738)
External creditors	
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)	

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024
NET WORTH	322.729.076.912.631
Nonfinancial assets	308.459.107.373.207
Fixed assets	145.334.054.658.112
Buildings and structures	129.010.389.064.345
Dwellings	11.265.123.272.955
Buildings other than dwellings	37.249.237.868.565
Other structures	80.496.027.922.825
Land improvements	
Machinery and equipment	6.261.346.128.316
Transport equipment	6.261.346.128.316
Machinery and equipment other than transport equipment	
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	
Machinery and equipment not elsewhere classified	
Other fixed assets	10.062.319.465.451
Cultivated biological resources	
Animal resources yielding repeat products	
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	
Intellectual property products	10.062.319.465.451
Research and development	653.282.024.886
Mineral exploration and evaluation	
Computer software and databases	681.925.603.452
Entertainment, literary, and artistic originals	
Other intellectual property products	8.727.111.837.113
Weapon systems	
Inventories	3.622.912.648.298
Strategic stocks	5.673.210
Other inventories	3.622.906.975.088
Materials and supplies	2.062.204.716.100
Work in progress	
Finished goods	
Goods for resale	1.560.702.258.987
Military inventories	
Valuables	
Nonproduced assets	159.502.140.066.797
Land	159.439.115.586.747
Mineral and energy resources	
Other naturally occurring assets	
Noncultivated biological resources	
Water resources	
Other natural resources	
Radio spectrum	
Natural resources not elsewhere classified	
Intangible nonproduced assets	63.024.480.050
Contracts, leases, and licenses	
Marketable operating leases	
Permits to use natural resources	
Permits to undertake specific activities	
Goodwill and marketing assets	63.024.480.050
Financial assets [621+622]	21.806.401.593.639
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits [6212+6222]	5.274.998.852.290
Debt securities [6213+6223]	76.766.164.437
Loans [6216+6226]	7.270.375.295
Equity and investment fund shares [6215+6225]	12.932.850.264.128
Equity [62151+62251]	12.932.850.264.128
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	

Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts receivable [6218+6228]	3.514.515.937.489
Trade credit and advances [62181 + 62281]	99.346.035.345
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	3.415.169.902.144
Domestic debtors	21.806.401.593.639
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	5.274.998.852.290
Debt securities	76.766.164.437
Loans	7.270.375.295
Equity and investment fund shares	12.932.850.264.128
Equity	12.932.850.264.128
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	3.514.515.937.489
Trade credit and advances	99.346.035.345
Miscellaneous other accounts receivable	3.415.169.902.144
External creditors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	
Liabilities [631+632]	7.536.432.054.215
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]	
Currency and deposits [6212+6222]	
Debt securities [6213+6223]	
Loans [6216+6226]	379.019.746.557
Equity and investment fund shares [6215+6225]	
Equity [62151+62251]	
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts payable [6218+6228]	7.157.412.307.658
Trade credit and advances [62181 + 62281]	222.086.942.418
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	6.935.325.365.240
Domestic creditors	7.536.432.054.215
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	379.019.746.557
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	

- Pension entitlements - Claims of pension funds on pension manager - Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	7.157.412.307.658
Trade credit and advances	222.086.942.418
Miscellaneous other accounts payable	6.935.325.365.240
External creditors	
Special Drawing Rights (SDRs)	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH

TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)	
Uraian	2024
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Cash receipts from operating activities	75.307.933.231.327
Taxes	10.153.297.659.967
Social Contribution	
Grants	5.340.274.739.054
Other Receipts	59.814.360.832.307
Cash payments for operating activities	43.023.583.343.882
Compensation of Employees	23.077.816.402.149
Purchase of Goods and Service	20.887.390.661.219
Interest	34.225.157.897
Subsidies	31.729.691.575
Grants	(3.625.791.346.070)
Social Benefits	94.339.508.000
Other Payments	2.523.873.269.112
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	32.284.349.887.445
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS	
Purchases of nonfinancial assets	17.916.240.398.779
Fixed Assets	17.846.084.913.796
Strategic Stocks	
Valuables	
Nonproduced Assets	70.155.484.983
Sales of nonfinancial assets	19.991.750.224
Fixed Assets	19.991.750.224
Strategic Stocks	
Valuables	
Nonproduced Assets	
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	17.896.248.648.555
CASH SURPLUS/DEFISIT	14.388.101.238.890
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	43.695.111.793
Domestic debtors	43.695.111.793
External creditors	
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	(328.661.286.738)
Domestic creditors	(328.661.286.738)
External creditors	
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	372.356.398.531
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	21.834.957.449.530
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities	(7.074.499.812.109)
.....Central government	
.....Budgetary central government	

LEMBAR PEMERIKSAAN DAN REVIU BERJENJANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tanggal Cetak :
Tanggal LKPP :
Tanggal LKPD :

LAPORAN REALISASI

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

NERACA

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN ARUS KAS

Penyusun Laporan	Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Arus Kas dan SAL	Kepala Subdirektorat PLKPP
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN OPERASIONAL

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP.....	 NIP.....	 NIP.....

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Audited)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
A. Pendapatan Negara dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	18.377.584.490.651
1. Pajak Dalam Negeri	18.034.718.713.786
2. Pajak Perdagangan Internasional	342.865.776.865
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.744.353.802.771
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	2.096.565.822.362
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.647.787.980.409
III. Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	22.121.938.293.422
B. Belanja Negara	
I. Belanja Pemerintah Pusat	20.121.608.261.254
1. Belanja Pegawai	6.001.221.949.015
2. Belanja Barang	8.248.137.781.696
3. Belanja Modal	5.843.518.966.543
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
5. Belanja Subsidi	
6. Belanja Hibah	
7. Belanja Bantuan Sosial	28.729.564.000
8. Belanja Lain-lain	
II. Transfer ke Daerah	32.974.161.269.902
1. Dana Bagi Hasil	11.202.494.030.800
2. Dana Alokasi Umum	13.353.438.188.695
3. Dana Alokasi Khusus	5.585.703.314.707
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.400.771.910.611
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.184.931.404.096
c. Hibah Kepada Daerah	
4. Dana Otonomi Khusus	
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
6. Dana Desa	2.592.619.709.200
7. Insentif Fiskal	239.906.026.500
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	53.095.769.531.156
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(30.973.831.237.734)
D. Pembiayaan	
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	
2. Pemberian Pinjaman	
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
5. Surat Berharga Negara (Neto)	
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	
6. Pinjaman dalam negeri (Neto)	
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
7. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	
8. Kewajiban Penjaminan	
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	
10. Pembiayaan Lain-lain	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	
a. Penarikan Pinjaman Tunai	
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	(30.973.831.237.734)

NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas:	
Rekening Kas BUN di BI	
Rekening Pemerintah Lainnya	
Rekening Kas di KPPN	
Kas dalam Transito	
Kas di Bendahara Pengeluaran	807.186.988
Kas di Bendahara Penerimaan	14.554.082
Kas Lainnya dan Setara Kas	982.328.907.320
Kas pada Badan Layanan Umum	1.300.003.705.515
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.283.154.353.905
Uang Muka Dari Rekening BUN	
Investasi Jangka Pendek	
Investasi dalam Deposito	
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
Investasi Jangka Pendek BLU	46.000.000.000
Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Investasi Jangka Pendek	46.000.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	51.215.286.387
Uang Muka Belanja (prepayment)	60.287.254.870
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	15.347.295.631
Piutang:	
Piutang Perpajakan	2.297.901.669.181
Piutang Bukan Pajak	427.450.210.190
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	94.403.456
Piutang Penerusan Pinjaman	
Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	
Piutang dari Kegiatan BLU	183.808.127.817
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	
Piutang PFK	
Jumlah Piutang (Bruto)	2.909.254.410.644
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(937.713.858.011)
Jumlah Piutang (Bersih)	1.971.540.552.633
Persediaan	2.767.322.509.029
Persediaan yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lancar	7.194.867.252.455
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	
Dana Restrukturisasi Perbankan	
Dana Bergulir	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)	
Investasi dalam Obligasi	
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Diragukan Tertagih	
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)	
Jumlah Investasi Non Permanen	
Investasi Permanen	
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Permanen Lainnya	
Jumlah Investasi Permanen	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	
Aset Tetap	
Tanah	133.928.538.524.598
Peralatan dan Mesin	16.035.925.767.007
Gedung dan Bangunan	14.372.958.090.909

Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.203.852.687.362
Aset Tetap Lainnya	553.538.523.635
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.322.988.261.344
Tanah Belum Diregister	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	
Aset Konsepsi Jasa	7.487.195.754.518
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	248.904.997.609.373
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(46.629.559.941.359)
Jumlah Aset Tetap	202.275.437.668.014
Properti Investasi	
Properti Investasi	18.209.534.000
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	18.209.534.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(414.024.915)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	17.795.509.085
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	158.976.000
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
Piutang Jangka Panjang Subsidi	
Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.270.375.295
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	7.429.351.295
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(166.987.256)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	7.262.364.039
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	415.877.985.966
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	372.389.328.080
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Dana Jangka Panjang	
Aset Lain-lain	903.852.127.053
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Aset Lainnya yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	1.692.119.441.099
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(404.498.437.002)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(142.837.851.812)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	1.144.783.152.285
JUMLAH ASET	210.640.145.945.878
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
Utang kepada Pihak Ketiga	530.991.318.252
Utang Bunga	
Utang Subsidi	
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	
Utang Transfer	4.036.106.800.863
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	198.451.429.597
Pendapatan Diterima Dimuka	61.970.091.651
Pendapatan Yang Ditangguhkan	
Utang Kepada KUN	
Utang Kepada RPL	
Utang Jangka Pendek Lainnya	124.908.686
Hibah Yg Belum Disahkan	1.396.859.486
Uang Muka Rekening Khusus	
Uang Muka	
Uang Muka Dari KPPN	656.462.268
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.829.697.870.803
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	1.755.226
Utang Jangka Panjang Subsidi	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.755.226
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Kewajiban Konsesi Jasa	1.466.227.147.170
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	1.466.227.147.170
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1.466.228.902.396
JUMLAH KEWAJIBAN	6.295.926.773.199
EKUITAS	204.344.219.172.679
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	210.640.145.945.878

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
EKUITAS AWAL	205.235.986.767.361
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	205.235.986.767.361
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(27.606.042.059.700)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	6.930.068.721
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	593.692.776.182
Koreksi Atas Reklasifikasi	3.528.102.325
Koreksi Atas Transaksi BMN Lainnya	
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	(4.977.863.488.225)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI	(4.373.712.540.997)
EKUITAS	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	31.087.987.006.015
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(891.767.594.682)
EKUITAS AKHIR	204.344.219.172.679

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	8.891.443.798.409
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	8.520.481.131.139
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	3.184.147.520.098
Pendapatan Cukai	420.823.000
Pendapatan Pajak Lainnya	386.291.732.925
Pendapatan Bea Masuk	165.372.358.459
Pendapatan Bea Keluar	167.722.102.000
Pendapatan Pajak Lain-lain	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	21.315.879.466.030
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Penerimaan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara	
Dipisahkan (KND)	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	877.751.355.570
Pendapatan Badan Layanan Umum	2.173.063.035.034
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3.050.814.390.604
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	(1.396.859.486)
Jumlah Pendapatan Hibah	(1.396.859.486)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	24.365.296.997.148
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	6.710.381.647.381
Beban Persediaan	1.017.226.276.412
Beban Barang dan Jasa	4.315.494.806.427
Beban Pemeliharaan	1.028.236.943.414
Beban Perjalanan Dinas	739.174.887.609
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.165.821.803.565
Beban Bunga	
Beban Subsidi	
Beban Hibah	
Beban Bantuan Sosial	31.456.763.356
Beban Transfer	31.718.462.135.460
Beban Lain-lain	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.058.404.651.473
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	137.812.914.916
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	51.922.472.830.013
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27.557.175.832.865)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.063.663.127
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	70.364.957.143
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(63.301.294.016)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	51.898.957.395
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37.463.890.214
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	14.435.067.181
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(48.866.226.835)
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(27.606.042.059.700)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	8.716.219.211.034
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	7.749.874.422.029
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	1.397.613.994.201
e. Pendapatan Cukai	420.823.000
f . Pendapatan Pajak Lainnya	170.590.263.522
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	342.865.776.865
Total Penerimaan Perpajakan	18.377.584.490.651
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
c. Pendapatan PNBP Lainnya	1.640.808.604.282
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	2.096.565.822.362
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.737.374.426.644
3. Penerimaan Hibah	
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	22.114.958.917.295
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	6.001.221.949.015
2. Belanja Barang dan Jasa	8.248.137.781.696
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
4. Belanja Subsidi	
5. Belanja hibah	
6. Belanja Bantuan Sosial	28.729.564.000
7. Belanja Lain-lain	
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	3.909.641.035.000
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.292.674.697.000
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	178.298.800
11. Dana Alokasi Umum	13.353.438.188.695
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	1.400.771.910.611
13. Transfer Dana Otonomi Khsus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	239.906.026.500
14. Transfer Lainnya	4.184.931.404.096
15. Dana Desa	2.592.619.709.200
16. Hibah Kepada Daerah	
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	47.252.250.564.613
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	(25.137.291.647.318)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	6.979.376.127
2. Penerimaan Kembali Investasi	
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	6.979.376.127
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	5.843.518.966.543
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penyertaan Modal Negara	
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	5.843.518.966.543
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(5.836.539.590.416)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	

II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	(84.759.105.662)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	(84.759.105.662)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(31.058.590.343.396)
Penggunaan SAL	
Penyesuaian Pembukuan	(1.536.369.923)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(31.060.126.713.319)
SALDO AWAL KAS	1.202.999.373.006
SALDO AKHIR KAS	(29.857.127.340.313)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(29.857.127.340.313)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(30.973.831.237.734)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(30.973.831.237.734)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	
Total Penyesuaian SAL (A.II)	
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	(30.973.831.237.734)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
PENDAPATAN - LRA	49.495.422.269.094
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	11.105.542.439.745
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.205.521.921.109
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	317.828.862.604
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	431.349.919.200
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	2.150.841.736.832
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	38.188.498.376.956
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	34.776.058.380.550
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	2.889.595.828.930
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	464.535.582.727
Bantuan Keuangan - LRA	58.308.584.749
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	201.381.452.393
Pendapatan Hibah - LRA	131.693.373.879
Dana Darurat - LRA	
Pendapatan Lainnya - LRA	69.688.078.514
BELANJA	49.410.046.714.456
BELANJA OPERASI	32.954.374.278.820
Belanja Pegawai	16.421.476.150.742
Belanja Barang dan Jasa	14.081.064.562.322
Belanja Bunga	34.225.157.897
Belanja Subsidi	31.729.691.575
Belanja Hibah	2.320.268.772.284
Belanja Bantuan Sosial	65.609.944.000
BELANJA MODAL	12.221.707.836.866
Belanja Modal Tanah	45.063.291.583
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.868.555.192.071
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.339.525.183.616
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.575.779.549.088
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	243.798.215.878
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	
Belanja Modal Aset Lainnya	56.160.047.153
Belanja Modal BLUD	92.826.357.476
BELANJA TAK TERDUGA	12.542.184.560
Belanja Tak Terduga	12.542.184.560
TRANSFER	4.221.422.414.210
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	4.221.422.414.210
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	4.221.422.414.210
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT LRA	85.375.554.638
PEMBIAYAAN	2.485.906.031.374
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.858.365.629.905
Penggunaan SiLPA	2.758.262.429.905
Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Pinjaman Dalam Negeri	
Penerimaan Kembali Piutang	103.200.000
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
Pinjaman Luar Negeri	
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	372.459.598.531
Pembentukan Dana Cadangan	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	43.798.311.793
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	328.661.286.738
Pemberian Pinjaman Daerah	
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	2.571.281.586.013
--	-------------------

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2024
ASET	121.377.761.232.019
ASET LANCAR	6.496.174.009.885
Kas dan Setara Kas	2.573.455.170.305
Investasi Jangka Pendek	76.377.561.000
Piutang Pendapatan	3.936.906.492.588
Piutang Lainnya	51.798.359.285
Penyisihan Piutang	(1.039.163.160.654)
Beban Dibayar Dimuka	41.209.448.092
Persediaan	855.590.139.269
Aset Untuk Dikonsolidasikan	
INVESTASI JANGKA PANJANG	12.933.238.867.565
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	388.603.437
Investasi Jangka Panjang Permanen	12.932.850.264.128
ASET TETAP	95.217.343.062.609
Tanah	25.509.457.062.149
Peralatan dan Mesin	18.598.862.338.725
Gedung dan Bangunan	30.198.864.658.107
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	92.307.808.123.210
Aset Tetap Lainnya	2.692.838.064.940
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.893.281.034.817
Akumulasi Penyusutan	(75.983.768.219.339)
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	6.731.005.291.960
Tagihan Jangka Panjang	112.423.233.816
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	65.357.397.148
Aset Tidak Berwujud	333.807.283.143
Aset Lain-lain	6.219.417.377.853
KEWAJIBAN	2.992.903.492.067
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.704.869.143.115
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.156.023.442
Utang Bunga	1.778.651.079
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	90.985.397.604
Pendapatan Diterima Dimuka	29.436.162.775
Utang Belanja	2.417.555.795.831
Utang Jangka Pendek Lainnya	158.957.112.384
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	288.034.348.952
Utang Dalam Negeri	288.034.348.952
Utang Jangka Panjang Lainnya	
EKUITAS	118.384.857.739.952

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
EKUITAS AWAL	135.576.722.539.303
Surplus/Defisit-LO	3.530.493.797.039
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(232.896.890.780)
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	
Koreksi Nilai Persediaan	(611.535.940)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	(947.777.905)
Koreksi Lainnya	(231.337.576.935)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	138.874.319.445.562

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
PENDAPATAN - LO	48.530.013.972.933
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	11.055.597.139.626
Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.329.325.001.472
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	328.890.035.257
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	325.684.500.721
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	2.071.697.602.175
PENDAPATAN TRANSFER - LO	35.871.055.605.091
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	33.347.944.005.805
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	239.906.026.500
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	491.269.495.829
Bantuan Keuangan - LO	1.791.936.076.956
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	1.603.361.228.217
Pendapatan Hibah - LO	939.129.447.488
Dana Darurat - LO	
Pendapatan Lainnya - LO	664.231.780.729
BEBAN	45.289.204.227.462
BEBAN OPERASI - LO	41.408.646.917.582
Beban Pegawai - LO	16.408.681.804.426
Beban Barang dan Jasa	13.766.341.849.742
Beban Bunga	33.784.706.229
Beban Subsidi	28.504.026.949
Beban Hibah	2.825.674.739.961
Beban Bantuan Sosial	92.349.466.590
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.104.218.709.434
Beban Penyisihan Piutang	127.754.283.510
Beban Lain-lain	21.337.330.741
BEBAN TRANSFER	3.880.557.309.879
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	290.196.879.539
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.665.272.064.310
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.925.088.366.031
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	3.240.809.745.471
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	393.157.256.521
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	131.361.109.060
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	261.796.147.461
DEFISIT NON OPERASIONAL	101.101.882.655
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	66.837.068.721
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	34.264.813.933
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	292.055.373.866
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3.532.865.119.338
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
Pendapatan Luar Biasa - LO	
BEBAN LUAR BIASA	2.371.322.299
Beban Luar Biasa	2.371.322.299
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	(2.371.322.299)
SURPLUS/DEFISIT-LO	3.530.493.797.039

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	(8.205.521.921.109)
Penerimaan Retribusi Daerah	(317.828.862.604)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(431.349.919.200)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(2.150.841.736.832)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(4.459.579.334.767)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(9.493.114.798.111)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(14.816.824.522.335)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(6.006.539.725.337)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	
Penerimaan Dana Penyesuaian	
Penerimaan Hibah	(131.693.373.879)
Penerimaan Dana Darurat	
Penerimaan Lainnya	(69.688.078.514)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
Jumlah Arus Masuk Kas	(46.082.982.272.688)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	16.421.476.150.742
Pembayaran Barang	14.081.064.562.322
Pembayaran Bunga	34.225.157.897
Pembayaran Subsidi	31.729.691.575
Pembayaran Beban Hibah	2.320.268.772.284
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	65.609.944.000
Pembayaran Tak Terduga	12.542.184.560
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
Jumlah Arus Keluar Kas	32.966.916.463.380
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(79.049.898.736.069)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	(100.000.000.000)
Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan Aset Tetap Lainnya	
Penjualan Aset Lainnya	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Masuk Kas	(100.000.000.000)

Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	
Perolehan Tanah	45.063.291.583
Perolehan Peralatan dan Mesin	1.868.555.192.071
Perolehan Gedung dan Bangunan	2.339.525.183.616
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.575.779.549.088
Perolehan Aset Tetap Lainnya	243.798.215.878
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	43.798.311.793
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	12.116.519.744.029
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(12.116.519.744.029)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	132.642.917.722
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	92.840.663.809
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	103.177.705.207
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Keluar Kas	328.661.286.738
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(328.661.286.738)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	(91.595.079.766.836)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
Saldo Akhir Kas	(91.595.079.766.836)

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Audited) DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Sub Total	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
Sub Total	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4)	
Lain-lain	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

LAMPIRAN I
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
311111- SAL	49.637.386.213.387	0	49.637.386.213.387
313121- Diterima dari Entitas Lain	508.657.906.895	21.567.167.016.680	22.075.824.923.575
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(52.322.082.100.510)	(49.509.995.415.984)	(101.832.077.516.494)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(7.659.577.639)	(7.659.577.639)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(540.000)	(540.000)
113311- Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	305.900.000.000	(259.900.000.000)	46.000.000.000
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(3.722.417.277.811)	(3.722.417.277.811)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(473.510.972.166)	(473.510.972.166)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(71.902.131.104)	(71.902.131.104)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(985.074.423.782)	(985.074.423.782)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(198.744.633.871)	(198.744.633.871)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(2.070.406.815.452)	(2.070.406.815.452)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(137.319.189.695)	(137.319.189.695)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(1.224.059.732.460)	(1.224.059.732.460)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(348.504.429)	(348.504.429)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(8.233.273.214.596)	(8.233.273.214.596)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(255.961.143.107)	(255.961.143.107)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(2.341.935.709)	(2.341.935.709)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(13.762.836.798)	(13.762.836.798)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(2.051.026)	(2.051.026)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.284.485)	(1.284.485)
111929- Setara kas Lainnya - BLU	70.000.000.000	8.651.099.965	78.651.099.965
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(269.661.531.047)	(269.661.531.047)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(103.658.172.103)	(103.658.172.103)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(1.404.255.892.789)	(1.404.255.892.789)
411316- Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	(1.305.481.181.938)	(1.305.481.181.938)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(6.865.000)	(6.865.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(413.958.000)	(413.958.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(4.774.918.226)	(4.774.918.226)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	(147.000.158.459)	(147.000.158.459)
212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(48.921.477.315)	(16.175.980.804)	(65.097.458.119)
114111- Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	1.541.839	298.328	1.840.167
114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9.927.839.302	5.419.456.329	15.347.295.631
115111- Piutang PPh Minyak Bumi	348.165.257	(265.201.970)	82.963.287
115121- Piutang PPh Pasal 21	43.394.410.033	(6.959.054.282)	36.435.355.751
115122- Piutang PPh Pasal 22	6.492.286.367	(1.646.892.821)	4.845.393.546
115123- Piutang PPh Pasal 22 Impor	32.091.339	(16.801.809)	15.289.530
115124- Piutang PPh Pasal 23	39.409.340.519	20.882.837.392	60.292.177.911
115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	104.139.012.227	(11.397.608.940)	92.741.403.287
115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	214.848.942.182	160.992.123.979	375.841.066.161
115127- Piutang PPh Pasal 26	322.314.390	(250.692.202)	71.622.188
115128- Piutang PPh Final	92.358.542.188	(17.190.204.453)	75.168.337.735
115131- Piutang PPN Dalam Negeri	640.487.289.913	(9.750.980.880)	630.736.309.033
115132- Piutang PPN Impor	353.664.542	(171.593.957)	182.070.585
115191- Piutang Bea Masuk Antidumping	0	3.000	3.000
115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	243.046.986.928	17.057.239.402	260.104.226.330
115212- Piutang Lainnya	1.043.659.750	4.982.693.654	6.026.353.404
115239- Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	0	1.697.387.651	1.697.387.651
116111- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Migas	(90.138.824)	48.657.180	(41.481.644)
116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	(216.100.899.116)	(1.559.972.618)	(217.660.871.734)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(49.519.262)	(49.519.262)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(215.067.228.763)	(215.067.228.763)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(136.809.072.000)	(136.809.072.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(855.884.000)	(855.884.000)
412114- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	(11.854.309.459)	(11.854.309.459)
412119- Pendapatan Pabean Lainnya	0	(144.000)	(144.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(167.722.102.000)	(167.722.102.000)
591111- Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1.220.161.606.647	1.220.161.606.647
592112- Belanja Amortisasi Hak Cipta	0	2.858	2.858
592114- Belanja Amortisasi Paten	0	756.325	756.325
592115- Belanja Amortisasi Software	0	21.915.759.588	21.915.759.588

592116- Belanja Amortisasi Lisensi	0	6.122.057.569	6.122.057.569
592117- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	1.771.389.170	1.771.389.170
593111- Belanja Persediaan konsumsi	0	409.993.483.278	409.993.483.278
594111- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PPh Migas	0	(48.657.180)	(48.657.180)
596111- Beban Pelepasan Aset	0	70.364.957.143	70.364.957.143
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	455.918.742.000	455.918.742.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	20.184.284.000	20.184.284.000
571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	751.984.000	751.984.000
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	24.057.000.000	24.057.000.000
132111- Peralatan dan Mesin	14.942.176.925.648	1.093.748.841.359	16.035.925.767.007
133111- Gedung dan Bangunan	13.463.069.003.863	909.889.087.046	14.372.958.090.909
135111- Aset Tetap Renovasi	532.822.452.696	(74.651.735.718)	458.170.716.978
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	1.090.032.958.000	1.090.032.958.000
152111- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	43.911.328	(4.935.328)	38.976.000
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	14.300.740	8.949.350	23.250.090
111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	246.624.813	510.006.433	756.631.246
111911- Kas dan Bank - BLU	932.891.409.178	288.461.196.372	1.221.352.605.550
491111- Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	(244.041.534)	(244.041.534)
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	1.009.624.679.528	1.009.624.679.528
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	22.837.846	22.837.846
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	21.323.919.339	21.323.919.339
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	187.462.681.700	187.462.681.700
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	24.699.612.887	24.699.612.887
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	52.148.829.470	52.148.829.470
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	1.046.423.600	1.046.423.600
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	31.500.000	31.500.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	802.000.000	802.000.000
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	323.591.889.245	323.591.889.245
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	104.136.301.980	104.136.301.980
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	21.517.485.360	21.517.485.360
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	87.311.786.254	87.311.786.254
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	1.231.631	1.231.631
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	5.524.418.220	5.524.418.220
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	1.555.707.224	1.555.707.224
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	2.696.364.850	2.696.364.850
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	372.340.000	372.340.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	558.036.124	558.036.124
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	4.206.720.906	4.206.720.906
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	13.441.483.800	13.441.483.800
511184- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri	0	37.950.000	37.950.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	3.067.640.000	3.067.640.000
511194- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	0	50.880.000	50.880.000
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.212.651.330.590	1.212.651.330.590
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	20.220.291	20.220.291
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	86.231.546.280	86.231.546.280
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	27.512.750.740	27.512.750.740
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	47.121.389.468	47.121.389.468
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.801.532.291	1.801.532.291
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	12.533.250.834	12.533.250.834
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	101.133.936.973	101.133.936.973
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	626.469.027.250	626.469.027.250
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	660.300.000	660.300.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	2.887.850.000	2.887.850.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	1.671.993.875	1.671.993.875
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	5.502.583.774	5.502.583.774
524219- Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	206.802.700	206.802.700
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	694.148.337.451	694.148.337.451
525112- Belanja Barang	0	169.572.242.044	169.572.242.044
525114- Belanja Pemeliharaan	0	66.724.706.447	66.724.706.447
525115- Belanja Perjalanan	0	41.171.920.600	41.171.920.600
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	202.704.811.201	202.704.811.201
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	484.550.531.000	484.550.531.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	2.642.235.912.000	2.642.235.912.000

612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	26.801.475.000	26.801.475.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	4.542.802.104.000	4.542.802.104.000
612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	0	8.633.608.000	8.633.608.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	633.900.000	633.900.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	704.084.000	704.084.000
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	67.980.000	67.980.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	3.017.100.000	3.017.100.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	15.289.990.700	15.289.990.700
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	69.546.150	69.546.150
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	24.091.999.350	24.091.999.350
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	26.890.203.376	26.890.203.376
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	1.228.319.854	1.228.319.854
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	85.402.722	85.402.722
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	106.260.000	106.260.000
512111- Belanja Uang Honor Tetap	0	378.800.000	378.800.000
512211- Belanja Uang Lembur	0	22.410.753.880	22.410.753.880
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	1.011.769.698.253	1.011.769.698.253
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	304.925.993.437	304.925.993.437
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	174.850.046.062	174.850.046.062
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	6.280.423.553	6.280.423.553
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	2.624.211.206	2.624.211.206
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	78.766.729.748	78.766.729.748
521211- Belanja Bahan	0	331.396.759.293	331.396.759.293
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	854.965.909.086	854.965.909.086
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	822.694.685.272	822.694.685.272
522111- Belanja Langganan Listrik	0	124.859.870.811	124.859.870.811
522113- Belanja Langganan Air	0	11.227.083.461	11.227.083.461
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	19.759.065.802	19.759.065.802
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	140.188.948.892	140.188.948.892
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	4.468.615.852	4.468.615.852
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	159.300.053.351	159.300.053.351
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	820.394.811	820.394.811
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	339.076.173.838	339.076.173.838
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	131.374.439.066	131.374.439.066
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	2.654.021.457	2.654.021.457
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	685.439.674	685.439.674
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	54.534.022.940	54.534.022.940
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(1.277.969.609.465)	(1.277.969.609.465)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(717.731.534.848)	(717.731.534.848)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(33.087.196.641)	(33.087.196.641)
424213- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	(1.318.419.000)	(1.318.419.000)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(18.534.743.381)	(18.534.743.381)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(8.492.896.273)	(8.492.896.273)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(39.350.627.079)	(39.350.627.079)
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	403.239.468.000	403.239.468.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	175.134.800	175.134.800
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	10.345.103.354.000	10.345.103.354.000
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(2.290.925.000)	(2.290.925.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(193.175.000)	(193.175.000)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.700.183.271)	(3.700.183.271)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(3.010.000)	(3.010.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(46.917.396.618)	(46.917.396.618)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(24.341.400.000)	(24.341.400.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(207.000.000)	(207.000.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(4.564.650.000)	(4.564.650.000)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(919.939.700)	(919.939.700)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(7.945.000)	(7.945.000)

425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(250.540.000)	(250.540.000)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(12.239.269)	(12.239.269)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(128.000.000)	(128.000.000)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(6.091.334.700)	(6.091.334.700)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(1.498.715.518)	(1.498.715.518)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(11.673.618.606)	(11.673.618.606)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(4.609.175.785)	(4.609.175.785)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(12.650.346.447)	(12.650.346.447)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(211.329.050.215)	(211.329.050.215)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(28.481.447.415)	(28.481.447.415)
226112- Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pembayaran Kepada Mitra	(1.439.682.593.997)	(26.544.553.173)	(1.466.227.147.170)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(166.825.292)	(166.825.292)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(24.712.159.377)	(24.712.159.377)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(276.952.000)	(276.952.000)
425245- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	0	(257.283.978)	(257.283.978)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(2.431.892.549)	(2.431.892.549)
425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	(944.757.347)	(944.757.347)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(1.257.925.900)	(1.257.925.900)
425252- Pendapatan Perizinan Pertanian	0	(5.650.000)	(5.650.000)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(10.050.000)	(10.050.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(3.130.515.145)	(3.130.515.145)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(13.424.100.000)	(13.424.100.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(11.681.190.000)	(11.681.190.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(55.435.700.000)	(55.435.700.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(4.592.380.000)	(4.592.380.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(61.617.975.000)	(61.617.975.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(29.981.800.000)	(29.981.800.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(454.250.000)	(454.250.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(37.330.000)	(37.330.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(641.338.000)	(641.338.000)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(6.843.686.127)	(6.843.686.127)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(11.857.778.500)	(11.857.778.500)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(3.906.416.000)	(3.906.416.000)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(2.020.777.672)	(2.020.777.672)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(1.783.135.000)	(1.783.135.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(2.542.450.000)	(2.542.450.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(9.597.500.000)	(9.597.500.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(7.647.030.000)	(7.647.030.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(5.634.825.000)	(5.634.825.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(26.119.858.997)	(26.119.858.997)
425282- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(113.845.800)	(113.845.800)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(4.269.419.000)	(4.269.419.000)
425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	(655.337.000)	(655.337.000)
425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	0	(281.941.000)	(281.941.000)

425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(150.193.936)	(150.193.936)
212112- Belanja barang yang masih harus dibayar	(19.984.547.079)	1.176.504.259	(18.808.042.820)
212113- Belanja modal yang masih harus dibayar	(580.671.965)	580.671.965	0
212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(103.529.105.955)	(33.039.296.375)	(136.568.402.330)
212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(398.474.067.403)	96.817.700.555	(301.656.366.848)
166111- Aset Lain-lain	0	1.120.000.000	1.120.000.000
166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	903.722.206.485	(104.023.395.220)	799.698.811.265
166211- Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	0	3.335.819.864	3.335.819.864
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	288.190.714	288.190.714
522141- Belanja Sewa	0	99.249.088.196	99.249.088.196
522151- Belanja Jasa Profesi	0	52.026.952.130	52.026.952.130
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	1.298.623.796	(514.686.898)	783.936.898
116791- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(63.408.999)	(5.064.441)	(68.473.440)
117111- Barang Konsumsi	260.793.910.334	10.339.384.328	271.133.294.662
117112- Amunisi	477.753.510.633	410.703.521.724	888.457.032.357
117113- Bahan untuk Pemeliharaan	3.500.296.444	(1.437.795.403)	2.062.501.041
117114- Suku Cadang	76.178.012.827	(9.742.343.014)	66.435.669.813
117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	177.292.262.824	70.323.310.948	247.615.573.772
117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4.397.669.178	(1.792.124.087)	2.605.545.091
117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	36.452.591.630	(24.841.741.030)	11.610.850.600
117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.113.710.905.739	40.103.354.390	1.153.814.260.129
117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	651.615.649	(12.007.549)	639.608.100
117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	943.492.000	(943.492.000)	0
117131- Bahan Baku	66.201.446.088	(29.400.070.787)	36.801.375.301
117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	69.766.180	(64.092.970)	5.673.210
117199- Persediaan Lainnya	51.460.446.274	(687.728.751)	50.772.717.523
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(64.027.448.764)	(64.027.448.764)
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	6.647.779.356	6.647.779.356
593112- Belanja Persediaan amunisi	0	44.225.369.663	44.225.369.663
593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	10.681.609.873	10.681.609.873
593114- Belanja Persediaan suku cadang	0	106.919.289.338	106.919.289.338
593122- Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	150.978.324.286	150.978.324.286
593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	15.112.245.312	15.112.245.312
593124- Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	40.012.532.543	40.012.532.543
593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	383.794.777.139	383.794.777.139
593126- Belanja Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	4.665.217.549	4.665.217.549
593127- Belanja Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	1.036.719.100	1.036.719.100
593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	33.888.346.561	33.888.346.561
593131- Belanja Persediaan bahan baku	0	108.043.890.588	108.043.890.588
593141- Belanja Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	169.369.810	169.369.810
593149- Belanja persediaan lainnya	0	454.794.163.073	454.794.163.073
594112- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas	0	64.964.432.342	64.964.432.342
594113- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN	0	92.592.374.723	92.592.374.723
134111- Jalan dan Jembatan	29.330.223.014.540	1.467.776.735.385	30.797.999.749.925
134113- Jaringan	4.391.031.764.725	2.483.185.425	4.393.514.950.150
135121- Aset Tetap Lainnya	91.184.954.206	4.182.852.451	95.367.806.657
136111- Konstruksi Dalam pengerjaan	5.408.298.638.877	(85.310.377.533)	5.322.988.261.344
137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.441.957.410.727)	(1.145.562.902.464)	(12.587.520.313.191)
137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.716.217.020.390)	(391.617.797.564)	(3.107.834.817.954)
591211- Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	415.730.879.129	415.730.879.129
591311- Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1.544.108.705.370	1.544.108.705.370
591312- Belanja Penyusutan Irigasi	0	1.486.426.173.990	1.486.426.173.990
591313- Belanja Penyusutan Jaringan	0	154.112.414.799	154.112.414.799

591411- Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	7.232.563.919	7.232.563.919
219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	(7.628.096.563)	(71.483.539.114)	(79.111.635.677)
219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	(224.669.978.826)	105.391.895.650	(119.278.083.176)
219114- Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	(83.348.695.744)	83.286.985.000	(61.710.744)
219116- Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	(103.029.594)	103.029.594	0
219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(4.102.947.457)	(12.350.494.104)	(16.453.441.561)
219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	(15.725.714.814)	(8.616.722.115)	(24.342.436.929)
114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	7.424.675.075	43.788.771.145	51.213.446.220
114115- Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	4.340.022.148	(4.340.022.148)	0
114213- uang muka belanja modal (prepayment)	0	60.280.000.000	60.280.000.000
115142- Piutang PPnBM Impor	492.321.416	(492.321.416)	0
115153- Piutang PBB Perkebunan	117.417.386.278	(65.300.343.206)	52.117.043.072
115154- Piutang PBB Perhutanan	3.755.999.165	(2.986.229.648)	769.769.517
115155- Piutang PBB Pertambangan	201.050.227.735	516.745.836.463	717.796.064.198
115159- Piutang PBB Lainnya	5.271.975.553	(565.336.051)	4.706.639.502
115165- Piutang Bea Materai	894.954.000	(108.000)	894.846.000
219511- Uang Muka dari KPPN	(656.462.268)	0	(656.462.268)
115172- Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	1.687.142.500	(1.687.142.500)	0
115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh	20.698.797.175	190.585.500.802	211.284.297.977
115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN	26.331.160.123	7.382.735.778	33.713.895.901
115181- Piutang Bea masuk	7.262.611.231	(7.217.170.231)	45.441.000
115183- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	4.129.662.310	(3.967.982.310)	161.680.000
115184- Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	593.586.000	(593.586.000)	0
115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	118.225.575.088	57.095.647.932	175.321.223.020
115712- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	6.123.313.144	(174.135.155)	5.949.177.989
115719- Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	1.155.710.000	(1.155.710.000)	0
115812- Piutang Sewa Gedung - BLU	0	12.833.333	12.833.333
115891- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	263.645.895	(99.994.120)	163.651.775
116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas	(224.084.663.034)	(14.610.013.213)	(238.694.676.247)
116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN	(348.444.663.123)	(6.618.864.434)	(355.063.527.557)
116114- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPnBM	(492.321.416)	492.321.416	0
116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(156.174.190.639)	77.973.317.595	(78.200.873.044)
116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	(34.005.888.076)	(6.200.322.698)	(40.206.210.774)
116118- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(1.944.846.891)	1.943.811.271	(1.035.620)
116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(5.192.797)	(24.938.972)	(30.131.769)
116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(3.682.594.288)	(2.019.300.046)	(5.701.894.334)
116612- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(1.383.189.179)	76.611.225	(1.306.577.954)
116619- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(5.778.550)	385.975	(5.392.575)
116713- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	(64.167)	(64.167)
594115- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB	0	(62.543.233.060)	(62.543.233.060)
594117- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	0	25.420.162.750	25.420.162.750
594118- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	(49.371.730)	(49.371.730)
594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	13.598.721.860	13.598.721.860
594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	28.029.407	28.029.407
594612- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	534.780	534.780
594619- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	5.392.575	5.392.575
594713- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	64.167	64.167
137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(18.105.267.975.184)	(1.437.489.992.842)	(19.542.757.968.026)
137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi	(8.597.557.094.160)	(1.485.204.778.035)	(10.082.761.872.195)

137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan	(673.091.079.081)	(153.450.352.229)	(826.541.431.310)
137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(40.524.829.697)	25.509.805.549	(15.015.024.148)
152211- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	120.000.000	0	120.000.000
155111- Piutang Jangka Panjang lainnya	7.370.375.295	(100.000.000)	7.270.375.295
612413- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	0	11.925.213.000	11.925.213.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	34.433.541.000	34.433.541.000
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	939.414.000	939.414.000
156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(219.558)	24.678	(194.880)
156411- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(120.000.000)	0	(120.000.000)
162121- Hak Cipta	200.000	0	200.000
162141- Paten	15.126.500	0	15.126.500
162151- Software	101.755.001.152	74.201.879.429	175.956.880.581
162161- Lisensi	30.299.584.413	62.508.446.788	92.808.031.201
162191- Aset Tak Berwujud Lainnya	57.102.955.306	415.242.838	57.518.198.144
162171- Hasil Kajian/Penelitian	79.438.867.256	10.140.682.284	89.579.549.540
163119- Dana lainnya	5.046.334.012	572.575.793	5.618.909.805
219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	(16.091.186)	0	(16.091.186)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(1.480.088.000)	(1.480.088.000)
391113- Koreksi Nilai Persediaan	0	(6.930.068.721)	(6.930.068.721)
115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	163.438.057	(69.034.601)	94.403.456
116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(91.628.974)	345.171	(91.283.803)
156911- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(47.292.376)	500.000	(46.792.376)
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	4.494.350.000	4.494.350.000
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	93.560.016.290	93.560.016.290
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	134.998.341.540	134.998.341.540
169121- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	(6.395.982.000)	(6.395.982.000)
169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(485.934.665.636)	87.832.210.634	(398.102.455.002)
169312- Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(7.145)	(2.858)	(10.003)
169314- Akumulasi Amortisasi Paten	(3.403.463)	(756.325)	(4.159.788)
169315- Akumulasi Amortisasi Software	(78.599.493.021)	(21.672.869.519)	(100.272.362.540)
169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi	(3.391.132.464)	(9.247.479.909)	(12.638.612.373)
169317- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(26.550.958.761)	(2.610.073.491)	(29.161.032.252)
595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	1.377.350.329	1.377.350.329
411317- Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	(37.063.293.457)	(37.063.293.457)
594611- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	3.135.581.524	3.135.581.524
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(1.118.211.534)	(1.118.211.534)
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	56.449.197.309	56.449.197.309
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(16.819.649.768)	(16.819.649.768)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(37.900.679.164)	(37.900.679.164)
117141- Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	1.355.578.000	(339.870.000)	1.015.708.000
313211- Transfer Keluar	0	1.059.565.972.377	1.059.565.972.377
391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(597.795.488.424)	(597.795.488.424)
491421- Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	(23.799.954.766)	(23.799.954.766)
591511- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	160.596.235.383	160.596.235.383
596211- Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	287.730.187	287.730.187
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	1.703.641.440.012	1.703.641.440.012
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	77.328.421.000	77.328.421.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.739.259.189.000	1.739.259.189.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	253.291.682.707	253.291.682.707
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	15.618.000.000	15.618.000.000
592222- Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	8.720.474.446	8.720.474.446
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	0	(760.940.000)	(760.940.000)

Pelatihan			
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(3.261.114.742)	(3.261.114.742)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.863.220.000)	(1.863.220.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(14.372.861.000)	(14.372.861.000)
117129- Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	276.398.172.747	(253.941.943.998)	22.456.228.749
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(5.470.000)	(5.470.000)
662111- Belanja Dana Desa	0	2.590.922.321.549	2.590.922.321.549
643111- Insentif Fiskal	0	239.906.026.500	239.906.026.500
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	374.308.687.678	374.308.687.678
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	90.385.620.750	90.385.620.750
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	5.154.339.391	5.154.339.391
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	100.578.921.000	100.578.921.000
391119- Koreksi Lainnya	1.719.203.065.093	4.868.765.526.246	6.587.968.591.339
391141- Setoran Surplus BLU	0	223.119.920	223.119.920
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	445.695.920.100	445.695.920.100
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	1.400.771.910.611	1.400.771.910.611
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	32.499.089.000	32.499.089.000
391121- Ekuitas Transaksi Lainnya	0	(572.575.793)	(572.575.793)
391131- Pengesahan Hibah Langsung	0	(1.417.697.322.436)	(1.417.697.322.436)
391132- Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	46.166.397.322	46.166.397.322
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	1.319.823.975	1.319.823.975
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	1.539.137.000	1.539.137.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	87.778.760.000	87.778.760.000
115741- Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	1.282.726.700	0	1.282.726.700
116641- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	(6.413.633)	(634.949.716)	(641.363.349)
219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU	(22.747.789.720)	1.573.576.559	(21.174.213.161)
311315- Penyesuaian SAL BLU	0	416.369.923	416.369.923
424231- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa	0	(119.000.000)	(119.000.000)
424241- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	0	(356.486.684)	(356.486.684)
424242- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	0	(1.696.055.039)	(1.696.055.039)
424243- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang / Jasa	0	(384.000)	(384.000)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(13.409.517.548)	(13.409.517.548)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(3.162.121.920)	(3.162.121.920)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(21.700.000)	(21.700.000)
424916- Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(28.988.721)	(28.988.721)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(35.772.625.295)	(35.772.625.295)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(833.802.157)	(833.802.157)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(5.331.569.198)	(5.331.569.198)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(6.570.388.821)	(6.570.388.821)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(995.282.800)	(995.282.800)
424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	(5.797.730.405)	(5.797.730.405)
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	(2.533.044.480)	(2.533.044.480)
594651- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	0	634.949.716	634.949.716
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(4.852.142.291)	(4.852.142.291)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(1.793.629.836)	(1.793.629.836)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(9.446.652.324)	(9.446.652.324)

425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(263.965.000)	(263.965.000)
425211- Pendapatan Paspor	0	(41.454.650.000)	(41.454.650.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(5.602.750.000)	(5.602.750.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(998.400.000)	(998.400.000)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(8.702.111.950)	(8.702.111.950)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(6.245.000)	(6.245.000)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(417.891.000)	(417.891.000)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(220.925.000)	(220.925.000)
425533- Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	(1.384.203.000)	(1.384.203.000)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(216.760.500)	(216.760.500)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(886.267.990)	(886.267.990)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(16.186.700)	(16.186.700)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.324.079.988)	(2.324.079.988)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(175.000)	(175.000)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(153.829.926)	(153.829.926)
425765- Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	(64.441)	(64.441)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(55.800.000)	(55.800.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(18.141.781.005)	(18.141.781.005)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(6.067.877.078)	(6.067.877.078)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.996.094.920)	(2.996.094.920)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(36.309.695)	(36.309.695)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(40.478.500)	(40.478.500)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(34.827.718.045)	(34.827.718.045)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(24.621.336)	(24.621.336)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(1.419.582.263)	(1.419.582.263)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(6.624.590.973)	(6.624.590.973)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(10.152.573.461)	(10.152.573.461)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(645.361.271)	(645.361.271)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(4.038.085.534)	(4.038.085.534)
111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.004.197.601	3.254.456.941	4.258.654.542
111826- Kas Lainnya di BLU	6.151.777.618	303.619.686	6.455.397.304
166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	74.288.572.296	(175.004.372)	74.113.567.924
169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(936.179.228)	174.504.372	(761.674.856)
212192- Dana Pihak Ketiga	(3.895.889.863)	(4.965.158.272)	(8.861.048.135)
212193- Dana Pihak Ketiga BLU	(178.659.665)	178.659.665	0
218211- Hibah Langsung yang Belum Disahkan	(1.396.859.486)	0	(1.396.859.486)
219963- Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	(16.417.500)	0	(16.417.500)
219964- Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	(92.400.000)	0	(92.400.000)
391118- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	4.102.712.242	4.102.712.242
419999- Pendapatan Pajak lain-lain	0	(620.846.664)	(620.846.664)
439999- Pendapatan Hibah Lain-lain	0	1.396.859.486	1.396.859.486
491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	(31.019.200.698)	(31.019.200.698)
491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(1.702.439.974)	(1.702.439.974)
521723- Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	131.585.506.040	131.585.506.040
592118- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	500.000	500.000
593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.924.502.614	1.924.502.614
594931- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	(129.619)	(129.619)
594991- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	(31.250)	(31.250)
595122- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU	0	32.015.000	32.015.000

596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang	0	35.251.657.413	35.251.657.413
391133- Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(46.772.682.959)	(46.772.682.959)
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	782.500.000	782.500.000
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	878.660.000	878.660.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	3.296.650.000	3.296.650.000
522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	194.257.800	194.257.800
525143- Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	508.527.000	508.527.000
391151- Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	(3.528.102.325)	(3.528.102.325)
595123- Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan – BLU	0	6.874.000	6.874.000
654821- Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0	1.123.000.000	1.123.000.000
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	26.663.376.500	26.663.376.500
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	6.452.083.102	6.452.083.102
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BP KL	(656.462.268)	0	(656.462.268)
399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BLU KL	(654.395.704.589)	0	(654.395.704.589)
399913- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas Hibah KL	(548.603.668.417)	0	(548.603.668.417)
425983- Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye	0	(1.200.000)	(1.200.000)
1150200- Penyisihan Piutang Lainnya	0	-11553528958,03	-11553528958,03
1160100- Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0	3552558239,39	3552558239,39
1160200- Beban Barang Dibayar Dimuka	0	31322532339,85712	31322532339,85712
1160300- Beban Jasa Dibayar Dimuka	0	6334357512,31	6334357512,31
1170100- Persediaan Bahan Pakai Habis	0	762663818246,96	762663818246,96
1110100- Kas di Kas Daerah	0	2291029027259,681	2291029027259,681
1110200- Kas di Bendahara Penerimaan	0	444.185.810	444.185.810
1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1097102147,08	1097102147,08
1110400- Kas di BLUD	0	223342008815,83	223342008815,83
1110500- Kas Lainnya	0	57542846272,66	57542846272,66
1120400- Investasi dalam SBI	0	76.377.561.000	76.377.561.000
1130100- Piutang Pajak Daerah	0	1803776208839,97	1803776208839,97
1130200- Piutang Retribusi	0	71980058033,81	71980058033,81
1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	81309962917,48	81309962917,48
1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	164640590365,94	164640590365,94
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	1.524.077.575.824	1.524.077.575.824
1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	228320635227,62	228320635227,62
1140100- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0	2.403.532.000	2.403.532.000
1140200- Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	4638649426,35	4638649426,35
1140300- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	11454888061,22	11454888061,22
1140400- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	21571131029,781667	21571131029,781667
1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan	0	-1027609631696,265	-1027609631696,265
1170200- Persediaan Bahan/Material	0	34232037679,39	34232037679,39
1170300- Persediaan Barang Lainnya	0	58694283342,43	58694283342,43
1210400- Dana Bergulir	0	976.739.270	976.739.270
1210700- Cadangan Dana Bergulir	0	(588.135.833)	(588.135.833)
1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	12932850264127,9849	12932850264127,9849
1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	-7604513221851,24	-7604513221851,24
1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0	-52563571616216,37	-52563571616216,37
1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	-29761717046,51	-29761717046,51
1510100- Tagihan Penjualan Angsuran	0	526.438.015	526.438.015
1510200- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	111896795801,2	111896795801,2
1520200- Kerjasama Pemanfaatan	0	27856597148,2778	27856597148,2778
1520300- Bangun guna serah	0	37.500.800.000	37.500.800.000
1530100- Goodwill	0	63024480049,89	63024480049,89
1530200- Lisensi dan frenchise	0	11157092196,7	11157092196,7
1530300- Hak Cipta	0	117.400.000	117.400.000
1530500- Aset Tidak Berwujud Lainnya	0	563702475346,36	563702475346,36
1530600- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	-304194164450,2025	-304194164450,2025
1540100- Aset Lain-lain	0	6219417377853,093	6219417377853,093

2110100- Utang Taspen	0	(4.940)	(4.940)
2110200- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0	(25.160.616)	(25.160.616)
2110300- Utang PPh Pusat	0	- 2588618471,70136107 4	-2588618471,701361074
2110400- Utang PPN Pusat	0	-291105528,51889904	-291105528,51889904
2110600- Utang Iuran Wajib Pegawai	0	-7894842,829739889	-7894842,829739889
2110700- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0	-3243239043,01	-3243239043,01
2120100- Utang Bunga kepada Pemerintah	0	-950016018,92	-950016018,92
2120400- Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(828.635.060)	(828.635.060)
2130200- Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	-84706881475,2	-84706881475,2
2130300- Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat	0	-6278516129,04	-6278516129,04
2140100- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0	-30665837,5	-30665837,5
2140200- Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0	-1613039148,731294	-1613039148,731294
2140400- Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0	-27792457789,132375	-27792457789,132375
2150100- Utang Belanja Pegawai	0	-198932962927,4833	-198932962927,4833
2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa	0	-1075405338704,7731	-1075405338704,7731
2150300- Utang Belanja Modal	0	-983220305472,8488	-983220305472,8488
2150500- Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	-107456933316,48	-107456933316,48
2150600- Utang Belanja Lain-lain	0	(52.540.255.409)	(52.540.255.409)
2160200- Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0	(36.043.472.037)	(36.043.472.037)
2160500- Utang Jangka Pendek Lainnya	0	-122913640346,678	-122913640346,678
2210100- Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0	(124.329.128.750)	(124.329.128.750)
2210200- Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	(31.009.653.028)	(31.009.653.028)
2210400- Utang Pemerintah Pusat	0	-132695567174,36	-132695567174,36
3110100- Ekuitas	0	-138874319445559,68	-138874319445559,68
3910100- Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	0	-135576722539303,34	-135576722539303,34
3920100- Koreksi Nilai Persediaan	0	611535940,21	611535940,21
3920200- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	947.777.905	947.777.905
3920300- Koreksi terhadap Ekuitas Lainnya	0	231337576935,14399	231337576935,14399
1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	1893281034817,113	1893281034817,113
1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-15785921664224,973	-15785921664224,973
8121800- Retribusi Terminal - LO	0	(1.061.131.000)	(1.061.131.000)
8121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	0	(615.697.000)	(615.697.000)
8122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	0	(3.060.144.361)	(3.060.144.361)
8122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	0	(583.040.400)	(583.040.400)
8122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	0	-1012872725,34	-1012872725,34
8122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0	-2832378736,44768	-2832378736,44768
8122400- Retribusi Penyebrangan Air - LO	0	(2.877.450.103)	(2.877.450.103)
8122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0	-1891138449,56218616	-1891138449,56218616
8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0	-49010909780,394441	-49010909780,394441
8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	0	(1.275.596.737.684)	(1.275.596.737.684)
8110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	0	(1.162.920.590.375)	(1.162.920.590.375)
8110400- Pajak Air Permukaan - LO	0	-1623265639257,82	-1623265639257,82
8110500- Pajak Rokok - LO	0	-21325238654,05	-21325238654,05
8110600- Pajak Hotel - LO	0	-837894361614,55794	-837894361614,55794
8110700- Pajak Restoran - LO	0	-584130994089,74742	-584130994089,74742
8110800- Pajak Hiburan - LO	0	-83070870105,007936	-83070870105,007936
8110900- Pajak Reklame - LO	0	-68887035189,9924	-68887035189,9924
8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO	0	-923952506973,6573	-923952506973,6573
8111100- Pajak Parkir - LO	0	-38614753635,131977	-38614753635,131977
8111200- Pajak Air Tanah - LO	0	- 11550042935,0954011 9	-11550042935,09540119
8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO	0	-1175525883,1073296	-1175525883,1073296
8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	0	-803312234442,75626	-803312234442,75626
8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	0	-779565420318,50796	-779565420318,50796
8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0	-200310256148,98569	-200310256148,98569
8120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	0	-13854385414,794257	-13854385414,794257
8120400- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO	0	(1.408.824.000)	(1.408.824.000)
8120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	0	-16357614330,46317	-16357614330,46317
8120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0	-8339357633,33	-8339357633,33
8120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	0	-48127174,17	-48127174,17

Kebakaran - LO			
8121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0	(286.641.000)	(286.641.000)
8121100- Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	0	(1.858.238.050)	(1.858.238.050)
8121300- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	0	(16.555.000)	(16.555.000)
8121400- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0	(18.693.177)	(18.693.177)
8121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	0	-12515235788,822578	-12515235788,822578
8121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	0	-4406427083,7	-4406427083,7
8121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0	(208.111.400)	(208.111.400)
8141800- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0	-4653296623,37	-4653296623,37
8141900- Pendapatan Zakat* - LO	0	-1076568192,97	-1076568192,97
8142000- Pendapatan BLUD - LO	0	-1436748011808,27	-1436748011808,27
8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0	-110726899091,26	-110726899091,26
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	-4261011970193,99	-4261011970193,99
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	-8295926288247,01	-8295926288247,01
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	(14.784.466.022.027)	(14.784.466.022.027)
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	(6.006.539.725.337)	(6.006.539.725.337)
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	(239.906.026.500)	(239.906.026.500)
8230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0	-473628272018,45	-473628272018,45
8230200- Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO	0	(17.641.223.811)	(17.641.223.811)
8240100- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0	-1791936076956,37	-1791936076956,37
8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0	-864936431871,08	-864936431871,08
8310200- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0	-33121384173,61	-33121384173,61
8310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0	-27997407375,24	-27997407375,24
8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0	(13.074.224.068)	(13.074.224.068)
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	-664231780728,7596	-664231780728,7596
9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0	5891135494836,276	5891135494836,276
9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	0	451958354432,1032	451958354432,1032
9120100- Beban Bahan Pakai Habis	0	3413439995887,01	3413439995887,01
8410100- Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	-131361109059,71	-131361109059,71
8430100- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	-261796147461,48	-261796147461,48
9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO	0	10065587955157,161	10065587955157,161
8123100- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO	0	(3.610.000)	(3.610.000)
8123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0	(6.313.196.500)	(6.313.196.500)
8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	0	-298994549501,81	-298994549501,81
8130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	0	-26689951219,13	-26689951219,13
8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0	-11852674378,1	-11852674378,1
8140200- Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	0	-10933940820,03	-10933940820,03
8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO	0	-102091574156,11	-102091574156,11
8140400- Pendapatan Bunga - LO	0	-104284751291,05	-104284751291,05
8140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0	-101190783166,86	-101190783166,86
8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	0	-61610450787,46	-61610450787,46
8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0	-35706196944,41	-35706196944,41
8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO	0	-47360046071,42	-47360046071,42
8140900- Pendapatan Denda Retribusi - LO	0	-831507,24	-831507,24
8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO	0	-43461577336,9	-43461577336,9
391142- Transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	26.967.738.677	26.967.738.677
391143- Transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	(26.967.738.677)	(26.967.738.677)
131ZZZZ- Tanah (BAS Level 4)	0	25509457062149,31	25509457062149,31
132ZZZZ- Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	18598862338724,68	18598862338724,68
133ZZZZ- Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	30198864658106,54	30198864658106,54
134ZZZZ- Jalan, Irigasi, dan Jaringan (BAS Level 4)	0	92307808123210,46	92307808123210,46
135ZZZZ- Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	2692838064940,016	2692838064940,016
9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material	0	196389761428,74	196389761428,74
9120300- Beban Jasa Kantor	0	3844259120518,7	3844259120518,7
9120400- Beban Premi Asuransi	0	900100883640,156	900100883640,156
9120500- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0	2.031.993.586	2.031.993.586
9120700- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	106057938398,36	106057938398,36

9120800- Beban Sewa Sarana Mobilitas	0	6.833.548.760	6.833.548.760
9120900- Beban Sewa Alat Berat	0	101743280493,32	101743280493,32
9121000- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	27.678.804.479	27.678.804.479
9121500- Beban Perjalanan Dinas	0	1999147642808,23	1999147642808,23
9121800- Beban Pemeliharaan	0	1143286107677,01	1143286107677,01
9121900- Beban Jasa Konsultasi	0	7373478682,02	7373478682,02
9122000- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	107347517441,59	107347517441,59
9122200- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0	4.561.994.610	4.561.994.610
9122300- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	88.154.163.053	88.154.163.053
9122400- Beban Honorarium Non Pegawai	0	41.977.381.526	41.977.381.526
9122500- Honorarium PNS	0	8.335.085.201	8.335.085.201
9122600- Honorarium Non PNS	0	17.651.660.127	17.651.660.127
9122700- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	556.570.000	556.570.000
9122800- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	0	170.046.184.500	170.046.184.500
9123000- Beban Jasa Pihak Ketiga	0	124173748042,37	124173748042,37
9123100- Beban Barang dan Jasa BLUD	0	904710001553,41	904710001553,41
9123200- Beban Barang dan Jasa dana BOS	0	544586719485,45	544586719485,45
9123300- Beban Penghargaan atau Prestasi	0	5.898.267.844	5.898.267.844
9130100- Bunga Utang Pinjaman	0	33784706228,9	33784706228,9
9140100- Beban Subsidi	0	28504026949,46	28504026949,46
9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah	0	335797883813,96	335797883813,96
9150200- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	4.639.236.488	4.639.236.488
9150400- Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	76724640950,4	76724640950,4
9150500- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	1963215736651,51	1963215736651,51
9150600- Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	0	445.297.242.057	445.297.242.057
9160100- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	6.531.046.190	6.531.046.190
9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	85.818.420.400	85.818.420.400
9170100- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1723888275245,5663	1723888275245,5663
9170200- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	797947792077,8976	797947792077,8976
9170300- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	5543146671415,114	5543146671415,114
9170400- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	39235970695,52	39235970695,52
9180200- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	133152715,57	133152715,57
9190300- Beban Lain-lain	0	21337330740,85	21337330740,85
9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	290.196.879.539	290.196.879.539
9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	1665272064309,6	1665272064309,6
9250100- Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0	1925088366030,89	1925088366030,89
9310100- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0	66837068721,48	66837068721,48
9330100- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0	34264813933,38	34264813933,38
9410100- Beban Luar Biasa	0	2.371.322.299	2.371.322.299
411241- Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	0	(15.138.665.418)	(15.138.665.418)
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	2.681.745.650	2.681.745.650
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	6.184.013.442	6.184.013.442
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	666.087.780	666.087.780
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	179.609.759.748	179.609.759.748
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3.578.608	3.578.608
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	11.470.137.740	11.470.137.740
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3.513.497.400	3.513.497.400
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	17.641.464.600	17.641.464.600
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	11.260.091.600	11.260.091.600
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	36.879.121	36.879.121
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	1.146.563.000	1.146.563.000
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	133.283.691.504	133.283.691.504
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	33.756.074.414	33.756.074.414
511629- Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	0	1.500.000	1.500.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	2.882.733.532	2.882.733.532
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	478.082.225	478.082.225
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	1.797.127.585	1.797.127.585
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(31.718.462.135.460)	(31.718.462.135.460)
9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah	0	3530493797038,5718	3530493797038,5718

Daerah			
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	451.200.301.695	451.200.301.695
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	66.200.000.000	66.200.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.323.841.863.000	1.323.841.863.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	645.481.529.000	645.481.529.000
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	273.507.027.000	273.507.027.000
138111- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	2.986.407.376.942	2.944.016.894.195	5.930.424.271.137
138121- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	1.439.682.593.997	117.088.889.384	1.556.771.483.381
138211- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	(296.100.249.347)	(123.853.371.751)	(419.953.621.098)
138221- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(14.542.248.424)	(32.632.645.013)	(47.174.893.437)
138311- Properti Investasi	18.209.534.000	0	18.209.534.000
138411- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(358.821.593)	(55.203.322)	(414.024.915)
591521- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	31.449.928.958	31.449.928.958
591611- Beban Penyusutan Properti Investasi	0	55.203.322	55.203.322
117151- Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	418.987.000	0	418.987.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	221.396.972.000	221.396.972.000
163139- Dana di Rekening Penampungan- Kementerian/Lembaga	451.336.557.996	(85.264.843.210)	366.071.714.786
166114- BMN Dalam Proses PMPP	0	25.583.928.000	25.583.928.000
163141- Dana di Rekening Penampungan - BLU	0	698.703.489	698.703.489
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	248.104.114.000	248.104.114.000
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(1.000.000)	(1.000.000)
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	10.632.395.146	10.632.395.146
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	483.864.371.469	483.864.371.469
215111- Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	(1.242.737.152)	(4.034.864.063.711)	(4.036.106.800.863)
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	53.143.432.879	53.143.432.879
594791- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	74.093.911	74.093.911
595113- Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	10.926.041	10.926.041
221919- Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	(1.755.226)	0	(1.755.226)
391111- Ekuitas	(203.575.496.016.952)	31.827.716.303.309	(171.747.779.713.643)
114211- uang muka belanja pegawai (prepayment)	32.409.076	(25.154.206)	7.254.870
115231- Piutang Transfer Dana Perimbangan	458.077.652.287	(298.455.409.482)	159.622.242.805
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(18.779.061.551)	(18.779.061.551)
131111- Tanah	133.692.251.837.636	236.286.686.962	133.928.538.524.598
111711- Kas di Bendahara Penerimaan	350.128.001	(335.573.919)	14.554.082
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	70.961.477.394	70.961.477.394
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	163.972.467.607	163.972.467.607
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	12.081.862.500	12.081.862.500
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	3.450.000	3.450.000
525113- Belanja Jasa	0	171.698.949.015	171.698.949.015
522112- Belanja Langganan Telepon	0	4.159.248.616	4.159.248.616
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	9.568.567.139	9.568.567.139
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	408.515.760.091	408.515.760.091
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	203.398.958.921	203.398.958.921
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	1.097.207.336.834	(126.349.112.606)	970.858.224.228
117128- Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	16.027.620.714	(4.550.137.033)	11.477.483.681
134112- Irigasi	35.713.309.104.190	299.028.883.097	36.012.337.987.287
115791- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	0	1.078.515.000	1.078.515.000
612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - luran Tetap	0	1.325.583.000	1.325.583.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	21.902.734.000	21.902.734.000
313221- Transfer Masuk	0	(2.786.644.090.935)	(2.786.644.090.935)
1130600- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0	62801461379,61	62801461379,61
1140500- Uang Muka	0	11730158768,07	11730158768,07
8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0	-114063050313,8081	-114063050313,8081
9180100- Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	127621130794,770004	127621130794,770004

Jumlah	0	- 155833287354130,392 613953	- 155833287354130,39261 3953
--------	---	------------------------------------	------------------------------------

LAMPIRAN II

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	7.150.370	8.949.350	16.099.720
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	649.311.898	(514.686.898)	134.625.000
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	548.603.668.417	(126.349.112.606)	422.254.555.811
111911- Kas dan Bank - BLU	654.395.704.589	37.212.296.337	691.608.000.926
311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	29.621.722.923	0	29.621.722.923
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(109.318.050.968.552)	(52.383.633.698.905)	(161.701.684.667.457)
313121- Diterima dari Entitas Lain	63.085.699.057.568	21.412.643.801.855	84.498.342.859.423
391111- Ekuitas	45.031.437.038.605	32.974.161.269.902	78.005.598.308.507
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrua dari Kas BP KL	(656.462.268)	505.737.548	(150.724.720)
399919- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas BLU	(31.706.223.550)	416.369.923	(31.289.853.627)
399921- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas Hibah	0	1.120.000.000	1.120.000.000
4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0	(1.275.596.737.684)	(1.275.596.737.684)
4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0	(1.162.920.590.375)	(1.162.920.590.375)
4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0	-1623265639257,82	-1623265639257,82
4110400- Pajak Air Permukaan - LRA	0	-21325238654,05	-21325238654,05
4110500- Pajak Rokok - LRA	0	(661.592.974.406)	(661.592.974.406)
4110600- Pajak Hotel - LRA	0	(148.656.196.139)	(148.656.196.139)
4110700- Pajak Restoran - LRA	0	-581549033448,6	-581549033448,6
4110800- Pajak Hiburan - LRA	0	(82.601.662.385)	(82.601.662.385)
4110900- Pajak Reklame - LRA	0	(68.458.868.071)	(68.458.868.071)
4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA	0	-910447441575,94	-910447441575,94
4111100- Pajak Parkir - LRA	0	(29.444.234.343)	(29.444.234.343)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(7.924.779.609)	(7.924.779.609)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(540.000)	(540.000)
4111200- Pajak Air Tanah - LRA	0	(11.295.734.067)	(11.295.734.067)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(3.766.380.212.651)	(3.766.380.212.651)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(451.138.649.093)	(451.138.649.093)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(67.063.917)	(67.063.917)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(953.442.270.944)	(953.442.270.944)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(205.101.290.954)	(205.101.290.954)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.962.936.315.056)	(1.962.936.315.056)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(145.214.921.031)	(145.214.921.031)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(1.223.655.725.237)	(1.223.655.725.237)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(357.442.542)	(357.442.542)
4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0	(1.094.950.925)	(1.094.950.925)
4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0	(111.786.995.189)	(111.786.995.189)
4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0	(720.160.886.205)	(720.160.886.205)
4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	0	(795.324.738.384)	(795.324.738.384)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(7.738.690.791.563)	(7.738.690.791.563)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(515.022.814)	(515.022.814)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(2.283.893.208)	(2.283.893.208)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(8.381.378.933)	(8.381.378.933)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(2.051.026)	(2.051.026)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.284.485)	(1.284.485)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(292.871.787.299)	(292.871.787.299)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(102.271.364.231)	(102.271.364.231)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(823.467.264.292)	(823.467.264.292)
411316- Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	(160.962.540.333)	(160.962.540.333)
411317- Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	(17.985.870.458)	(17.985.870.458)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(55.167.588)	(55.167.588)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(6.865.000)	(6.865.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(413.958.000)	(413.958.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(4.775.676.226)	(4.775.676.226)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	(147.000.158.459)	(147.000.158.459)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(49.519.262)	(49.519.262)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(18.187.111.040)	(18.187.111.040)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(577.798.535)	(577.798.535)

4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	0	-194621558067,63	-194621558067,63
4120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	0	(14.064.429.276)	(14.064.429.276)
4120400- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	0	(450.000)	(450.000)
4120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	0	(15.922.148.100)	(15.922.148.100)
4120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	0	(7.294.458.300)	(7.294.458.300)
4120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	0	(850.000)	(850.000)
4120800- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	0	(38.149.000)	(38.149.000)
4121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	0	(286.641.000)	(286.641.000)
4121100- Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA	0	(757.509.700)	(757.509.700)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(143.914.351.000)	(143.914.351.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(3.624.954.000)	(3.624.954.000)
412114- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	(11.751.279.865)	(11.751.279.865)
412119- Pendapatan Pabean Lainnya	0	(144.000)	(144.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(1.480.085.000)	(1.480.085.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(14.372.861.000)	(14.372.861.000)
4121300- Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	0	(16.555.000)	(16.555.000)
4121400- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	0	-1077249811,76	-1077249811,76
4121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0	(10.968.872.339)	(10.968.872.339)
4121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	0	(3.762.389.060)	(3.762.389.060)
4121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0	(208.111.400)	(208.111.400)
4121800- Retribusi Terminal - LRA	0	(1.049.131.000)	(1.049.131.000)
4121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	0	(622.697.000)	(622.697.000)
4122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	0	(2.953.109.361)	(2.953.109.361)
4122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	0	(625.875.400)	(625.875.400)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(167.722.102.000)	(167.722.102.000)
4122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	0	(802.999.450)	(802.999.450)
4122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	0	(2.718.287.900)	(2.718.287.900)
4122400- Retribusi Penyeberangan Air - LRA	0	(2.877.450.103)	(2.877.450.103)
4122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	0	(1.894.814.200)	(1.894.814.200)
4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	0	(48.948.350.636)	(48.948.350.636)
4123100- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA	0	(3.610.000)	(3.610.000)
4123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	0	(6.313.166.500)	(6.313.166.500)
4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0	-401650739405,92	-401650739405,92
4130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	0	-29699179793,81	-29699179793,81
4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0	-13012374097,05	-13012374097,05
4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA	0	-106776699922,58	-106776699922,58
4140400- Pendapatan Bunga - LRA	0	-101191320049,24	-101191320049,24
4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0	-125271040977,04	-125271040977,04
4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	0	-88335783202,63	-88335783202,63
4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0	-149833548040,38	-149833548040,38
4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA	0	-47597555764,02	-47597555764,02
4140900- Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0	-838407,24	-838407,24
4141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(34.365.251)	(34.365.251)
4141300- Pendapatan dari Pengembalian	0	-73147554026,79	-73147554026,79
4141600- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0	-13121385568,78	-13121385568,78
4141700- Pendapatan Zakat* - LRA	0	-1076568192,97	-1076568192,97
4141800- Pendapatan BLUD - LRA	0	-1430463944799,2	-1430463944799,2
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	(978.758.533)	(978.758.533)
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	-4459579334766,99	-4459579334766,99
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	-9493114798111,01	-9493114798111,01
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	(14.816.824.522.335)	(14.816.824.522.335)
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	(6.006.539.725.337)	(6.006.539.725.337)
4220400- Dana Insentif Daerah	0	(239.906.026.500)	(239.906.026.500)

4220500- Dana Desa	0	(2.592.619.709.200)	(2.592.619.709.200)
4220600- Dana Bantuan Operasional Sekolah	0	(57.070.093.230)	(57.070.093.230)
4230100- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	0	(464.535.582.727)	(464.535.582.727)
4240100- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0	-58308584748,93	-58308584748,93
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(1.213.067.890.860)	(1.213.067.890.860)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(706.849.899.755)	(706.849.899.755)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(33.164.391.641)	(33.164.391.641)
424213- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	(1.318.419.000)	(1.318.419.000)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(17.419.446.621)	(17.419.446.621)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(8.492.896.273)	(8.492.896.273)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(14.271.780.048)	(14.271.780.048)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(3.206.207.784)	(3.206.207.784)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(39.289.645.656)	(39.289.645.656)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(21.700.000)	(21.700.000)
424916- Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(28.988.721)	(28.988.721)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(35.788.746.450)	(35.788.746.450)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(820.794.174)	(820.794.174)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(5.471.869.801)	(5.471.869.801)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(7.963.621.226)	(7.963.621.226)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(995.282.800)	(995.282.800)
424925- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	(5.812.897.072)	(5.812.897.072)
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	(2.581.344.480)	(2.581.344.480)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(8.702.111.950)	(8.702.111.950)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(6.245.000)	(6.245.000)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(417.891.000)	(417.891.000)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(4.767.855.291)	(4.767.855.291)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(1.793.629.836)	(1.793.629.836)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(19.592.359.642)	(19.592.359.642)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(45.565.000)	(45.565.000)
425211- Pendapatan Paspor	0	(43.006.000.000)	(43.006.000.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(5.605.750.000)	(5.605.750.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(998.400.000)	(998.400.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(166.825.292)	(166.825.292)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(5.470.000)	(5.470.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(37.330.000)	(37.330.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(621.777.500)	(621.777.500)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(6.843.686.127)	(6.843.686.127)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(9.017.420.200)	(9.017.420.200)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(3.906.416.000)	(3.906.416.000)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(1.894.051.350)	(1.894.051.350)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(990.500.000)	(990.500.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(7.515.664.410)	(7.515.664.410)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(276.952.000)	(276.952.000)
425245- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	0	(257.283.978)	(257.283.978)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(2.431.892.549)	(2.431.892.549)
425248- Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	(944.757.347)	(944.757.347)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya	0	(1.257.925.900)	(1.257.925.900)

yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan			
425252- Pendapatan Perizinan Pertanian	0	(5.650.000)	(5.650.000)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(10.050.000)	(10.050.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(8.288.765.672)	(8.288.765.672)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(13.424.100.000)	(13.424.100.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(11.681.190.000)	(11.681.190.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(55.614.200.000)	(55.614.200.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(4.594.580.000)	(4.594.580.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(61.617.975.000)	(61.617.975.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(30.078.320.000)	(30.078.320.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(454.250.000)	(454.250.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(2.548.050.000)	(2.548.050.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(9.597.500.000)	(9.597.500.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(7.675.050.000)	(7.675.050.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(5.645.025.000)	(5.645.025.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(1.783.135.000)	(1.783.135.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(26.119.858.997)	(26.119.858.997)
425282- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(113.845.800)	(113.845.800)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(4.463.947.000)	(4.463.947.000)
425285- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	0	(655.337.000)	(655.337.000)
425286- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	0	(281.941.000)	(281.941.000)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(150.193.936)	(150.193.936)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(16.819.649.768)	(16.819.649.768)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(38.437.399.064)	(38.437.399.064)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(3.435.288.742)	(3.435.288.742)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.863.220.000)	(1.863.220.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(2.290.925.000)	(2.290.925.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(193.175.000)	(193.175.000)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.700.183.271)	(3.700.183.271)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(3.010.000)	(3.010.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(49.690.950.163)	(49.690.950.163)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(24.341.400.000)	(24.341.400.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(207.000.000)	(207.000.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(4.564.650.000)	(4.564.650.000)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(919.939.700)	(919.939.700)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(760.940.000)	(760.940.000)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(7.945.000)	(7.945.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(250.540.000)	(250.540.000)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(12.239.269)	(12.239.269)
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(1.000.000)	(1.000.000)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(128.000.000)	(128.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(210.686.143.376)	(210.686.143.376)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(28.481.447.415)	(28.481.447.415)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(6.091.334.700)	(6.091.334.700)

425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(1.437.462.715)	(1.437.462.715)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(11.673.618.606)	(11.673.618.606)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(4.609.175.785)	(4.609.175.785)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(12.650.346.447)	(12.650.346.447)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(186.875.000)	(186.875.000)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(216.760.500)	(216.760.500)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(886.267.990)	(886.267.990)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(16.186.700)	(16.186.700)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.324.079.988)	(2.324.079.988)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(175.000)	(175.000)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(153.870.594)	(153.870.594)
425765- Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	(64.441)	(64.441)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(55.800.000)	(55.800.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(17.762.134.248)	(17.762.134.248)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(6.088.280.678)	(6.088.280.678)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.996.094.920)	(2.996.094.920)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(29.000.414)	(29.000.414)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(79.902.429)	(79.902.429)
425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	(656.922.250)	(656.922.250)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(32.998.625.186)	(32.998.625.186)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(2.266.036)	(2.266.036)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(1.412.366.452)	(1.412.366.452)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(15.986.935.232)	(15.986.935.232)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(43.238.853.615)	(43.238.853.615)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(729.379.417.278)	(729.379.417.278)
425983- Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye	0	(1.200.000)	(1.200.000)
425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	(29.820.126)	(29.820.126)
425995- Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	0	(84.287.000)	(84.287.000)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(4.038.085.534)	(4.038.085.534)
4310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	0	(124.619.213.000)	(124.619.213.000)
4310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	0	(7.074.160.879)	(7.074.160.879)
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	-69688078513,64	-69688078513,64
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(32.974.161.269.902)	(32.974.161.269.902)
5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	10097244831081,5	10097244831081,5
5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	5459923875075,8	5459923875075,8
5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0	452298149660,08	452298149660,08
5110800- Belanja Pegawai Dana BOS	0	110.615.527.308	110.615.527.308
5110900- Belanja Pegawai Dana BLUD	0	301393767616,86	301393767616,86
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	1.009.782.881.755	1.009.782.881.755
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	22.844.611	22.844.611
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	70.969.658.814	70.969.658.814
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	21.325.193.159	21.325.193.159
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	10.626.738.290	10.626.738.290
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	187.512.350.700	187.512.350.700
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	24.597.020.149	24.597.020.149
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	52.153.898.870	52.153.898.870
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	164.709.474.044	164.709.474.044
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	1.046.423.600	1.046.423.600
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	31.500.000	31.500.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	802.000.000	802.000.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	12.086.547.500	12.086.547.500
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	323.591.889.245	323.591.889.245
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	104.146.454.680	104.146.454.680
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	21.517.485.360	21.517.485.360
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	4.494.350.000	4.494.350.000

511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	87.311.786.254	87.311.786.254
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	1.231.631	1.231.631
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	5.524.418.220	5.524.418.220
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	1.555.707.224	1.555.707.224
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	2.696.364.850	2.696.364.850
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	372.340.000	372.340.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	558.036.124	558.036.124
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	4.206.720.906	4.206.720.906
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	13.426.821.800	13.426.821.800
511184- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri	0	37.950.000	37.950.000
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	3.450.000	3.450.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	3.067.640.000	3.067.640.000
511194- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	0	50.880.000	50.880.000
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.212.651.330.590	1.212.651.330.590
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	20.220.291	20.220.291
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	86.231.546.280	86.231.546.280
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	27.512.750.740	27.512.750.740
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	47.121.389.468	47.121.389.468
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.801.532.291	1.801.532.291
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	12.533.250.834	12.533.250.834
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	101.133.936.973	101.133.936.973
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	626.469.027.250	626.469.027.250
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	660.300.000	660.300.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	2.887.850.000	2.887.850.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	1.671.993.875	1.671.993.875
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	633.900.000	633.900.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	704.084.000	704.084.000
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	67.980.000	67.980.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	3.017.100.000	3.017.100.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	15.289.990.700	15.289.990.700
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	69.546.150	69.546.150
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	24.091.999.350	24.091.999.350
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	26.869.371.976	26.869.371.976
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	1.229.554.154	1.229.554.154
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	85.402.722	85.402.722
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	106.260.000	106.260.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	252.330.619.907	252.330.619.907
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	15.618.000.000	15.618.000.000
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	782.500.000	782.500.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	179.609.062.148	179.609.062.148
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3.578.608	3.578.608
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	11.470.731.040	11.470.731.040
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3.513.497.400	3.513.497.400
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	17.645.454.600	17.645.454.600
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	11.260.526.120	11.260.526.120
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	33.596.774.464	33.596.774.464
511629- Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	0	252.740.000	252.740.000
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	36.879.301	36.879.301
5120100- Belanja Bahan Pakai Habis	0	3144763804066,81	3144763804066,81
5120200- Belanja Bahan/Material	0	58.233.723.463	58.233.723.463
5120300- Belanja Jasa Kantor	0	3405218914113,98	3405218914113,98
5120400- Belanja Premi Asuransi	0	992243628623,84	992243628623,84
5120700- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	119.910.424.331	119.910.424.331
5120800- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	134.816.279.604	134.816.279.604
5121000- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	5.822.061.515	5.822.061.515
512111- Belanja Uang Honor Tetap	0	378.800.000	378.800.000
5121500- Belanja Perjalanan Dinas	0	1989233199505,9	1989233199505,9
5121800- Belanja Pemeliharaan	0	1157684692260,47	1157684692260,47
5122000- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	294.131.259.649	294.131.259.649
512211- Belanja Uang Lembur	0	22.411.557.650	22.411.557.650
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	1.146.694.000	1.146.694.000
5122200- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	4.056.581.750	4.056.581.750
5122300- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	90.271.016.368	90.271.016.368
5122600- Honorarium Non PNS	0	12.069.958.737	12.069.958.737
5122900- Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	260595918782,74	260595918782,74

5123000- Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	1232038094989,43	1232038094989,43
5123100- Belanja Barang dan Jasa dana BOS	0	1179975004561,73	1179975004561,73
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	999.657.102.963	999.657.102.963
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	130.417.055.384	130.417.055.384
5130100- Bunga Utang Pinjaman	0	34225157896,65	34225157896,65
5140100- Belanja Subsidi	0	31729691575,18	31729691575,18
5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah	0	302672764921,19	302672764921,19
5150200- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	1.837.895.500	1.837.895.500
5150400- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	38.246.767.164	38.246.767.164
5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	1686390936981,28	1686390936981,28
5150600- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***	0	291.120.407.718	291.120.407.718
5160100- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	8.856.720.000	8.856.720.000
5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	56.753.224.000	56.753.224.000
5211100- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	40.492.202.935	40.492.202.935
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	305.270.292.223	305.270.292.223
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	171.161.355.436	171.161.355.436
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	6.283.486.487	6.283.486.487
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	2.638.880.206	2.638.880.206
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	79.953.017.670	79.953.017.670
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	483.960.699.224	483.960.699.224
5211300- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	4.571.088.648	4.571.088.648
521211- Belanja Bahan	0	332.128.548.649	332.128.548.649
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	854.588.063.250	854.588.063.250
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	824.762.864.501	824.762.864.501
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	878.660.000	878.660.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	3.296.650.000	3.296.650.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	2.540.917.577	2.540.917.577
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	16.997.000	16.997.000
521723- Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0	222.129.842.251	222.129.842.251
521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	172.618.791.373	172.618.791.373
521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	19.250.000	19.250.000
521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	7.029.683.890	7.029.683.890
521822- Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	8.973.346.650	8.973.346.650
521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	6.232.158.777	6.232.158.777
5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	67.433.973.555	67.433.973.555
5220300- Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0	43.537.577.570	43.537.577.570
5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	308.493.274.612	308.493.274.612
5220500- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	1.317.258.000	1.317.258.000
5220600- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0	290.700.000	290.700.000
5220700- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	1.829.500.000	1.829.500.000
5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0	7.767.059.140	7.767.059.140
5221000- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0	659.216.272	659.216.272
5221100- Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0	3.186.912.560	3.186.912.560
522111- Belanja Langganan Listrik	0	128.053.943.726	128.053.943.726
522112- Belanja Langganan Telepon	0	4.213.701.486	4.213.701.486
522113- Belanja Langganan Air	0	11.322.920.144	11.322.920.144
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	19.755.328.179	19.755.328.179
5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0	2.800.685.040	2.800.685.040
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	288.308.714	288.308.714
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	53.126.432.879	53.126.432.879
5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0	307.369.293.315	307.369.293.315
522141- Belanja Sewa	0	97.180.693.776	97.180.693.776
5221500- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	345996428551,34	345996428551,34
522151- Belanja Jasa Profesi	0	55.127.634.893	55.127.634.893
5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer	0	200.106.152.599	200.106.152.599

522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	194.257.800	194.257.800
5221700- Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	23.860.912.433	23.860.912.433
5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0	29.224.825.260	29.224.825.260
5221900- Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0	6.778.484.993	6.778.484.993
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	204.957.755.393	204.957.755.393
5222000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0	4.066.584.890	4.066.584.890
5222100- Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0	160.789.737.246	160.789.737.246
5222200- Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0	88.177.927.778	88.177.927.778
5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0	19.902.588.038	19.902.588.038
5222400- Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	226.612.065.219	226.612.065.219
5222600- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	1.177.499.800	1.177.499.800
5222700- Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0	3.508.000.000	3.508.000.000
5222900- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	954.350.000	954.350.000
5223000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	99.500.000	99.500.000
5223500- Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	12.614.685.200	12.614.685.200
5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	2123089828723,36	2123089828723,36
5230200- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	31.404.823.342	31.404.823.342
5230300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	0	573.350.000	573.350.000
5230700- Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0	1.485.382.442	1.485.382.442
5230900- Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	131473458605,13	131473458605,13
5231000- Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	0	51498340503,77	51498340503,77
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	142.252.465.891	142.252.465.891
523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	156.085.030	156.085.030
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	4.468.615.852	4.468.615.852
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	161.122.438.493	161.122.438.493
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	56.466.851.109	56.466.851.109
523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	16.590.808.567	16.590.808.567
523125- Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	12.250.766.000	12.250.766.000
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	820.394.811	820.394.811
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	349.943.607.904	349.943.607.904
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	131.374.439.066	131.374.439.066
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	9.612.563.287	9.612.563.287
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	2.654.021.457	2.654.021.457
5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan	0	5357921071217,77	5357921071217,77
5240200- Belanja modal Pengadaan Jembatan	0	598109178734,83	598109178734,83
5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0	506.308.742.893	506.308.742.893
5240400- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0	42.996.195.707	42.996.195.707
5240500- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	0	4.872.093.432	4.872.093.432
5240600- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	407395442450,01	407395442450,01
5240700- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0	512.517.400	512.517.400
5240800- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0	22.159.293.161	22.159.293.161
5240900- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0	157718187351,64	157718187351,64
5241100- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0	35.177.261.368	35.177.261.368
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	408.047.384.173	408.047.384.173
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	685.439.674	685.439.674
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	95.066.991.264	95.066.991.264
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	135.026.593.540	135.026.593.540
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	54.534.112.940	54.534.112.940

Kota			
5241200- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0	98.468.977.948	98.468.977.948
5241300- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0	1.205.551.000	1.205.551.000
5241500- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0	13.253.581.229	13.253.581.229
5241600- Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0	1.349.505.000	1.349.505.000
5242000- Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	129.033.032.257	129.033.032.257
5242100- Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	0	195747366617,62	195747366617,62
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	5.502.583.774	5.502.583.774
524219- Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	206.802.700	206.802.700
5242200- Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	0	546.509.000	546.509.000
5242400- Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0	3.005.042.321	3.005.042.321
5250300- Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0	21.538.658.584	21.538.658.584
5250400- Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	2.319.808.650	2.319.808.650
5250700- Belanja modal Pengadaan Tanaman	0	635.068.000	635.068.000
5250800- Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN	0	219.304.680.644	219.304.680.644
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	655.118.302.392	655.118.302.392
525112- Belanja Barang	0	171.647.349.297	171.647.349.297
525113- Belanja Jasa	0	198.481.214.350	198.481.214.350
525114- Belanja Pemeliharaan	0	66.726.632.197	66.726.632.197
525115- Belanja Perjalanan	0	41.173.497.707	41.173.497.707
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	241.691.665.783	241.691.665.783
525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	408.400.645.039	408.400.645.039
525125- Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	2.547.491.000	2.547.491.000
525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	28.322.237.193	28.322.237.193
525143- Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	523.942.000	523.942.000
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	1.323.976.645	1.323.976.645
526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	2.614.883.500	2.614.883.500
526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	115.483.652.579	115.483.652.579
526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	42.563.368.086	42.563.368.086
526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	6.615.525.934	6.615.525.934
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	1.319.823.975	1.319.823.975
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	1.539.137.000	1.539.137.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	87.812.600.000	87.812.600.000
526223- Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	3.833.652.500	3.833.652.500
526224- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	2.087.993.775	2.087.993.775
526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	341.965.452.958	341.965.452.958
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	180.857.290.100	180.857.290.100
5270100- Belanja Modal Aset Lainnya	0	56160047152,64	56160047152,64
5280100- Belanja Modal BLUD	0	92826357476,45	92826357476,45
5310100- Belanja Tak Terduga	0	12.542.184.560	12.542.184.560
531111- Belanja Modal Tanah	0	357.886.000	357.886.000
531112- Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	5.347.351.600	5.347.351.600
531113- Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	99.456.000	99.456.000
531114- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	3.716.493.700	3.716.493.700
531115- Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	9.999.600.000	9.999.600.000
531117- Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	95.156.100	95.156.100
532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	283.296.969.044	283.296.969.044
532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	357.068.002	357.068.002
533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	506.231.244.103	506.231.244.103

533112- Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	13.919.425.000	13.919.425.000
533113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	5.700.767.864	5.700.767.864
533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	6.086.316.352	6.086.316.352
533118- Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	841.563.153	841.563.153
533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	51.256.336.273	51.256.336.273
534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	1.851.276.724.128	1.851.276.724.128
534115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	195.471.000	195.471.000
534121- Belanja Modal Irigasi	0	600.355.165.235	600.355.165.235
534122- Belanja Modal Bahan Baku Irigasi	0	975.758.190	975.758.190
534123- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	0	199.910.000	199.910.000
534124- Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi	0	583.290.000	583.290.000
534128- Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0	41.040.000	41.040.000
534131- Belanja Modal Jaringan	0	1.545.698.525.876	1.545.698.525.876
534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	624.565.536.670	624.565.536.670
534151- Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	82.766.671.167	82.766.671.167
534161- Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	27.425.000	27.425.000
536111- Belanja Modal Lainnya	0	5.657.616.637	5.657.616.637
536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	244.272.870	244.272.870
536114- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	3.600.000	3.600.000
536117- Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	698.344.000	698.344.000
536121- Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	166.900.000	166.900.000
537111- Belanja Modal Tanah - BLU	0	5.476.250.000	5.476.250.000
537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	84.526.470.291	84.526.470.291
537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	142.351.506.877	142.351.506.877
537114- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	128.661.881	128.661.881
537115- Belanja Modal Lainnya - BLU	0	10.274.193.530	10.274.193.530
571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	751.984.000	751.984.000
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	3.920.580.000	3.920.580.000
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	24.057.000.000	24.057.000.000
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	480.646.066.000	480.646.066.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	21.490.400.000	21.490.400.000
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	523.878.653.000	523.878.653.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	2.883.625.882.000	2.883.625.882.000
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0	4.000	4.000
611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	0	30.000	30.000
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	403.961.218.000	403.961.218.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	1.312.902.448.000	1.312.902.448.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	31.049.267.000	31.049.267.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	5.235.400.603.000	5.235.400.603.000
612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	0	10.330.086.000	10.330.086.000
612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - luran Tetap	0	1.356.956.000	1.356.956.000
612413- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - luran Produksi (Royalti)	0	11.943.210.000	11.943.210.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	2.000	2.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	38.485.692.000	38.485.692.000
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	3.945.509.000	3.945.509.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	21.902.734.000	21.902.734.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	221.396.972.000	221.396.972.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	178.298.800	178.298.800
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	10.345.103.354.000	10.345.103.354.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan	0	451.200.301.695	451.200.301.695

Penggajian PPPK Daerah			
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	66.200.000.000	66.200.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.323.841.863.000	1.323.841.863.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	645.481.529.000	645.481.529.000
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	273.507.027.000	273.507.027.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	248.104.114.000	248.104.114.000
6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	4221422414209,6	4221422414209,6
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	1.400.771.910.611	1.400.771.910.611
643111- Insentif Fiskal	0	239.906.026.500	239.906.026.500
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	1.703.641.440.012	1.703.641.440.012
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	32.499.089.000	32.499.089.000
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	77.328.421.000	77.328.421.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.735.205.126.871	1.735.205.126.871
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	387.794.953.367	387.794.953.367
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	97.406.868.000	97.406.868.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	5.670.068.000	5.670.068.000
654821- Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0	1.123.000.000	1.123.000.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	100.438.173.700	100.438.173.700
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesenjangan	0	25.234.702.146	25.234.702.146
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	7.000.000.000	7.000.000.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	3.918.000.000	3.918.000.000
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	6.849.837.000	6.849.837.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	821.725.000	821.725.000
662111- Belanja Dana Desa	0	2.592.619.709.200	2.592.619.709.200
7110100- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	0	-2758262429904,7	-2758262429904,7
7120100- Pencairan Dana Cadangan	0	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
7150500- Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	0	(103.200.000)	(103.200.000)
7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping LSKP	0	2571281586012,569853	2571281586012,569853
7220100- Penyertaan Modal pada BUMN	0	4.000.000.000	4.000.000.000
7220200- Penyertaan Modal pada BUMD	0	39.798.311.793	39.798.311.793
7230100- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	0	92.840.663.809	92.840.663.809
7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	103177705206,55	103177705206,55
7230400- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0	132.642.917.722	132.642.917.722
815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	(32.198.191.030)	(32.198.191.030)
815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(6.269.978.000)	(6.269.978.000)
815114- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu	0	(7.150.370)	(7.150.370)
815121- Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening Penerimaan (Persepsi) KPPN	0	(223.119.920)	(223.119.920)
815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	(323.135.156.852)	(323.135.156.852)
815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(32.071.048.514)	(32.071.048.514)
815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(649.311.898)	(649.311.898)
815619- Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	(372.089.206.744)	(372.089.206.744)
817714- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	0	(33.000.000.000)	(33.000.000.000)
817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	(2.592.619.709.200)	(2.592.619.709.200)
825111- Pengeluaran Uang Persediaan	0	32.214.290.750	32.214.290.750

825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)	0	6.269.978.000	6.269.978.000
825121- Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	0	223.119.920	223.119.920
825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	0	323.269.740.852	323.269.740.852
825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana)	0	32.071.089.514	32.071.089.514
825619- Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	457.354.049.954	457.354.049.954
827714- Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	0	33.000.000.000	33.000.000.000
827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	2.592.619.709.200	2.592.619.709.200
Jumlah	0	-,000147	-,000147

LAMPIRAN III
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	(1.524.077.575.824)	(1.524.077.575.824)
1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	-228320635227,62	-228320635227,62
215111- Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	0	1752398211051,62	1752398211051,62
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(455.918.742.000)	(455.918.742.000)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(20.184.284.000)	(20.184.284.000)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(484.550.531.000)	(484.550.531.000)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(2.642.235.912.000)	(2.642.235.912.000)
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	(403.239.468.000)	(403.239.468.000)
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	(1.090.032.958.000)	(1.090.032.958.000)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	(26.801.475.000)	(26.801.475.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(4.542.802.104.000)	(4.542.802.104.000)
612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	0	(8.633.608.000)	(8.633.608.000)
612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	0	(1.325.583.000)	(1.325.583.000)
612413- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	0	(11.925.213.000)	(11.925.213.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(34.433.541.000)	(34.433.541.000)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(939.414.000)	(939.414.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(21.902.734.000)	(21.902.734.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(221.396.972.000)	(221.396.972.000)
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	(175.134.800)	(175.134.800)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(10.345.103.354.000)	(10.345.103.354.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(451.200.301.695)	(451.200.301.695)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(66.200.000.000)	(66.200.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(1.323.841.863.000)	(1.323.841.863.000)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(645.481.529.000)	(645.481.529.000)
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	(273.507.027.000)	(273.507.027.000)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(248.104.114.000)	(248.104.114.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(1.400.771.910.611)	(1.400.771.910.611)
643111- Insentif Fiskal	0	(239.906.026.500)	(239.906.026.500)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(1.703.641.440.012)	(1.703.641.440.012)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(32.499.089.000)	(32.499.089.000)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(77.328.421.000)	(77.328.421.000)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.739.259.189.000)	(1.739.259.189.000)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(374.308.687.678)	(374.308.687.678)
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(90.385.620.750)	(90.385.620.750)
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	(5.154.339.391)	(5.154.339.391)
654821- Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0	(1.123.000.000)	(1.123.000.000)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(100.578.921.000)	(100.578.921.000)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(26.663.376.500)	(26.663.376.500)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	(6.452.083.102)	(6.452.083.102)
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(2.681.745.650)	(2.681.745.650)
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	(6.184.013.442)	(6.184.013.442)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(666.087.780)	(666.087.780)
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	3.603.064.603.800	3.603.064.603.800
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	6.363.433.070.000	6.363.433.070.000

8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	13.353.438.188.695	13.353.438.188.695
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	5.567.697.924.916	5.567.697.924.916
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	239.906.026.500	239.906.026.500
Jumlah	0	0	0

LAMPIRAN IV

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

ELIMINASI/KONSOLDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	3.909.819.333.800	3.909.819.333.800
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	7.292.674.697.000	7.292.674.697.000
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	13.353.438.188.695	13.353.438.188.695
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	5.585.703.314.707	5.585.703.314.707
4220400- Dana Insentif Daerah	0	239.906.026.500	239.906.026.500
4220500- Dana Desa	0	2.592.619.709.200	2.592.619.709.200
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(480.646.066.000)	(480.646.066.000)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(21.490.400.000)	(21.490.400.000)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(523.878.653.000)	(523.878.653.000)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(2.883.625.882.000)	(2.883.625.882.000)
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0	(4.000)	(4.000)
611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(30.000)	(30.000)
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	(403.961.218.000)	(403.961.218.000)
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	(1.312.902.448.000)	(1.312.902.448.000)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	(31.049.267.000)	(31.049.267.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(5.235.400.603.000)	(5.235.400.603.000)
612411- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	0	(10.330.086.000)	(10.330.086.000)
612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	0	(1.356.956.000)	(1.356.956.000)
612413- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	0	(11.943.210.000)	(11.943.210.000)
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	(2.000)	(2.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(38.485.692.000)	(38.485.692.000)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(3.945.509.000)	(3.945.509.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(21.902.734.000)	(21.902.734.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(221.396.972.000)	(221.396.972.000)
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	(178.298.800)	(178.298.800)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(10.345.103.354.000)	(10.345.103.354.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(451.200.301.695)	(451.200.301.695)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(66.200.000.000)	(66.200.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(1.323.841.863.000)	(1.323.841.863.000)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(645.481.529.000)	(645.481.529.000)
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	(273.507.027.000)	(273.507.027.000)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(248.104.114.000)	(248.104.114.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(1.400.771.910.611)	(1.400.771.910.611)
643111- Insentif Fiskal	0	(239.906.026.500)	(239.906.026.500)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(1.703.641.440.012)	(1.703.641.440.012)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(32.499.089.000)	(32.499.089.000)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(77.328.421.000)	(77.328.421.000)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.735.205.126.871)	(1.735.205.126.871)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(387.794.953.367)	(387.794.953.367)
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(97.406.868.000)	(97.406.868.000)
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	(5.670.068.000)	(5.670.068.000)
654821- Dana Pelayanan Kepariwisata	0	(1.123.000.000)	(1.123.000.000)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(100.438.173.700)	(100.438.173.700)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(25.234.702.146)	(25.234.702.146)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan	0	(7.000.000.000)	(7.000.000.000)

(BOP) Museum dan Taman Budaya			
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(3.918.000.000)	(3.918.000.000)
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	(6.849.837.000)	(6.849.837.000)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(821.725.000)	(821.725.000)
662111- Belanja Dana Desa	0	(2.592.619.709.200)	(2.592.619.709.200)
Jumlah	0	0	0